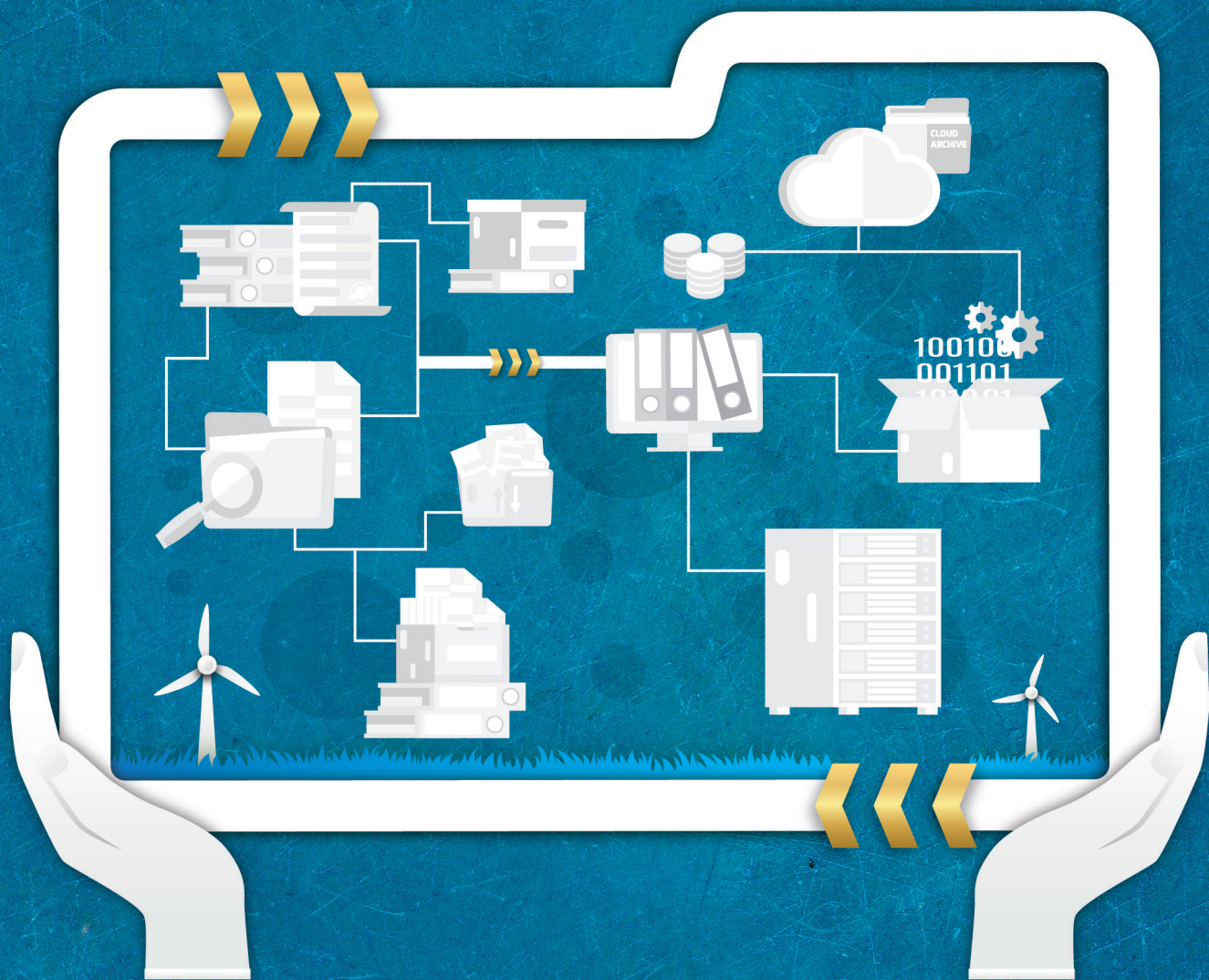


ARSIP

MEDIA KEARSIPAN NASIONAL



KEARSIPAN BERKELANJUTAN

UNTUK MASA DEPAN TERBAIK



EDISI 84 | TAHUN 2024



HARI
KEARSIPAN
KE-53
SUSTAINABLE ARCHIVING
FOR THE BEST FUTURE

*Terima kasih
atas kerja sama semua pihak*

ARSIP NASIONAL RI

Kembali dinobatkan sebagai Badan Publik

INFORMATIF

oleh **KOMISI INFORMASI PUSAT RI**



RUBRIK

4 **DARI REDAKSI**

9 **ARTIKEL LAPORAN UTAMA**

KEARSIPAN BERKELANJUTAN,
REKAM DAN LESTARIKAN MEMORI
PEMBANGUNAN INDONESIA

JALAN SUNYI MEMBANGUN MEMORI:
REFLEKSI SINGKAT AKUISISI ARSIP STATIS

14 **KHAZANAH**

MENGENAL ARSIP STATIS KORUPSI
DI INDONESIA DARI ERA VEREENIGDE
OOSTINDISCHE COMPAGNIE (VOC) HINGGA
ERA REPUBLIK

ARSIP FILM GELORA PEMBANGUNAN

24 **PROFIL**

DR. A.K. GANI
PEJUANG PARIPURNA

30 **MANCANEGERA**

MANAJEMEN KEARSIPAN NASA:
SEJARAH DAN PRAKTIKNYA

34 **DAERAH**

SEMANGAT MEMAJUKAN PENYELENGGARAAN
KEARSIPAN DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

40 **HUKUM**

PERKUAT SUMBER DAYA MANUSIA KEARSIPAN
ANRI MENETAPKAN PERATURAN TENTANG
PELATIHAN KEARSIPAN DAN
SURAT EDARAN UJI KOMPETENSI

45 **CERITA KITA**

KISAH KEBUN KARET

48 **LIPUTAN**



LAPORAN UTAMA 5

KEARSIPAN BERKELANJUTAN
UNTUK MASA DEPAN TERBAIK



PRESERVASI 26

DISASTER PLANNING & RESPONSE
PADA LEMBAGA KEARSIPAN TERHADAP
BENCANA KEBAKARAN



TEKNOLOGI 38

PERKEMBANGAN PEMULIHAN
APLIKASI SRIKANDI : BACKUP DATA
TERSELAMATKAN PER 13 JUNI 2024



Desain sampul : Aswin Budiarto

Pembina :

Kepala ANRI,
Sekretaris Utama,
Deputi Bidang Penyelamatan,
Pelestarian dan Pelindungan Arsip,
Deputi Bidang Tata Kelola Kearsipan Nasional,
Deputi Bidang Sistem dan Informasi
Kearsipan Nasional

Penanggung Jawab :

Muhammad Sumitro

Pemimpin Redaksi :

Aria Maulana

Redaktur :

M. Ihwan
Susanti
Jajang Nurjaman
Rayi Darmagara
Intan Lidwina
Tiara Kharisma
Isanto
Mudanto Pamungkas
Erieka Nurlidya Utami

Editor :

Rizal Bagus Rahman
Anwar Asyraf
Sitty Annisaa
Yuanita Utami
Yosa Wisnu W.
Rani Rizki Amalia

Desain Grafis :

Aswin Budiarto
Wahyu Setyo Budi
Hendri E. Zulkarnain

Fotografer :

Lukman Nul Hakim
Muhamad Dullah

Sekretariat :

Krestiana Evelyn
Bobby Adia Dwiputra Nugraha
Enik Priati

 www.anri.go.id

Majalah ARSIP menerima artikel dan berita tentang kegiatan kearsipan dan cerita-cerita menarik yang merupakan pengalaman pribadi atau orang lain. Jumlah halaman paling banyak tiga halaman atau tidak lebih dari 500 kata. Redaksi berhak menyunting tulisan tersebut, tanpa mengurangi maksud isinya. Artikel sebaiknya dikirim dalam bentuk *hard* dan *soft copy* ke alamat Redaksi: Kelompok Substansi Hubungan Masyarakat, Arsip Nasional Republik Indonesia, Jalan Ampera Raya No. 7 Cilandak, Jakarta 12560, Telp.: 021-780 5851 Ext. 404, 261, 111, Fax.: 021-781 0280, website: www.anri.go.id, email: humas@anri.go.id

Peringatan Hari Kearsipan ke-53 tahun 2024 mengusung tema Kearsipan yang Berkelanjutan untuk Masa Depan Terbaik. Kearsipan yang berkelanjutan (*sustainable archiving*) yang menjadi isu utama dalam peringatan Hari Kearsipan ke-53 mencerminkan komitmen bahwa memastikan bahwa arsip bernilai guna sejarah dilestarikan dengan baik untuk generasi-generasi mendatang. Melalui upaya pemeliharaan yang berkelanjutan, entitas kearsipan dapat menjaga kontinuitas warisan sejarah daerah dan bangsa, sehingga dapat diakses dan dimanfaatkan seluas-luasnya oleh publik.

Keberlanjutan kearsipan yang mencakup 3 (tiga) pilar program prioritas yakni tertib arsip, transformasi digital, dan memori kolektif bangsa serta sikap adaptif untuk mendukung gerakan ramah lingkungan dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi di bidang kearsipan.

Pada tema kali ini majalah ARSIP mengangkat tema Kearsipan yang Berkelanjutan untuk Masa Depan Terbaik. Kami sajikan pula Rubrik Khazanah, Rubrik Daerah, Rubrik Preservasi, Rubrik Profil, Rubrik Mancanegara, Rubrik Hukum, Rubrik Cerita Kita dan Rubrik Liputan mengenai berita-berita kearsipan menjadi pelengkap pada edisi kali ini.

Akhirnya, semoga sajian informasi edisi kali ini, dapat memberikan manfaat bagi Sahabat Arsip. Sekiranya terdapat berbagai kekurangan, kami sangat berharap memperoleh saran dan kritik untuk perbaikan edisi selanjutnya.

Salam Redaksi





KEARSIPAN BERKELANJUTAN UNTUK MASA DEPAN TERBAIK

Peringatan Hari Kearsipan ke-53 tahun 2024 mengusung tema Kearsipan yang Berkelanjutan untuk Masa Depan Terbaik. Kearsipan yang berkelanjutan (sustainable archiving) yang menjadi isu utama dalam peringatan Hari Kearsipan ke-53 mencerminkan komitmen bahwa memastikan bahwa arsip bernilai guna sejarah dilestarikan dengan baik untuk generasi-generasi mendatang. Melalui upaya pemeliharaan yang berkelanjutan, entitas kearsipan dapat menjaga kontinuitas warisan sejarah daerah dan bangsa, sehingga dapat diakses dan dimanfaatkan seluas-luasnya oleh publik. Tak hanya itu, khazanah arsip tersebut harus disajikan secara menarik, sehingga memunculkan kecintaan dan kebanggaan generasi muda terhadap budaya bangsa dan negara.

Keberlanjutan kearsipan yang mencakup 3 (tiga) pilar program prioritas yakni tertib arsip, transformasi digital, dan memori kolektif bangsa serta sikap adaptif untuk mendukung gerakan ramah lingkungan dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi di bidang kearsipan, juga menjadi isu utama dalam momentum Hari Kearsipan ke-53. Hal tersebut tak lain untuk mewujudkan inovasi dan implementasi teknologi di bidang kearsipan sebagaimana amanat

Presiden Joko Widodo pada peringatan Tahun Emas Kearsipan serta mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi tematik yang fokus pada 4 (empat) hal yakni penanggulangan kemiskinan, kemudahan investasi, digitalisasi administrasi, dan prioritas aktual Presiden.

Pada Hari Kearsipan ke-53 tahun 2024 Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan arahan kepada komunitas kearsipan agar terus merawat warisan leluhur bangsa, dengan mengelola arsip bangsa ini dengan baik. "Selamat Hari Kearsipan ke-53 seluruh keluarga besar Arsip Nasional Republik Indonesia yang telah bekerja keras dan berkontribusi dalam menjaga memori kolektif bangsa," ucap Jokowi. Presiden Jokowi senang terhadap ANRI yang dapat melakukan pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan arsip yang lebih efisien, salah satunya melalui Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI).

Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas mendorong seluruh insan kearsipan untuk terus meningkatkan kompetensi dan kinerja penyelenggaraan kearsipan. "Pada kesempatan yang baik ini, saya haturkan selamat atas kinerja

terbaik instansi pemerintah dalam penyelenggaraan kearsipan. Saya berharap agar seluruh pimpinan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, para arsiparis dan seluruh insan kearsipan senantiasa meningkatkan kompetensi dan kinerja penyelenggaraan kearsipan," ungkap Azwar Anas saat memberikan arahan.

Lebih lanjut, Azwar Anas juga mengingatkan kembali bahwa arsip merupakan komponen penting dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah. "Saya mengucapkan selamat Hari Kearsipan ke-53. Peringatan Hari Kearsipan merupakan momentum good governance dan penguatan transformasi digital melalui penyelenggaraan kearsipan nasional. sebagai memori kolektif berbangsa dan bernegara, arsip kiranya komponen penting dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah," ungkapnya.

Pelaksana tugas Kepala ANRI, Imam Gunarto menyampaikan bahwa hakikat pada peringatan Hari Kearsipan merupakan peneguhan komitmen, evaluasi, introspeksi dan refleksi untuk masa depan yang lebih baik. Dengan mengangkat tema "Kearsipan yang Berkelanjutan untuk Masa Depan Terbaik", kearsipan harus dilaksanakan secara berkelanjutan

dan kearsipan harus dapat menjamin masa depan yang terbaik. Imam berharap, ANRI sebagai lembaga kearsipan dapat mengukuhkan peran vital untuk masyarakat, bangsa, dan negara, serta peran internasional.

Imam menambahkan bahwa kekacauan yang sering dialami oleh suatu bangsa disebabkan karena kurangnya kesadaran sejarah, karena kurang kuatnya memori kolektif bangsa, sehingga bangsa ini seperti kehilangan memori, lupa ingatan, tidak tahu dari mana harus berangkat menata masa depannya. "Memori kita juga sering terputus dari satu masa ke masa yang lain. Sumber-sumber masa lalu baik berupa arsip, naskah, artifak, tradisi lisan dan lain-lain belum cukup untuk merangkai mosaik sejarah masa lalu secara lengkap, belum cukup untuk membangun memori kolektif bangsa yang utuh," tambahnya.

Menurutnya, komunitas kearsipan harus mampu menjaga keberlanjutan dalam menjalankan roda pemerintahan. "Tugas kita di bidang kearsipanlah yang harus menjadi ujung tombak menjaga kontinuitas jalannya pemerintahan maupun kenegaraan kemanapun ibu kota pindah, tugas kitalah yang harus menjaga kesinambungan ilmu pengetahuan maupun transformasi informasi masa lalu ke masa depan sekalipun pemilu dan pilkada serentak berjalan penuh gonjangan, tugas kitalah yang menjaga dan memajukan kebudayaan melalui kearsipan yang berkesinambungan untuk masa depan terbaik," terang Imam.

Imam juga melaporkan capaian Kinerja kearsipan nasional sampai dengan April 2024 yang tergambar dalam tiga kelompok program kearsipan, yaitu Tertib Arsip, Transformasi Digital dan Memori Kolektif Bangsa. Imam memaparkan capaian kinerja ANRI tahun 2023 yang terbagi ke dalam beberapa indeks capaian. Pertama, Capaian



Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo

"Selamat Hari Kearsipan ke-53 seluruh keluarga besar Arsip Nasional Republik Indonesia yang telah bekerja keras dan berkontribusi dalam menjaga memori kolektif bangsa"

Indeks Kepatuhan terhadap Kebijakan Kearsipan Tahun 2023 yang mencapai 72,98 dari target 68 atau tercapai melampaui target hingga 107 persen. Kedua, Capaian Indeks Ketersediaan Arsip Tahun 2023 mencapai 84,45 dari target 75 atau tercapai sebesar 113 persen. Berikutnya, capaian Indeks Pelayanan Informasi Kearsipan Tahun 2023 juga meraih capaian gemilang dengan angka 84,47 dari target 70 atau mencapai 121 persen. Dan capaian Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2023 mencapai 79,08 dari target 80,05 atau 99 persen. Sementara itu, rata-

rata Indeks capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ANRI tahun 2023 adalah 80,24.

Imam juga menyampaikan hasil pengawasan kearsipan di kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota. "Hasil pengawasan kearsipan pada 86 Kementerian/Lembaga dengan kinerja baik mencapai 94,19 persen. Sementara di Pemerintah Provinsi mencapai 82,35 persen. Yang agak rendah ini di kabupaten/kota. Dari 508 daerah hanya 180 kabupaten/kota yang kinerja kearsipannya baik atau sebesar 35,43 persen," terang Imam.

Tahun 2023, ANRI memiliki program prioritas dalam rangka pendampingan penataan dan digitalisasi arsip pada 63 kementerian lembaga yang akan pindah ke Ibukota Negara Nusantara (IKN). Penataan tersebut diharapkan menjadi percepatan untuk menciptakan pengelolaan arsip yang tertib dan dikelola secara elektronik, sehingga apabila lembaga tersebut pindah ke IKN maka arsip tersebut dapat terus diakses dengan mudah secara digital tanpa dengan membawa fisik arsip. Pada pertengahan laporannya, Imam Gunarto menyampaikan pula bahwa

percepatan pelaksanaan digitalisasi kearsipan meliputi tiga strategi pokok. Pertama, implementasi SRIKANDI yang sampai tahun 2024 mencapai 685 lembaga dan daerah atau 97,30%. Sementara itu, tingkat digitalisasi arsip berdasarkan hasil audit pengelolaan arsip elektronik tahun 2023, pada Kementerian Lembaga mencapai 97%, pada provinsi mencapai 79% dan untuk Kabupaten/Kota masih 33%. Sehingga, pencapaian kinerja digitalisasi arsip dirasa masih sangat kurang terutama untuk Kabupaten/Kota.

Dampak nilai ekonomi dengan adanya implementasi SRIKANDI hingga saat ini sudah mencapai lebih dari 3 triliun dan dampak ekonomi tersebut dihitung dari biaya penciptaan, biaya penggunaan kertas dan tinta, biaya pengiriman, biaya penyimpanan, biaya pencarian, biaya penemuan dan layanan arsip secara digital. Selain dampak ekonomi, implementasi SRIKANDI juga berdampak atas akuntabilitas dan layanan publik serta dampak lingkungan.

Selanjutnya Imam juga mengungkapkan tantangan dalam penyelamatan arsip dan pelestarian arsip. "Penyelamatan pelestarian arsip di daerah mengalami tantangan yang paling berat karena keterbatasan anggaran kearsipan yang tidak juga bergerak naik dari angka tahun sebelumnya, bahkan di beberapa daerah cenderung mengalami penurunan," jelasnya. Ia menyebutkan pula bahwa sampai dengan Mei 2024, kekayaan arsip dan naskah Indonesia yang telah diakui oleh dunia sebanyak 11 koleksi untuk Memory of the World dan 5 koleksi untuk Memory of the World Asia Pasifik.

Pihaknya terus berkomitmen untuk menegakkan gerakan tertib arsip secara nasional. Pada tahun 2024 dalam kondisi sosial politik yang dinamis, Imam berpesan agar seluruh pejuang kearsipan seluruh Indonesia



Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Brikrasi, Abdullah Azwar Anas

dapat mengabadikan momen pesta demokrasi lima tahunan. "Pastikan memori arsip pada Pemilu, Pilpres, dan Pilkada nanti dapat diabadikan. Sehingga dapat menjadi khasanah ilmu dan pembelajaran bagi generasi kita di masa depan," ungkap Imam.

Kearsipan yang Berkelanjutan juga tidak lepas dari peristiwa penting yang terjadi di republik ini, yakni adanya pemindahan Ibu Kota Negara dan momentum Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) Tahun 2024. Disamping itu, Mulai tahun 2024, koordinasi perencanaan dan program di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) berpindah mitra yakni dengan Kedepuitan Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan (PMMK) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Adapun sebelumnya koordinasi kemitraan ini dilaksanakan dengan Kedepuitan Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan. Hal ini tentunya berdampak pada penyusunan RPJNM 2025-2029. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan, Amich Alhumami menyampaikan bahwa sebenarnya ANRI memang lebih tepat bermitra bersama dengan Deputi PMMK, karena tugas ANRI menjadi pilar penting dalam perawatan dan



Plt. Kepala ANRI, Imam Gunarto

penjagaan dokumen sejarah bangsa yang mencerminkan identitas dan jati diri bangsa Indonesia. "Pas rasanya ANRI sekarang bersama PMMK, kebetulan kita akan menyusun RPJMN 2025-2029, bidang kearsipan ini dapat diusulkan pemutakhiran Rancangan Teknokratik RPJMN, yakni Transformasi Kearsipan untuk Mengembangkan Memori Kolektif Bangsa," terang Amich.

Amich Alhumami menyampaikan bahwa di antara satu bidang yang juga menjadi pilar pembangunan 3 di antara satu bidang yang menjadi pilar pembangunan nasional adalah kebudayaan. "kami ingin bercerita sedikit kalau kita membayangkan pembangunan itu selalu asosiasinya itu adalah jalan tol, rel kereta api, pelabuhan bandara dan pasar-pasar yang itu kegiatan-kegiatan ekonomi produktif dijalankan oleh masyarakat orang agak kurang memberi perhatian bahwa sedemikian penting pelabuhan, rel kereta api, bandara maka sepenting itu pulalah pembangunan kebudayaan dan sepenting itu pula kita menempatkan arsip sebagai bagian dari kemajuan pembangunan kebudayaan," jelas Amich Alhumami. Kemudian Amich Alhumami mengungkapkan bahwa dalam



Penasihat Ahli Bidang Memori Kolektif Bangsa, Prof. Susanto Zuhdi, Penasihat Ahli Bidang Transformasi Digital Kearsipan, Prof. Yudho Giri Sucahyo, Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Bappenas, Amich Alhumami, Penasihat Ahli Bidang Tertib Arsip, Nugroho Ananto Wijoyo dengan moderator Valerina Daniel pada acara Talkshow Kearsipan, 29 Mei 2024 di Samarinda, Kalimantan Timur.

dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan juga RPJM Nasional itu menempatkan dimensi yang sangat strategis pembangunan kebudayaan itu setara sebangun dengan pembangunan ekonomi pembangunan infrastruktur sehingga dapat dipadupadankan dan pembangunan kebudayaan itu juga paralel dengan pembangunan manusia karena kebudayaan itu adalah hasil karya cipta puncak dari daya cipta manusia itu akal budi dan itu bagian dari kunci dan pembangunan manusia.

Senada yang telah disampaikan Amich Alhumami, Penasihat ANRI Bidang Tertib Arsip, Nugroho Ananto berpendapat bahwa bertransformasinya ANRI merupakan sebuah momentum dan kesempatan untuk memperkuat tugas dan fungsi ANRI dalam penyelenggaraan kearsipan nasional. "Opportunity di sini sebetulnya, ayo sekarang kita punya tantangan apakah kita ini menjadikan arsip ini hanya sebatas data informasi atau kita bisa bangun arsip ini sebagai satu kearifan (wisdom), jadi teknologi life and for Unity itu adalah menurut saya momentum yang luar biasa saat ini yang harus dilakukan oleh

ANRI," ungkapnya. Nugroho Ananto mengutarakan bahwa semua lembaga kearsipan dan semua arsiparis memiliki kesempatan yang luar biasa dalam membangun kebudayaan. "Menurut saya manfaatkanlah momentum yang luar biasa ini," ungkapnya.

Sementara itu, Penasihat Ahli Transformasi Digital Kearsipan ANRI, Yudho Giri Sucahyo memiliki pandangannya dalam melihat tantangan arsip yang keberlanjutan dalam konteks transformasi digital kearsipan. Menurutnya ada dua hal perubahan yang dapat dicermati, satu otomasi dan yang kedua inovasi. Perkembangan Srikandi itu adalah otomasi berbasis teknologi informasi membuat pekerjaan sebagai arsiparis menjadi lebih ringan atau dengan kata lain lebih menjadi tertata teknologi. "Pertanyaannya adalah Apakah ini menjadi momen matinya profesi arsiparis tetapi Apakah hanya profesi arsiparis? enggak yang tadinya melayani kita di jalan tol hilang tergantikan oleh kartu e-money dan sebagainya, yang tadinya membantu kita terkait dengan layanan dan sebagainya, tergantikan oleh komputer dan sebagainya. Jadi inovasi-inovasi ini akhirnya mentransformasi cara

kerja kita sebagai arsiparis dan akhirnya melahirkan cara baru," terangnya.

Penasihat Ahli Bidang Memori Kolektif Bangsa, Prof. Susanto Zuhdi memaknai Sustainable for the Best Future itu artinya masa depan yang terbaik memiliki tesis bahwa kearsipan yang berkelanjutan itu adalah Indonesia yang berlanjut, artinya Indonesia akan berhenti ketika aktivitas sejarah akan berhenti dan kearsipan tidak ada lagi kerjanya. "Tentu ini ungkapan retorik saya saja, tapi bahwa kearsipan itulah yang harus mengawal Indonesia, saya kira, saya yakin jadi optimis untuk mengadakan bahwa arsip itu penting. Mengapa ? karena konon ini bangsa yang amnesia sejarah gitu kita sering lupa gitu, jadilah yang mengingatkan kita," imbuhnya. Prof. Susanto Zuhdi menambahkan bahwa memori itu salah satu pemantiknya berasal dari kajian arsip. "Jadi, arsip itulah yang kemudian menjadi penting. Ketika perjalanan bangsa ini dicatat kemudian dijadikan pedoman untuk masa depan. Jadi, sejarah kalau begitu, bukan tentang masa lampau saja masalahnya, bagaimana kita menafsirkan sejarah untuk masa depan," imbuhnya. Menurutnya dalam mengkaji arsip perlu mengetahui konten, konteks dan makna. Melalui pemahaman konten, konteks dan makna diharapkan arsip dapat menerangkan dan menjelaskan arti pentingnya arsip untuk memori kolektif bangsa.

Pada akhirnya, butuh sinergi antar pemangku kepentingan dalam mewujudkan kearsipan yang berkelanjutan. Melalui kearsipan yang berkelanjutan diharapkan mampu menjaga peradaban bangsa sebagai upaya mentransmisi informasi untuk generasi mendatang serta menjaga memori kolektif bangsa. Kearsipan yang berkelanjutan untuk masa depan terbaik.



Tiara Kharisma

KEARSIPAN BERKELANJUTAN, REKAM DAN LESTARIKAN MEMORI PEMBANGUNAN INDONESIA

Arsip bukan hanya sekadar tumpukan dokumen, melainkan menjadi saksi bisu yang merekam jejak pembangunan bangsa Indonesia dari masa ke masa. Arsip merupakan fondasi penting yang memungkinkan kita untuk memahami sejarah dan peradaban, sumber informasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, serta mengevaluasi kebijakan untuk merancang masa depan yang lebih baik. Dalam perjalanan panjang membangun Indonesia, mulai dari masa pemerintahan Presiden Sukarno hingga era Presiden Joko Widodo, rekam jejak bukti pembangunan Indonesia sudah selayaknya tergambarkan dalam arsip negara.

Pembangunan di Indonesia adalah sebuah perjalanan panjang yang telah dimulai sejak masa awal kemerdekaan dan terus berlanjut hingga hari ini. Pembangunan di republik ini melibatkan proses yang berkesinambungan yang tidak terlepas pada visi dan misi para pemimpin bangsa dari waktu ke waktu. Setiap periode ini telah memberikan kontribusi signifikan dalam membentuk wajah Indonesia yang kita kenal saat ini.

Pada masa Presiden Sukarno, misalnya, pembangunan Indonesia difokuskan pada pencapaian kemerdekaan dan pembentukan identitas nasional. Ini juga berkaitan dengan visi besar Presiden Sukarno

dalam mewujudkan kedaulatan bangsa dan membangun fondasi identitas nasional. Berbagai kebijakan yang diambil pada masa itu sudah seharusnya terekam dalam arsip negara yang kini menjadi referensi berharga dalam memahami semangat kebangsaan dan cita-cita kemerdekaan.

Beranjak ke era Presiden Soeharto, pembangunan berfokus pada stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi melalui berbagai program seperti Pembangunan Lima Tahun (Pelita). Pada masa ini pembangunan juga ditekankan pada upaya stabilisasi dan pertumbuhan ekonomi. Bukti pembangunan pada era Presiden

Soeharto juga terekam dalam arsip yang turut dapat memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana Indonesia berusaha untuk mencapai swasembada pangan dan membangun infrastruktur dasar. Data dan dokumen yang tersimpan dalam arsip memungkinkan kita untuk belajar proses dan pelaksanaan kebijakan pada masa itu dan tentu mengambil pelajaran berharga atas apa yang terjadi pada era Presiden Soeharto.

Pada era reformasi dan pemerintahan-pemerintahan berikutnya, termasuk masa Presiden Joko Widodo, fokus pembangunan mulai bergeser pada aspek demokratisasi, pemerataan pembangunan, digitalisasi pemerintahan, transparansi, dan penguatan daya saing nasional di era globalisasi. Di sini, arsip kembali berperan penting dalam menunjukkan akuntabilitas kinerja, referensi dalam pengambilan kebijakan, dan menjadi bukti ingatan capaian-capaian pembangunan baik dalam bentuk program-program unggulan seperti

pembangunan infrastruktur, inovasi, modernisasi, digitalisasi, dan inovasi yang berkelanjutan.

Namun, pembangunan bukan hanya tentang perubahan fisik dan kebijakan. Setiap langkah dan keputusan yang diambil dalam proses pembangunan tersebut juga diiringi dengan pencatatan dan dokumentasi yang terperinci, yang terekam dalam berbagai format arsip. Arsip ini mencakup dokumen tertulis, foto, video, dan data digital, yang semuanya menjadi saksi bisu dari proses panjang yang telah dilalui oleh bangsa ini.

Arsip negara ini tidak hanya sekedar menyimpan memori pembangunan, tetapi juga menjadi sumber informasi yang sangat berharga. Keberadaan arsip dapat memberikan gambaran utuh tentang bagaimana kebijakan dirumuskan dan dilaksanakan, tantangan yang dihadapi, serta evaluasi dan solusi yang diterapkan dari masa ke masa. Dengan demikian, arsip tidak hanya berperan sebagai penjaga memori, tetapi juga sebagai referensi penting dalam merumuskan kebijakan pembangunan masa depan, memastikan bahwa setiap langkah yang diambil berakar pada pengalaman dan pembelajaran dari masa lalu.

Arsip, Pijakan dalam Melahirkan Kebijakan

Keberadaan arsip tidak hanya penting untuk menjaga memori kolektif bangsa, tetapi juga sebagai pijakan dalam pengambilan kebijakan di masa depan. Dengan adanya rekaman kebijakan yang terdokumentasi dengan baik, para pengambil kebijakan dapat belajar dari masa lalu, menghindari kesalahan yang sama, dan mengadaptasi serta mengembangkan kebijakan yang terbukti berhasil.

Arsip juga memungkinkan adanya kesinambungan dalam pembangunan, sehingga setiap kebijakan baru dapat dikaitkan dengan kebijakan sebelumnya, memastikan tidak ada yang terputus dalam perjalanan pembangunan nasional.

Sebagai contoh, dalam pembangunan infrastruktur, data dari arsip terkait proyek-proyek masa lalu dapat memberikan wawasan tentang tantangan dan solusi yang telah dicoba, sehingga proyek di masa kini dan masa depan dapat berjalan lebih efisien dan efektif. Begitu pula dalam bidang lainnya, seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, arsip menyediakan data empiris yang sangat berharga untuk perumusan kebijakan yang berbasis bukti.

Tertib Arsip, Dokumentasikan Bukti

Pada penjelasan di atas, sudah terlihat betapa arsip yang terlahir beriringan dengan pelaksanaan pembangunan di Indonesia bukan hanya dokumen semata yang hanya menjadi bukti pertanggungjawaban administratif. Tetapi lebih dari itu, perannya turut berkelanjutan karena menjadi bagian yang dapat diwariskan kepada anak cucu dan generasi penerus bangsa. Namun, peran arsip dalam pembangunan tidak akan maksimal tanpa upaya serius dalam menjaga dan mengelola arsip, sejak arsip tersebut diciptakan.

Meski arsip mengenai pembangunan Indonesia banyak tercipta pada instansi pemerintah. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa pencipta arsip selain instansi pemerintah pun turut mengelola arsip yang memiliki relasi dengan pembangunan Indonesia. Setiap kebijakan, program, dan inisiatif yang diambil selama perjalanan

panjang pembangunan bangsa terekam dalam arsip yang tersebar di berbagai instansi pemerintah, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan bahkan komunitas. Oleh karenanya, untuk memastikan bahwa bukti-bukti pembangunan ini terekam dengan baik dan dapat diwariskan kepada generasi mendatang, peran seluruh elemen bangsa sangat diperlukan untuk melaksanakan tertib arsip.

Komitmen pengelolaan dan tertib arsip yang merekan jejak pembangunan Indonesia tidak hanya menjadi tanggung jawab kalangan pemerintahan. Untuk memastikan bahwa seluruh bukti pembangunan terekam dengan baik, kolaborasi antara pemerintah, organisasi masyarakat, organisasi politik, perguruan tinggi, komunitas, dan berbagai kalangan sangat diperlukan. Setiap elemen bangsa memiliki peran yang saling melengkapi dalam ekosistem penyelenggaraan kearsipan nasional. Kolaborasi ini dapat diwujudkan melalui berbagai inisiatif, seperti program dan kegiatan pembinaan kearsipan, penyelamatan arsip melalui program registrasi memori kolektif bangsa, serta kampanye kesadaran akan pentingnya arsip.

Dengan kerja sama yang baik, kita dapat memastikan bahwa seluruh arsip yang tercipta dari proses pembangunan bangsa terjaga dengan baik dan dapat diakses oleh generasi mendatang. Arsip yang dikelola dan dilestarikan dengan baik serta sesuai kaidah-kaidah kearsipan akan menjadi saksi bisu dari perjuangan dan kemajuan yang telah dicapai, serta menjadi fondasi yang kuat untuk merumuskan kebijakan-kebijakan masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan.

Kearsipan Berkelanjutan untuk Masa Depan Terbaik

Arsip menjadi pilar penting dalam menjaga memori pembangunan bangsa. Dari masa Presiden Sukarno hingga era Presiden Joko Widodo, arsip telah merekam jejak kebijakan yang menjadi fondasi pembangunan nasional dan sejarah peradaban bangsa Indonesia dari waktu ke waktu. Pada era digital saat ini, peran kearsipan semakin strategis dengan adanya transformasi digital kearsipan dan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Digitalisasi arsip tidak hanya mempermudah akses dan pelestarian informasi, tetapi juga meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengambilan kebijakan.

Dengan mengintegrasikan arsip ke dalam sistem pemerintahan yang berbasis elektronik, kita memastikan bahwa pengelolaan data dan informasi berjalan seiring dengan prinsip-prinsip transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas. SPBE juga memungkinkan pengambilan kebijakan yang lebih berbasis data, karena informasi yang diperlukan dapat diakses dengan cepat dan akurat.

Tak hanya itu, transformasi digital kearsipan membuka babak baru dalam pengelolaan arsip, di mana digitalisasi arsip memungkinkan penyimpanan, pelestarian, dan aksesibilitas data dan informasi yang jauh lebih efisien dan luas. Arsip yang didigitalisasi bukan hanya sekadar mengamankan dokumen fisik dari kerusakan atau kehilangan, tetapi juga menjamin bahwa informasi tetap dapat diakses dan digunakan dalam jangka panjang.

Arsip harus dikelola dengan baik, didigitalisasi, dan diakses secara luas

agar dimanfaatkan berbagai pihak, termasuk akademisi, pemerintah, dan masyarakat umum. Digitalisasi arsip yang saat ini sedang digalakkan menjadi salah satu bagian langkah maju yang memungkinkan arsip tidak hanya terjaga secara fisik, tetapi juga lebih mudah dan cepat diakses.

Dengan demikian, arsip yang terkelola secara digital dan berkelanjutan akan menjadi pijakan yang kokoh dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan. Kebijakan pada masa depan dapat dirumuskan dengan lebih matang, berbasis pada pelajaran dari masa lalu yang telah terdokumentasi dengan baik. Melalui inovasi dalam transformasi digital kearsipan dan implementasi SPBE, kita tidak hanya melestarikan memori pembangunan bangsa, tetapi juga memastikan bahwa memori tersebut dapat terus digunakan sebagai landasan dalam mewujudkan pembangunan yang lebih maju, inklusif, dan adaptif terhadap perubahan di masa depan. Melalui integrasi konsep sustainable archiving dalam praktik kearsipan pun, dapat menguatkan kembali bahwa kontribusi kearsipan dalam membantu digitalisasi pemerintahan dan menjaga warisan budaya serta memori kolektif akan memberikan dampak bagi masa depan yang terbaik.

Pemanfaatan teknologi informasi dalam bidang kearsipan menjadi upaya menjaga keberlanjutan pengelolaan arsip. Kearsipan berkelanjutan menuntut kita untuk tidak hanya mengamankan arsip secara fisik, tetapi juga mengintegrasikannya ke dalam sistem informasi. Namun, tantangan dalam kearsipan berkelanjutan sejatinya tidak hanya pada aspek teknologi, tetapi juga pada upaya

menjaga relevansi dan keberlanjutan informasi yang terekam dalam arsip. Di sinilah perlunya kebijakan dan strategi yang jelas dalam pengelolaan arsip digital, termasuk dalam hal metadata, format penyimpanan, dan mekanisme akses yang harus diperbaharui dan beradaptasi seiring perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi.

Isu kearsipan yang berkelanjutan (sustainable archiving) yang telah menjadi isu utama dalam peringatan Hari Kearsipan ke-53 sudah selayaknya selaras bahwa melalui upaya pengelolaan kearsipan yang berkelanjutan, entitas kearsipan dapat menjaga kontinuitas warisan sejarah daerah dan bangsa, sehingga dapat diakses dan dimanfaatkan seluas-luasnya oleh publik. Menjalankan kearsipan berkelanjutan, menunjukkan bahwa menjaga memori kolektif bangsa adalah bagian tak terpisahkan dari tanggung jawab bersama dalam membangun dan menjaga memori Pembangunan Indonesia. Ini menjadi bagian upaya untuk memastikan bahwa setiap pencapaian, setiap tantangan yang dihadapi, dan setiap solusi yang diterapkan dalam pembangunan Indonesia dari masa ke masa, tidak hanya tercatat, tetapi juga dilestarikan untuk menjadi pijakan bagi pembangunan yang berkelanjutan.



Dimas P. Yuda

JALAN SUNYI MEMBANGUN MEMORI: Refleksi Singkat Akuisisi Arsip Statis

Seremonial serah terima arsip statis dari pencipta arsip kepada lembaga kearsipan biasanya diselenggarakan secara meriah dan dihadiri oleh para pejabat serta banyak orang. Ternyata di balik seremonial itu ada proses penilaian arsip yang dilakukan untuk menentukan apakah suatu arsip memiliki nilai guna sekunder atau memiliki nilai guna berkelanjutan sehingga layak disimpan selamanya di lembaga kearsipan. Suatu kerja intelektual yang kerap kali luput dari perhatian dan kalah dari hiruk pikuk seremonial, tetapi sesungguhnya sangat penting dalam menyusun bangunan memori kolektif. Karena itu nampaknya tidak keliru jika kerja intelektual itu terasa berjalan di jalan sunyi membangun memori.

Penilaian arsip adalah bagian dari kegiatan akuisisi arsip statis, yaitu proses penambahan khazanah arsip statis pada lembaga kearsipan yang dilaksanakan melalui kegiatan penyerahan arsip statis dan hak pengelolaannya dari pencipta arsip kepada lembaga kearsipan. Tulisan ini mencoba merefleksikan secara singkat tiga tantangan pada saat melakukan penilaian arsip itu.

Tiga tantangan

Pertama, bagi arsiparis yang melakukan penilaian arsip maka akan menemukan begitu banyak regulasi sebagai pedoman. Penulis sendiri mencatat setidaknya ada lebih dari sepuluh peraturan mulai dari Undang-undang dan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Kearsipan, Peraturan Kepala (Perka) ANRI tentang Tata Cara Akuisisi Arsip Statis, Perka ANRI tentang Pedoman Penyusutan Arsip dan seterusnya. Teramat penting dari semua regulasi itu adalah Jadwal Retensi Arsip (JRA) milik pencipta

arsip itu sendiri.

Dengan menggunakan JRA maka arsiparis akan terbantu dalam menentukan apakah suatu arsip itu memiliki nilai guna sekunder atau tidak. Caranya dengan melihat nasib akhir arsip pada kolom keterangan. Apabila nasib akhirnya tertulis permanen maka arsip tersebut cenderung memiliki nilai guna sekunder. Sebaliknya, apabila nasib akhirnya musnah maka arsip tersebut "cenderung" dapat dimusnahkan.

Mengapa menggunakan kata "cenderung"? Karena di beberapa kasus ada arsip yang bernasib akhir musnah di JRA, tetapi karena dianggap memiliki nilai guna kesejarahan maka arsip tersebut bernasib akhir permanen. Misalnya, arsip rekam medis tokoh nasional atau pasien 01 pandemi. Karena dianggap akan memberikan informasi bernilai guna kesejarahan sehingga arsipnya disimpan di lembaga kearsipan.

Artinya, dalam penilaian arsip, JRA bukan satu-satunya alat yang digunakan dalam menentukan nasib akhir arsip. Objektivitas arsiparis dalam menilai suatu arsip juga menentukan terutama ketika dikaitkan dengan peristiwa sejarah. Untuk menghindari subjektivitas, penilaian sempit atau "selera pribadi" arsiparis dalam menilai arsip maka arsiparis perlu memperluas cakrawala pengetahuan yang dimilikinya. Caranya bisa dengan memahami tugas dan fungsi pencipta arsip, mempelajari peristiwa bersejarah atau diskusi dengan arsiparis lain.

Kedua, di banyak kasus ada arsip yang bernilai guna sekunder atau memiliki nilai guna berkelanjutan tetapi tidak memberkas. Misalnya, suatu produk hukum berupa Surat Keputusan Menteri terkadang hanya ada dalam bentuk arsip final-nya, sedangkan arsip naskah akademik, draf awal, dan lain-lain yang semestinya masuk di dalam berkas tersebut tidak diketahui keberadaannya. Umumnya pencipta arsip tidak mengetahui alasan mengapa hal itu terjadi.

Tentu saja arsip yang tidak memberkas akan menyebabkan informasinya tidak utuh. Dalam situasi seperti itu arsiparis dituntut untuk mengambil keputusan teknis apakah menyelamatkan arsip sebagaimana adanya atau membiarkannya

disimpan kembali oleh pencipta arsip. Pilihan pertama biasanya lebih dipilih dibandingkan yang kedua mengingat penyelamatan arsip menjadi prioritas dari kegiatan akuisisi arsip statis sekaligus menghindari risiko hilangnya arsip tersebut. Barangkali itulah alasan mengapa di lembaga kearsipan terkadang suatu arsip hanya ada secara parsial atau tidak memberkas.

Terkait dengan masalah tersebut maka dibutuhkan perhatian yang lebih serius dan tindakan yang lebih terencana dalam melaksanakan pembinaan kearsipan khususnya kepada unit pengolah yang menciptakan arsip. Unit kearsipan di lingkungan pencipta arsip perlu memastikan agar pengelolaan arsip dinamis di setiap tahapan baik itu penciptaan, penggunaan dan pemeliharaan, serta penyusutan arsip sesuai dengan kaidah pengelolaan arsip dinamis yang baik dan benar. Unit kearsipan sebagai pembina kearsipan di lingkungan pencipta arsip memiliki peran sentral dan tanggung jawab dalam pengelolaan arsip dinamis termasuk menjamin memberkasnya arsip yang memiliki nilai guna keberlanjutan sehingga arsip tersebut adalah arsip yang autentik, utuh dan terpercaya ketika diserahkan kepada lembaga kearsipan.

Ketiga, adalah tantangan yang terkait dengan pengelolaan arsip elektronik. Sebenarnya ada banyak sekali isu terkait pengelolaan arsip elektronik mulai dari penciptaan, pemanfaatan, keamanan, autentisitas dan lain sebagainya. Sesuai dengan tema dari tulisan ini maka penulis hanya akan menyinggung beberapa isu terkait dengan akuisisi atau penyelamatan arsip elektronik yang memiliki nilai keberlanjutan.

Sepengetahuan penulis, sampai saat ini belum ada sistem elektronik yang digunakan secara otomatis untuk menilai apakah suatu arsip elektronik perlu disimpan selamanya sebagai arsip yang memiliki nilai keberlanjutan atau apakah suatu arsip elektronik tersebut dapat dimusnahkan karena tidak memiliki nilai guna bagi pencipta arsip atau masyarakat secara luas. Karena itu, penilaian arsip secara manual oleh arsiparis tetap dibutuhkan.

Berbeda dengan arsip konvensional yang fisik arsipnya terbiasa ditemui oleh arsiparis, untuk arsip elektronik seorang arsiparis harus mampu atau setidaknya tau mengenai sistem dan metadata arsip elektronik tersebut.

Terkait dengan pengenalan terhadap sistem dan metadata arsip elektronik maka pengelolaan arsip elektronik berarti juga termasuk menjamin identitas dan integritas arsip elektronik yang akan disimpan selamanya di lembaga kearsipan karena memiliki nilai keberlanjutan sebagai memori kolektif bangsa. Identitas di sini berarti keseluruhan karakteristik suatu dokumen yang unik mengidentifikasinya serta membedakannya dengan dokumen atau arsip lainnya, sedangkan integritas adalah menjamin bahwa arsip elektronik memiliki kualitas yang lengkap dan tidak berubah dalam setiap komponen pentingnya (Peraturan Kepala ANRI No 20 Tahun 2011).

Masalahnya adalah bagaimana menyerahkan arsip elektronik kepada lembaga kearsipan tetapi sekaligus menjamin bahwa identitas dan integritas arsip elektroniknya tetap terjaga. Sekali lagi, sepertinya belum ada sistem elektronik yang digunakan untuk membantu hal tersebut. Akibatnya, penyerahan arsip elektronik dilakukan dengan menyerahkan arsip tersebut dalam media simpan flashdisk, harddisk atau compact disc (CD).

Dengan demikian diperlukan pengelolaan arsip elektronik di pencipta arsip yang memenuhi kaidah-kaidah yang sesuai dengan pedoman pengelolaan arsip elektronik yang berlaku. Di sisi pencipta arsip maka unit kearsipan di lingkungan pencipta arsip perlu melaksanakan kegiatan pembinaan pengelolaan arsip elektronik kepada unit pengolah agar arsip elektronik terjamin identitas dan integritasnya mulai dari saat penciptaan sampai dengan penyerahan arsip elektronik yang memiliki nilai keberlanjutan kepada lembaga kearsipan.

Di sisi lembaga kearsipan, saat ini sudah ada Peraturan ANRI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan

Arsip Elektronik yang di dalamnya mengatur mengenai akuisisi arsip elektronik. Namun, menurut penulis aturan tersebut barangkali belum cukup memberikan pengetahuan secara teknis. Keberadaan SNI 27037:2014 tentang Pedoman identifikasi, pengumpulan, akuisisi dan preservasi bukti digital barangkali dapat membantu secara lebih teknis dan sedikit banyaknya mungkin juga dapat diadopsi.

Dalam konteks penyelamatan arsip elektronik yang menjadi bukti digital, untuk menjamin integritas suatu arsip elektronik diperlukan tiga prinsip, antara lain: verifikasi hash, dokumentasi dan write blocker. Verifikasi hash adalah proses yang dilakukan untuk memastikan integritas data dengan memverifikasi bahwa data tidak dirusak atau diubah. Hash itu singkatnya adalah kode alfanumerik yang digunakan untuk mewakili kata, pesan atau data. Dokumentasi berarti mendokumentasikan setiap langkah penyelamatan arsip elektronik. Write blocker adalah perangkat yang digunakan untuk mendapatkan akses read-only untuk menghindari kerusakan data yang ada di dalam arsip elektronik tersebut.

Penutup

Ketiga tantangan di atas hanya sedikit dari banyak tantangan yang muncul ketika melakukan penilaian arsip. Sebagaimana judulnya, tulisan ini hanya refleksi singkat dan tidak bermaksud menunjukkan banyak tantangan lainnya itu. Ketiga tantangan di atas menuntut peningkatan kapasitas pengetahuan arsiparis dalam melakukan penilaian arsip baik itu arsip konvensional maupun elektronik.

Dengan demikian, meskipun terkesan berada di jalan sunyi, kenyataannya penilaian arsip sebagai bagian dari akuisisi arsip statis adalah hal fundamental dalam membangun memori kolektif dan sudah sepantasnya mendapatkan perhatian yang tidak kalah penting dari seremonial serah terima arsip statis.

MENGENAL ARSIP STATIS KORUPSI DI INDONESIA

dari Era *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC) hingga Era Republik

Oleh **Dharwis W.U. Yacob, S.S., M.Si**

Arsiparis Madya Selaku Ketua Tim Pusat Studi Arsip Pemberantasan Korupsi dan Diorama Sejarah Perjalanan Bangsa, Arsip Nasional Republik Indonesia

Indonesia telah memiliki berbagai pengalaman dalam menghadapi permasalahan korupsi. Dalam konteks sejarah perjalanan bangsa, korupsi sebagai pengalaman buruk bangsa Indonesia telah terjadi sejak masa *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC). Korupsi yang terjadi di tubuh VOC mengakibatkan perusahaan besar yang didukung penuh pemerintah Belanda itu tidak mampu mempertahankan eksistensinya dan akhirnya dinyatakan bangkrut. Pengalaman buruk sejarah

bangsa tersebut ternyata ditemui kembali pada masa kemerdekaan Republik Indonesia sehingga setelah 79 tahun Indonesia merdeka kasus tindak pidana korupsi terus berulang. Wilayah kerjanya kian meluas tidak hanya terjadi di lingkungan institusi pemerintah (eksekutif), tetapi juga di lingkungan institusi cabang-cabang kekuasaan negara lainnya (legislatif, yudikatif) pusat dan daerah, perusahaan negara/daerah (BUMN/BUMD), dan partai politik dengan melibatkan kalangan dunia usaha/pengusaha.

Korupsi sebagai kejahatan telah merusak moral anak bangsa bahkan bisa mematikan bagi keberlangsungan sebuah organisasi, perusahaan dan tak terkecuali sebuah negara. Arsip sebagai bukti autentik telah membuktikan bahwa akibat yang ditimbulkan dari tindakan korupsi telah berhasil meruntuhkan sebuah perusahaan yang berjaya ratusan tahun lamanya seperti VOC, dan akibat-akibat sosial lainnya yang membuat mental masyarakat merosot pada titik yang terendah. Peraturan untuk pencegahan dan hukuman telah dibuat sebagai upaya tindakan dalam rangka pemberantasan korupsi dan pencegahannya. Namun, hal tersebut selalu terbentur dengan berbagai macam niat jahat yang menjegalnya sejak masa VOC bahkan hingga saat ini. Korupsi sudah bukan lagi kejahatan biasa tapi telah menjadi kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*) karena akibat yang ditimbulkannya berdampak sistemik. Untuk menjadi perhatian dan juga pelajaran bagi setiap anak bangsa. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) ingin mengajak seluruh masyarakat untuk belajar dari masa lalu melalui arsip tentang



korupsi yang tersimpan di ANRI. Arsip tersebut antara lain arsip korupsi pada masa VOC dan Hindia Belanda yang telah berusia ratusan tahun sampai dengan arsip korupsi masa kemerdekaan salah satunya arsip KPK yang telah diserahkan ke ANRI serta pendirian Pusat Studi Arsip Pemberantasan Korupsi.

Arsip dalam konteks korupsi merupakan sumber informasi utama karena hasil yang diciptakan oleh arsip tidak disertai kepentingan pribadi meskipun subjektivitas dari penciptanya tetap ada. Arsip diciptakan dengan ketelitian yang baik karena kesalahan ataupun adanya pemalsuan akan merugikan kepentingan dari penciptanya di masa yang akan datang. Arsip pun juga biasanya tersusun secara lengkap dan terpelihara karena diciptakan oleh organisasi-organisasi penting seperti contohnya organisasi politik ataupun organisasi pemerintah. Tentunya organisasi pemerintah menangani banyak hal mencakup kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga membutuhkan pencatatan-pencatatan tertentu. Pencatatan-pencatatan tertentu tersebut merupakan salah satu dari fungsi arsip. Fungsi arsip ini tentunya dibuat untuk kepentingan praktis sendiri sehingga tentunya subjektivitas menjadi memiliki nilai yang kecil dan tanpa kepentingan pribadi. Arsip mempunyai banyak perbedaan dan kategorisasi. Perbedaan dan kategorisasi tersebut misalnya arsip dinamis, arsip aktif, arsip inaktif, arsip vital, dan arsip statis. Dalam tulisan ini tentunya terfokus dalam kategori arsip statis. Arsip statis merupakan arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip yang memiliki nilai guna kesejarahan yang telah habis masa retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh ANRI atau lembaga kearsipan. Arsip statis

merupakan arsip bernilai guna sekunder atau arsip yang memiliki nilai guna permanen yang dikelola oleh lembaga kearsipan sebagai hasil akuisisi secara sistematis dan selektif terhadap khazanah arsip yang tercipta dalam pelaksanaan kegiatan instansi penciptanya.

Seperti yang diketahui, korupsi berasal dari kata "*corruptio*" yang berasal dari Bahasa Latin yang berarti kerusakan atau kebobrokan, dan dipakai pula untuk menunjuk suatu keadaan atau perbuatan yang busuk. A.S. Hornby dan kawan-kawan mengartikan istilah korupsi sebagai suatu pemberian atau penawaran dan penerimaan hadiah berupa suap serta kebusukan atau keburukan. Sedangkan David Chalmer menguraikan pengertian korupsi dalam berbagai bidang, antara lain menyangkut masalah penyuaipan yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan menyangkut kepentingan umum.

Sebagaimana yang dijelaskan sekilas di dalam paragraf pertama, VOC adalah maskapai dagang Belanda yang dibentuk sebagai penyatuan dari berbagai perusahaan yang mewakili kota-kota dagang di Belanda. Maskapai dagang ini didirikan pada tahun 1602 dengan daerah kegiatan meliputi seluruh Asia dan sebagian Afrika. Berbeda dengan para pedagang lain di abad 17-18, VOC berdagang dengan dilengkapi hak *oktroi* yang memungkinkannya untuk mencetak uang, merekrut tentara, membangun benteng pertahanan, mengadakan kontrak perjanjian dan bahkan melakukan peperangan. Berbagai keistimewaan VOC itu menyebabkan maskapai dagang ini dikatakan sebagai perusahaan yang memiliki kewenangan "bagaikan negara". Adanya keistimewaan VOC itulah yang menimbulkan bias seolah-olah VOC sama dengan

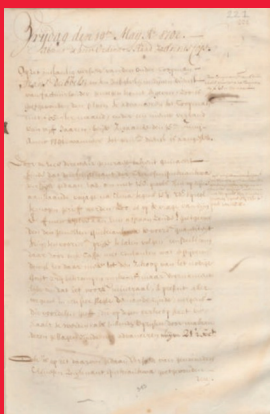
negara Belanda. Pada hakekatnya VOC merupakan perusahaan, bukan negara, yang tujuan utamanya adalah mencari keuntungan dari kegiatan perdagangan.

VOC mampu bertahan lama tentunya dikarenakan memiliki hak oktroi yaitu hak berperang dan melakukan penjajahan, hak mengangkat pegawai, hak monopoli dagang di wilayah-wilayah antara Amerika Selatan dan Afrika, hak memiliki angkatan perang dan membangun benteng pertahanan, hak melakukan pengadilan serta hak mencetak dan mengedarkan uang sendiri. Sebagai sebuah perusahaan, faktor keuntungan dan kerugian menjadi pertimbangan utama bagi perusahaan Belanda tersebut dalam mengambil keputusan. Selama maskapai dagang ini dapat menikmati keuntungan melalui perdagangan bebas, maka terjadinya perang secara terbuka sebisa mungkin akan dihindarkan. Sebagai sebuah perusahaan yang modern menurut ukuran zamannya, VOC mengembangkan birokrasi yang tertata secara hirarkis dan di Asia berpusat di Batavia. Markas besar VOC ini menjadi pusat kegiatan perdagangan maritim, birokrasi, dan militer. Batavia membawahi seluruh kantor dagang VOC yang tersebar dari sejak Tanjung Harapan di Afrika Selatan sampai ke Deshima di Jepang. Di Batavia terdapat berbagai lembaga penting yang berada di bawah kewenangan VOC seperti *Hoge Regering* (Pemerintahan Tertinggi), *Raad van Indie* (Dewan Hindia), Gubernur Jenderal dan aparatnya, dan *Raad van Justitie* (Dewan Peradilan).

VOC didirikan dengan menghimpun dana dari 17 orang pengusaha besar di Negeri Belanda yang pada perkembangannya kemudian berhasil menjadi perusahaan dagang multinasional

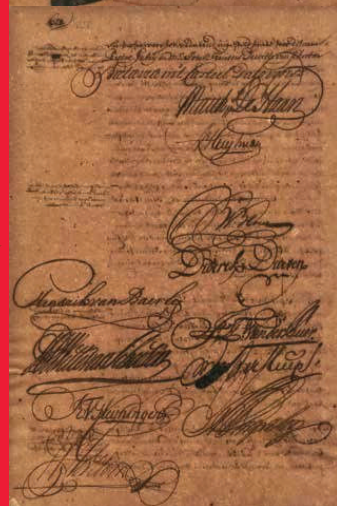
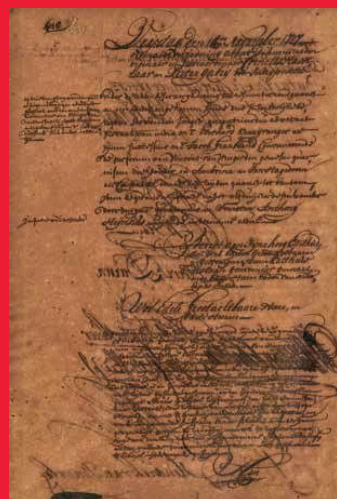
dengan memperdagangkan komoditas utama yang laris di pasaran Eropa. Perusahaan ini pada akhirnya harus runtuh setelah berjaya 200 tahun lamanya. Ketika dinyatakan bangkrut pada 31 Desember 1799. Korupsi pegawainya menjadi alasan perusahaan ini menjadi bangkrut diakibatkan penyelewengan yang dilakukan pegawainya dengan cara melakukan penyelundupan dan penyelewengan jumlah barang dagangan perusahaan yang dikuasai dan dijual sendiri demi keuntungan. Salah satu lembaga dengan kewenangan tertinggi di dalam struktur birokrasi VOC di Asia adalah *Hoge Regering*. Lembaga ini merupakan gabungan dari Gubernur Jendral dan *Raad van Indie*. Sebagai sebuah lembaga, gubernur jendral menjalankan kewenangan memerintah birokrasi VOC secara langsung, sedangkan *Raad van Indie* adalah lembaga perwakilan yang terdiri dari para pejabat tinggi VOC di Asia. Semua hal yang berkaitan dengan pelaksanaan birokrasi VOC sehari-hari dapat diputuskan oleh Gubernur Jendral. Tetapi jika ada masalah yang penting berkenaan dengan VOC sebagai lembaga dan hubungannya dengan kekuatan lokal di Asia maka keputusan akan diambil oleh *Hoge Regering*. Masalah-masalah yang diputuskan oleh *Hoge Regering* antara lain yang berkenaan dengan pendirian kantor dagang,

hubungan diplomasi, kontrak dagang, membangun benteng, mengadakan perang, kegiatan penanaman komoditi, dan masalah-masalah yang berkaitan dengan perdagangan. Kewenangan *Hoge Regering* adalah representasi dari kewenangan dari *Heeren Seventien* atau 17 direktur VOC yang berkantor di Amsterdam. Karena jarak yang sangat jauh antara Asia dan Eropa, maka VOC memutuskan bahwa setiap masalah yang mendesak keputusannya untuk diambil di Asia, dapat diputuskan oleh *Hoge Regering*. Adapun arsip statis yang terkait dengan korupsi pada masa VOC terdapat di bawah ini.



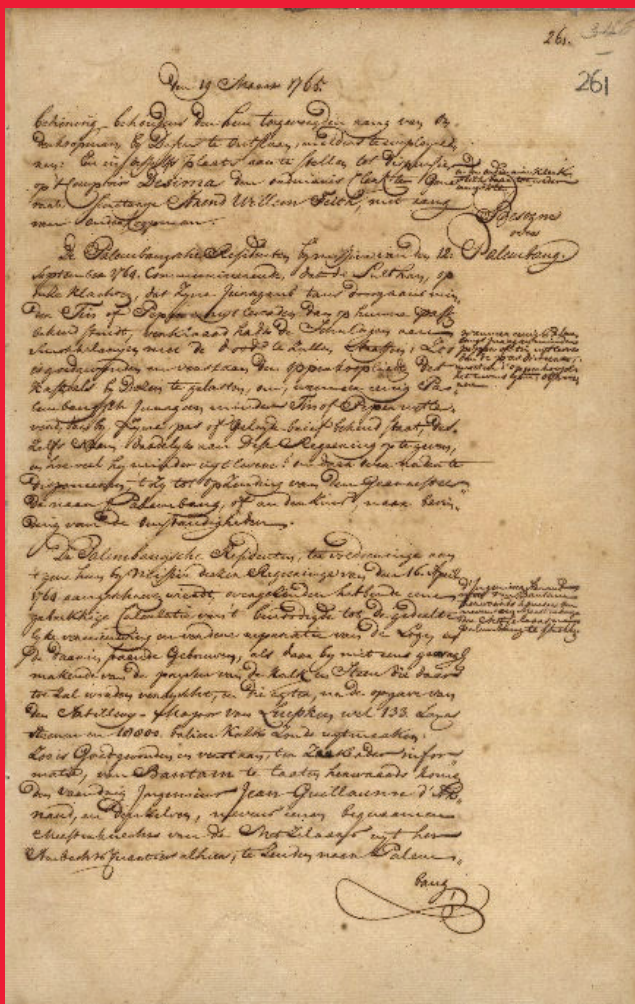
Arsip mengenai pengaduan kepada pengelola gudang perdagangan akibat ditemukannya kecurangan dalam penimbangan lada pada tahun 1702.

Sumber: ANRI, Daftar Arsip Hoge Regering No. 918 Hal. 221-229 (Bundel Arsip Seri Resolutie kurun waktu 03 Januari 1702 – 29 Desember 1702)



Laporan dari pengacara di bidang fiscal (*advocaat fiscal*) mengenai penggelapan barang yaitu ambergris (sejenis bahan yang dihasilkan oleh ikan paus sperma) oleh Gubernur Jenderal Hensius pada tanggal 14 November 1727. Ambergris merupakan salah satu komoditas yang berasal dari ikan paus jenis sperma. Isi perut ikan paus jenis ini dikenal sebagai komoditas premium mahal yang dapat digunakan untuk beberapa hal seperti bahan baku parfum, perasa makanan dan minuman, dan pengobatan.

Sumber: ANRI, Hoge Regering No. 957 folio 610-620.



Informasi keluhan Residen Palembang terhadap para juragan yang telah mengirimkan sedikit pasokan timah dan lada dari ketentuan yang berlaku. 19 Maret 1765.

Sumber: ANRI, Hoge Regering No. 1038

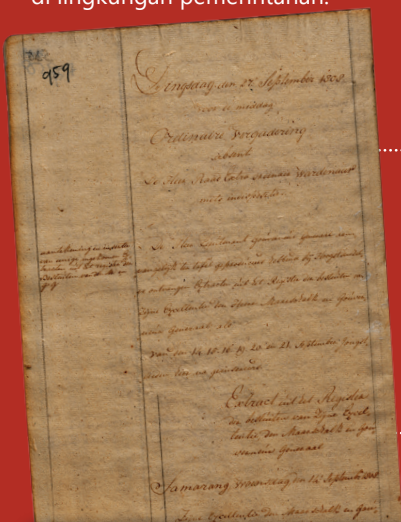
Runtuhnya VOC pada Tahun 1799 terutama akibat korupsi dan penguasaan Belanda oleh Perancis pada Tahun 1795-1814 mengakibatkan tidak jelasnya arah pemerintahan di wilayah jajahan di Indonesia dan dahulu dikenal dengan nama Hindia Belanda. Untuk mengatur wilayah pendudukan di Jawa, Napoleon mempercayakan Louis Herman Daendels. Beliau diangkat Gubernur Jenderal Hindia Belanda berkedudukan Batavia dan menjabat selama 4 tahun dari 1808 hingga 1811. Daendels sebagai penguasa di daerah jajahan langsung memberlakukan kebijakan pemerintahan sentralisasi untuk mengurangi praktek korupsi dan menghapus pemerintahan pantai timur laut Jawa. Bahkan untuk efek jera terhadap pelaku korupsi pemerintah memberlakukan hukuman mati. Daendels menghapus pemerintahan Pantai Timur Laut Jawa merupakan langkah awal dalam proses pemberantasan korupsi di Pulau Jawa. Dengan adanya sentralisasi kekuasaan pemerintahan oleh Daendels, Mulai terlaksana pemberantasan korupsi yang sebelumnya tidak bisa dilakukan. Selain itu pula, Daendels melarang para bupati dan pejabat untuk mengeluarkan uang bekti yang sebelumnya merupakan budaya pada masa itu ketika ada pelantikan pejabat di lingkungan pemerintahan.

Pada 1811, Inggris benar-benar memasuki Jawa dan mematahkan pertahanan Belanda di Jawa dan menempatkan Thomas Stamford Raffles sebagai Letnan Gubernur *East India Company* di India. Penguasaan Belanda atas Hindia Belanda baru dipulihkan pada 1816, pasca kekalahan Napoleon pada Tahun 1815. Berdasarkan Kesepakatan Inggris-Belanda pada Tahun 1814, Jawa dikembalikan lagi kepada pemerintah Kerajaan Belanda dengan meninggalkan banyak masalah yang baru bisa diselesaikan 10 tahun kemudian melalui penataan wilayah penguasaan Inggris-Belanda di Semenanjung Melayu, India, dan Hindia Belanda. Barulah babak baru kolonialisme Belanda di Hindia Belanda dimulai.

Dalam rangka penyerahan kembali tersebut, dibentuklah Komisaris Jenderal berdasarkan Keputusan Kerajaan Belanda tanggal 22 September 1814, yang terdiri dari tiga orang yaitu C. Th. Elout, Baron van der Capellen dan H. W. Muntinghe. Berdasarkan Keputusan Kerajaan Belanda tanggal 29 November 1814, Muntinghe digantikan oleh A. A. Buyskes. Komisaris ini bertugas untuk membangun sebuah pemerintahan di Hindia Belanda di bawah kekuasaan Raja Belanda dengan cara apapun yang dianggap perlu, dengan tetap memperhatikan adat dan kepercayaan setempat. Komisaris Jenderal tersebut berakhir masa tugasnya pada 1819,

selanjutnya kekuasaan dipegang oleh seorang Gubernur Jenderal. Gubernur Jenderal memiliki kekuasaan eksekutif yang bertanggung jawab terhadap semua kegiatan administrasi harian di Hindia Belanda. Dalam pelaksanaan tugasnya, Gubernur Jenderal dibantu oleh sebuah sekretariat bernama *Algemene Secretarie*. Arsip yang disimpan oleh lembaga ini meliputi bermacam-macam subyek karena *Algemene Secretarie* merupakan lembaga pusat tempat bermuaranya informasi di Hindia Belanda. Sedemikian sentralnya peran Gubernur Jenderal sehingga produk administratif yang dihasilkan menjadi sangat penting pula.

Algemene Secretarie merupakan organisasi kesekretariatan yang didirikan pada tahun 1819 sebagai hasil penggabungan antara *Gouvernement Secretarie* (sekretariat yang membantu tugas Gubernur Jenderal) dan *Generale Secretarie* (sekretariat yang membantu tugas Komisaris Jenderal). Lembaga ini diciptakan pada tahun 1819 berdasarkan Keputusan Komisaris Jenderal tanggal 1 Februari 1819 Nomor 109 sebagai badan yang membantu pelaksanaan tugas Gubernur Jenderal sebagai penguasa tertinggi di Hindia Belanda. Lembaga ini bertugas antara lain memberikan masukan dan informasi kepada Gubernur Jenderal; mengkaji setiap usulan yang diajukan oleh kepala departemen; mengedit



Resolutie (Keputusan) Hoge Regering dan H.W. Daendels tanggal 27 September 1808 beserta lampiran notulen rapat pertemuan H.W. Daendels dengan para pejabat, bupati dan pejabat daerah mengenai reorganisasi sistem pemerintahan di Jawa yaitu dengan menghapus kekuasaan pemerintah *Java's Noordoost Kust* menjadi sentralisasi sistem pemerintahan di wilayah Timur laut Jawa dengan memecat gubernur Direktur Nicolaas Engelhaard dan membagi daerah pemerintahan (*gouvernement*) menjadi 9 prefektur yang masing-masing dikepalai oleh seorang *prefect* atau seorang pegawai negeri (*landroost-ambt*). *Resolutie* (Keputusan) ini merupakan reformasi atau perubahan yang dilakukan oleh H.W. Daendels yang menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia ketika Belanda berada di bawah kekuasaan Raja Louis Bonaparte, yaitu dengan mengubah sistem pemerintahan di Jawa menjadi bersifat sentralisasi (*Centralisatie Europese Bestuur*).

Sumber: ANRI, Hoge Regering No. 1176

format keputusan (*besluit*); mengedit isi *Javasche Courant* (surat kabar resmi pemerintah); menangani berbagai macam laporan dan data statistik yang dikirim oleh pemerintah daerah, yang akan menjadi bagian dari laporan pemerintah Hindia Belanda kepada pemerintah pusat di Belanda; serta mengompilasi bahan penyusunan *Staatsblad van Nederlandsch Indië*. Selain itu, personil lembaga ini juga menjadi anggota sekretariat *Hoge Regering* dan *Raad van Nederlandsch Indië* sehingga *Algemene Secretarie* juga menyimpan arsip dari dua pencipta arsip tersebut. Organisasi ini pada awalnya berkantor di Batavia namun kemudian sempat berpindah-pindah di dua lokasi yaitu Batavia dan Buitenzorg mengikuti posisi Gubernur Jenderal.) Adapun arsip statis yang terkait dengan korupsi pada masa Hindia Belanda terdapat di bawah ini.



Bundel mengenai surat rahasia yang dikirimkan oleh Direktur *Binnenlandsch Bestuur* (sekarang seperti Kementerian Dalam Negeri) kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda mengenai artikel yang ditulis J. F. Dijkstra yang berjudul "De Corruptie in de Nederlandsch-Indische Ambtenaarswereld of Mr. Remnev als Regeerings-commissaris door J. F. Dijkstra, Planter" untuk wilayah Residen Lampung. Di dalam tulisannya, J.F. Dijkstra menceritakan kemewahan hidup dan tindakan kesewenang-wenangan yang dilakukan Mr. Remnev. Artikel ini diterbitkan ke *Khatayak* luas di awal abad ke-20.
Sumber: ANRI, *Algemene Secretarie Seri Grote Bundel Besluit No. 1357*.



Suasana Sidang di Volkstraad (Dewan Rakyat) termasuk sidang kasus penggelapan dan kecurangan di Batavia, 17 Mei 1918.
Sumber: ANRI, KIT Batavia Nomor 48/28.



Arsip mengenai dugaan penggelapan pajak berdasarkan laporan dari *Departemen van Financien* (seperti Kementerian Keuangan Tahun 1941).
Sumber: ANRI, Inventaris Arsip *Algemene Secretarie - Series Grote Bundel Besluit Nomor 3593*.

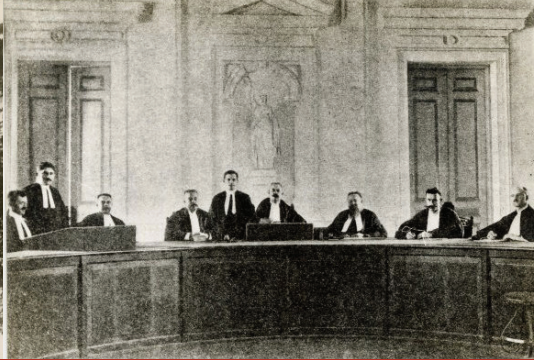


Kasus penggelapan terhadap laporan keuangan sejumlah 4.932,6 gulden yang dilakukan oleh Pegawai *Departemen van Justitie* (sekarang Kementerian Hukum dan HAM) terhadap tersangka dan dikenal hukuman pemecatan terhadap tersangka 1 tahun 3 Bulan *Besluit No. 5* Tanggal 29 Juli 1931. Berkas arsip ini juga berisi antara lain tuduhan penggelapan pajak, pembelaan tersangka, dan tindak lanjut dari kasus tersebut.
Sumber: ANRI, *Algemene Secretarie Seri Grote Bundel Besluit No. 2797*.



Suasana penjara untuk Orang Eropa Timur termasuk kasus penggelapan dan kecurangan, sekitar tahun 1930.

Sumber: ANRI, KIT Jawa Timur Nomor 786/51.



Suasana pengadilan di Jawa Tengah termasuk kasus penggelapan dan kecurangan, sekitar tahun 1930.

Sumber: ANRI, KIT Jawa Tengah Nomor 64/47.



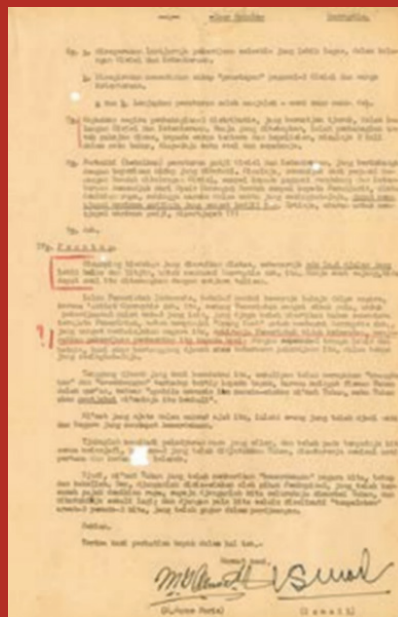
Rumah Penjara Pusat di Manado, Sulawesi Utara termasuk kasus penggelapan dan kecurangan, sekitar tahun 1930.

Sumber: ANRI, KIT Sulawesi Nomor 786/63.

Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 diharapkan membangkitkan semangat bersama seluruh sendi masyarakat Indonesia dalam membangun negara yang berdaulat kaya dan makmur. Namun hal ini tidak serta merta menjadikan Republik Indonesia negara yang bebas dari praktik korupsi. Korupsi menjadi bagian kelam dari sejarah bangsa Indonesia dari masa ke masa. Adanya komitmen dari pemimpin negeri mulai dari zaman Presiden Sukarno sampai dengan sekarang untuk senantiasa berada di garis depan dalam perang melawan korupsi. Komitmen memberantas korupsi menjadi salah satu daya tarik dalam menentukan pemimpin. Pembentukan badan dan komite pemberantasan korupsi menjadi upaya yang dilakukan para pemimpin bangsa dalam usaha pencegahan korupsi. Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 adalah awal bagi bangsa Indonesia untuk bersama-sama menata sebuah bangsa yang merdeka dan bermartabat menuju masyarakat merdeka adil dan makmur. Akan tetapi kemerdekaan yang sudah dikumandangkan ke seluruh dunia ini tidak serta merta membuat Indonesia benar-benar merdeka, Belanda yang masih berharap dapat menguasai negeri tercinta ini masih berusaha merebut kekuasaan dengan melakukan agresi militernya.

Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 bukanlah titik akhir perjuangan bangsa Indonesia untuk

mencapai kemerdekaan. Apalagi, Indonesia pada awal kemerdekaan masih harus menghadapi kekuatan asing yang ingin menjajah kembali, lantaran para penjajah khususnya Belanda enggan untuk mengakui kemerdekaan Indonesia. Perjuangan Pemerintah diawal masa kemerdekaan menjadi lebih sulit ketika dari dalam praktek korupsi masih terjadi di berbagai lini. Pembentukan Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara merupakan salah satu momentum usaha negara untuk memerangi kejahatan korupsi. Meskipun demikian masih saja terjadi praktik korupsi di berbagai tempat. Berikut merupakan contoh beberapa arsip mengenai kasus korupsi yang tercatat dalam arsip yang tersimpan di ANRI. Selain itu, terdapat juga arsip-arsip terkait upaya pemerintah dalam memerangi kejahatan korupsi terutama pada masa awal kemerdekaan Indonesia.



Persidangan Djody Gondokusumo atas kasus korupsi yaitu pemberian hadiah dari pengusaha pada tahun 1955.

Sumber: ANRI, Arsip Foto Kementerian Penerangan Wilayah Jakarta Tahun 1955 No. 29618

Tak lama setelah Soeharto dilantik sebagai presiden dan eranya disebut sebagai masa orde baru langsung mengeluarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 264 Tahun 1967 yang memutuskan menambah susunan anggota tim Pemberantasan Korupsi melalui Kepres Nomor 228 Tahun 1967 dengan seorang perwira tinggi yang ditunjuk oleh Menteri Pertahanan. Pada tanggal 31 Januari 1970 pemerintah membentuk Komisi Empat dengan anggotanya; Profesor Johannes, I. J. Kasimo, Mr. Wilopo, dan A Cokroaminoto dengan hasil dapat mengungkapkan sejumlah penyimpangan. Pada 9 Juli 1970 pemerintah membentuk Komite Anti Korupsi (KAK) dengan anggotanya terdiri dari Aktivistis Angkatan 66 yaitu

Surat dari mantan staf lokal dinas intelijen TNI Sumatera kepada Presiden Sukarno berjudul "Corruptie dan Tjara Membasminja", 17 Maret 1950.

Sumber: ANRI, Kabinet Presiden RI No. 278

Akbar Tanjung, Asmara Nababan, dan Sjahrir. Pada 1997 pemerintah membentuk Operasi Tertib untuk memberantas berbagai pungli di lapangan. Pada tahun yang sama pemerintah membentuk Tim Pemberantasan Korupsi dengan pelaksana yaitu Menteri Negara Pendayagunaan Negara yaitu J.B. Sumarlin, Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban Laksamana TNI Sudomo, Ketua MA, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung, dan Kepala Polri RI.

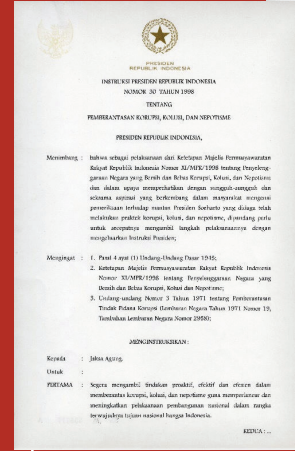
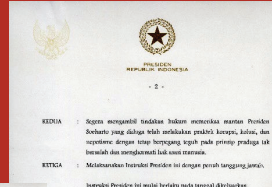
Presiden Soeharto yang diduga telah melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Bahkan untuk Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dikeluarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Pada masa Presiden Megawati dikeluarkan undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, merupakan cikal bakal berdirinya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).

Salinan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 264 Tahun 1967 yang memutuskan untuk menambah susunan anggota Tim Pemberantasan Korupsi melalui Keputusan Presiden Nomor 228 Tahun 1967 dengan menunjuk seorang perwira tinggi dari Menteri Pertahanan Keamanan, 20 Desember 1967.

Sumber: ANRI, Kementerian Pertanian RI (1948) 1950-2009 No.3862.

Dari pemaparan di atas, dapat dibuat kesimpulan yaitu arsip statis korupsi merupakan bentuk informasi yang begitu penting. Dari arsip, kita mengetahui banyak hal dan berbagai macam informasi terutama informasi terkait korupsi di masa lalu dan saat peristiwa itu terjadi. Arsip statis kaitannya dalam korupsi adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan dan masuk kategori permanen dalam jadwal retensi arsip yang telah diverifikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh ANRI atau lembaga kearsipan yang nantinya menjadi bahan penelitian dan ilmu pengetahuan terutama mengenai korupsi, dan terakhir adalah arsip statis korupsi relatif lebih mudah diakses dengan cara tentunya mengetahui konteks mengenai korupsi pada masanya dibuktikan dengan arsip statis yang telah ada.

Tahun 1998 terjadi reformasi yang berawal dengan berhentinya Presiden Soeharto dan digantikan Wakil Presiden B.J Habibie. Dalam situasi semangat reformasi Presiden B.J. Habibie mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 30 Tahun 1998 tentang Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme yang salah satunya memberi instruksi kepada Jaksa Agung agar memeriksa mantan



Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Mei 1999

Sumber: ANRI, Sekretariat Negara RI Seri Produk Hukum 1949-2005 No.846A

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai dasar berdirinya KPK, 27 Desember 2002.

Sumber: ANRI, Sekretariat Negara RI Seri Produk Hukum 1949-2005 No. 964A.



ARSIP FILM GELORA PEMBANGUNAN

MEMBANGKITKAN MEMORI, MERAJUT MASA DEPAN INDONESIA DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (*SUSTAINABLE DEVELOPMENT*)

Oleh Bayu Tanoyo, S.Sos, M.Han



Freepik

Pembangunan pada dasarnya diciptakan untuk menunjang kehidupan rakyat agar mampu bertahan di tengah persaingan kompetisi dunia dan globalisasi yang semakin menjadikan kita untuk tetap hidup bersaing. Persaingan kompetisi dunia dan globalisasi tersebut memunculkan ketidakpastian dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Persaingan tersebut berkaca pada konsep *Volatility* (Gejolak), *Uncertainty* (Ketidakpastian), *Complexity* (kompleksitas) dan *Ambiguity* (VUCA) yang disampaikan Oliver Mack, Anshuman Khare, Andreas Krämer, dan Thomas Burgartz (2015) dalam bukunya "*Managing in VUCA World*" menerangkan bahwa tantangan yang harus dihadapi setiap pemimpin organisasi/negara, menyangkut disrupsi, pergeseran pasar, perubahan perilaku konsumen, serta persaingan bisnis yang semakin ketat. Negara pun saling berlomba untuk tampil menjadi yang terbaik dan mampu memberikan arah kepastian untuk rakyatnya. Kepemimpinan yang mampu menghasilkan strategi, inisiasi baru, dan kreativitas baru yang memiliki daya saing serta mampu menangkal atas setiap ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan baik dari dalam maupun luar negeri.

Tidak ubahnya dari paparan konsep tersebut bahwa perkembangan dalam level berbangsa dan bernegara. Indonesia seiring jalan mulai dari adanya penjajahan oleh bangsa asing hingga pada periode kemerdekaan berpacu untuk memerdekakan diri demi masa depan Indonesia yang lebih baik. Setelah berhasil dengan revolusi perjuangan Indonesia, kita mengalami tantangan baru untuk mampu mengisi kemerdekaan dan memajukan bangsa. Presiden sebagai seorang pemimpin beserta elemennya memiliki peranan penting dalam mengampu beban amanah dari para rakyatnya. Hal ini ditekankan pada perkembangan negara yang semakin pesat serta mengusung konsep transformasi dan keberlanjutan dari seorang pemimpin negara (*transformation and sustainable leadership*).

Kepemimpinan Presiden Indonesia di awalan perkembangan republik selalu berdinamika seiring dengan tuntutan persaingan global yang semakin meningkat. Tiap pemimpin yang ada di Indonesia memiliki karakteristik dan pencapaian masing-masing. Keseluruhan dari Presiden yang ada di Indonesia memiliki visi, misi dan tujuan yang sama dalam rangka meningkatkan kapabilitas dan kredibilitas Indonesia di mata dunia sehingga tujuan menjadi negara besar akan mampu dicapai. Adapun akan kita temukan beberapa hal yang perlu kita ketahui sebagai pembelajaran dalam konteks pembangunan berkelanjutan dari masa ke masa sebagai berikut :

No.	Presiden	Periode	Fokus Utama Pembangunan
1.	Soekarno	1945-1967	<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan nasionalisme dan identitas nasional - Pembangunan infrastruktur dasar (Monas, Gelora Bung Karno) - Program pembangunan dengan slogan "Berdikari"
2.	Soeharto	1967-1998	<ul style="list-style-type: none"> - Stabilitas politik dan ekonomi - Pembangunan ekonomi melalui Repelita - Penguatan sektor pertanian (Revolusi Hijau) - Industrialisasi awal
3.	B.J. Habibie	1998-1999	<ul style="list-style-type: none"> - Reformasi politik dan ekonomi - Liberalisasi ekonomi - Persiapan Pemilu demokratis
4.	Abdurrahman Wahid	1999-2001	<ul style="list-style-type: none"> - Reformasi birokrasi dan militer - Desentralisasi dan otonomi daerah - Penguatan hak asasi manusia
5.	Megawati Sukarnoputri	2001-2004	<ul style="list-style-type: none"> - Stabilitas politik dan keamanan - Pemulihan ekonomi pasca krisis - Reformasi hukum
6.	Susilo Bambang Yudhoyono	2004-2014	<ul style="list-style-type: none"> - Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan - Pengurangan kemiskinan - Pembangunan infrastruktur (jalan tol, pelabuhan) - Reformasi birokrasi
7.	Joko Widodo	2014-sekarang	<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan infrastruktur besar-besaran (jalan tol, bandara, pelabuhan) termasuk dengan pembangunan Ibukota Nusantara (IKN) - Revolusi Industri 4.0 - Penguatan ekonomi digital - Pengurangan kemiskinan dan kesenjangan

Era Sukarno perlu diketahui banyak mengalami perkembangan secara masif dalam segala sendi kehidupan. Peningkatan di segala sektor mulai dari hulu ke hilir, mulai dari kesehatan, ekonomi, sosial budaya, politik, pendidikan hingga pada masalah pertahanan dan keamanan negara terus dilakoni di era Sukarno. Datang masa berikutnya, pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, Indonesia menjalankan serangkaian program pembangunan yang dikenal dengan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Program ini dimulai pada tahun 1969 dengan tujuan untuk memulihkan dan membangun ekonomi Indonesia secara bertahap melalui beberapa tahap :

Repelita I (1969-1973):

Pemfokusan terutama pada pemulihan ekonomi pasca-kemerdekaan, pembangunan infrastruktur dasar, dan peningkatan produksi pangan.

Repelita II (1974-1979) :

Penekanan mendalam pada diversifikasi ekonomi dan industrialisasi awal.

Repelita III (1979-1984):

Percepatan industrialisasi dan penguatan basis ekonomi nasional, yang menjadi target terutama pada pertumbuhan ekonomi, stabilitas nasional, dan pemerataan pembangunan, dengan penekanan pada sektor pertanian dan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku.

Repelita IV (1984-1989):

Mempertahankan capaian sebelumnya dan bergerak menuju sektor industri, terutama yang menghasilkan barang ekspor dan menyerap tenaga kerja terutama urusan pada sektor peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Repelita V (1989-1994):

Melanjutkan dan meningkatkan dari capaian di repelita sebelumnya seperti pembangunan industri, memperkuat ketahanan ekonomi, dan pemerataan hasil pembangunan.

Repelita VI (1994-1999):

Pemfokusan pada penguatan ekonomi makro dan stabilitas politik menjelang krisis ekonomi Asia 1997.

Meskipun demikian, untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) di era Presiden Soeharto tidak secara spesifik disebutkan dalam dokumen RPJM tersebut seperti yang kita kenal dewasa ini, dikarenakan pendekatan perencanaan pembangunan lebih banyak dilakukan melalui Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) yang merupakan bagian dari RPJP. Namun, periode perencanaan jangka menengah yang merujuk pada lima tahun ini dijadikan dasar untuk mencapai tujuan jangka panjang yang diinginkan.

Selain itu, pemerintahan Orde Baru juga menerapkan Trilogi Pembangunan yang terdiri dari stabilitas nasional yang dinamis, pertumbuhan ekonomi tinggi, dan pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya. Untuk mencapai pemerataan, delapan jalur pemerataan ekonomi diperkenalkan, mencakup berbagai aspek dari pemenuhan kebutuhan pokok hingga pemerataan kesempatan memperoleh keadilan.

Pada masa Orde Baru, stabilisasi ekonomi juga dilakukan melalui pengendalian inflasi yang sangat tinggi pada tahun 1966 dan pemulihan alat produksi yang rusak. Kebijakan ini sukses menurunkan inflasi dan membangun kembali ekonomi hingga krisis Asia tahun 1997-1998 mengguncang stabilitas ekonomi dan politik Indonesia, yang pada akhirnya menyebabkan lengsernya Soeharto pada tahun 1998.

Program Pemerintah Orde Baru (Orba) era Presiden Soeharto menghasilkan banyak Pembangunan di segala bidang. Tidak hanya fisik melainkan juga non fisik. Bercermin pada setiap peristiwa maka perlu kita cermati secara mendalam dengan Film yang diproduksi oleh PPFN berupa Gelora Pembangunan (GP). Sebagai pengetahuan, PPFN itu sendiri bermula dari perusahaan film *Java Pacific Film* dan *Multifilm* pada tahun 1934. Berubah menjadi *Nippon Eigasha* di tahun 1943 pada masa pendudukan Jepang. Di masa revolusi kemerdekaan berubah menjadi Berita Film Indonesia (1945) hingga pada masa sekarang yang menjadi Perum Produksi Film Negara (PFN). Koleksi khazanah GP tersebut berisi mengenai Pembangunan yang dilakukan di tahun 1970-an saat Presiden berkuasa. Rekaman GP tersebut sebagai contoh dalam Daftar Arsip Film Pusat Produksi Film Negara (PPFN) : Seri Gelora Pembangunan 1978-1983 pada nomor GP 279 bersinopsiskan sebagai berikut :

“ Proyek pembangunan jalan Jakarta-Merak oleh Departemen Pekerjaan Umum dengan tujuan mengurangi kemacetan jalan di daerah Tugu Pancoran. Proses Pembangunan Jakarta-Merak terbagi menjadi tiga, yaitu: jalan layang Tebet, jalan bebas hambatan di jalan raya by pass sampai Grogol dan jalan simpang susun di daerah Tugu Pancoran.”

Di dalam deskripsi itu pun dijelaskan bagaimana tampak situasi pembangunan jalan yang memperlihatkan proses pembangunan jalan sebagai upaya pembangunan berkelanjutan dengan tampak beberapa gedung-gedung perkantoran yang berdiri kokoh beserta masyarakat

GELORA PEMBANGUNAN

PUSAT PRODUKSI FILM NEGARA



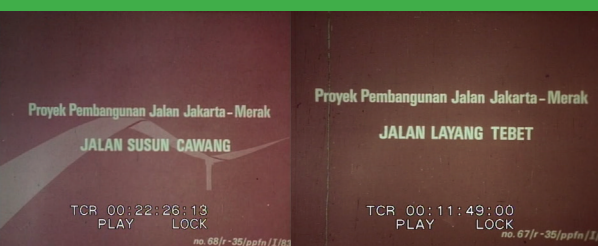
Ilustrasi linimasa seri film Gelora Pembangunan karya Pusat Produksi Film Negara (PPFN) dari tahun 1978 hingga 1983. Linimasa tersebut mencakup tahun-tahun penting: 1978, 1979-1981, dan 1982-1983. Setiap bagian menampilkan ikon atau gambar kecil yang mewakili proyek infrastruktur, kondisi sosial ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan Masyarakat.

dan penduduk yang berada di sekitar Pembangunan tersebut. Adapula adanya proses masyarakat yang terdampak pembangunan sebagai konsekuensi dari bergeliatnya kemajuan negara.

Dalam konteks kenegaraan jelas Pembangunan yang dilakukan seperti pada cuplikan film merupakan upaya pemerintah saat itu untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dengan pembangunan fisik secara masif (menyeluruh) diharapkan menjadi pilar dalam hal pembangunan yang berkelanjutan dalam mendukung Indonesia menjadi negara yang mampu berubah menjadi negara berkembang menjadi negara maju. Segala sektor tersebut untuk mendukung sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara, sekaligus agar Indonesia mampu diperhitungkan di kancah internasional.

Dari arsip film yang dijelaskan sebelumnya maka diharapkan rekaman pembangunan tersebut dapat berkesinambungan dan berkelanjutan dikemudian hari. Menjaga arsip yang bernilai guna sejarah seperti Gelora Pembangunan ini maka akan menjadi investasi penting untuk kelak di masa mendatang. Hal ini dapat menjadi pembelajaran yang baik (*lesson learned*) dalam maksud pemaknaan konteks yang ada pada arsip untuk pembelajaran para pemimpin berikutnya. Keseluruhan pembangunan tersebut berasal dari APBN yang diharapkan bahwa kegiatan dari pemerintah tersebut mampu memicu berkelanjutan tidak hanya secara ekonomi, melainkan meliputi kestabilan politik, peningkatan sosial budaya, penyerapan tenaga kerja, peningkatan kemampuan SDM Indonesia yang unggul yang mampu menjawab persaingan global.

Keseluruhan program pemerintah yang terdokumentasi maka akan membantu mengetahui sepag terjang keterampilan pemerintah dalam mencapai tujuannya yaitu menciptakan keadilan dan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia. Harapan besar bagi bangsa ini adalah mampu merajut dan menyatukan mimpi untuk masa depan Indonesia dengan mekanisme pembangunan yang bersifat berkelanjutan (*Sustainable Development*). Cita-cita tersebut diharapkan mampu dibaca untuk penerus Indonesia berikutnya. Jejak tersebut mampu dipelajari oleh generasi yang akan datang, khususnya generasi pemimpin yang berkuasa untuk mampu membaca, mempelajari dan menganalisis berdasarkan rekaman, arsip dan jejak kepemimpinan sebelumnya dalam mewujudkan generasi emas 2045.



Cuplikan peristiwa GP 279 : Pembangunan Jalan Jakarta Merak (Jalan Layang Tebet dan Jalan Susun Cawang Pancoran) dan sebagainya dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan (*Sustainable Development*).

DR. A.K. GANI PEJUANG PARIPURNA

(DOKTER, AKTOR, TENTARA, POLITISI, BIROKRAT, DAN PENGUSAHA)

Oleh **Mudanto Pamungkas, S.S**

Adenan Kapau Gani atau lebih populer disebut A.K. Gani merupakan tokoh pejuang yang berkiprah di Sumatera Selatan. Meskipun banyak berperan di Sumatera Selatan, namun Gani berasal dari Minangkabau. Ia dilahirkan di Palebayan, Agam, Sumatera Barat pada tanggal 16 September 1905. Gani menempuh pendidikan dasar di *Europeesche Lagere School* (ELS) di Bukittinggi. Kemudian melanjutkan ke *School tot Opleiding van Inlandsche Artsen* (STOVIA) di Batavia, namun belum sampai tamat sekolah kedokteran tersebut sudah ditutup oleh pemerintah kolonial Belanda. Ia kemudian beralih ke *Algemeene Middelbare School* (AMS). Meskipun demikian keinginannya untuk menjadi dokter tetap tinggi. Oleh karena itu, ketika sekolah tinggi kedokteran yang bernama *Geneeskundige Hoogeschool* (GHS) dibuka Gani mendaftarkan diri. Ia menyelesaikan pendidikan di GHS pada tahun 1940. Setelah lulus GHS, Gani kembali ke Palembang dan bekerja sebagai dokter.

Selama menempuh studi di Batavia, Gani aktif di organisasi pergerakan nasional. Ia bergabung dengan organisasi *Jong Sumatranen Bond* dan terlibat dalam pelaksanaan Kongres Pemuda II pada bulan Oktober 1928. Ketika *Jong Sumatranen Bond*, *Jong Java*, dan Pemuda Indonesia digabung menjadi satu dengan nama Indonesia Moeda pada tanggal 31 Desember 1930. Gani juga turut bergabung dengan organisasi tersebut dan dipercaya menjadi

anggota Dewan Eksekutif. Selain itu, Gani juga menjadi anggota Partai Indonesia (Partindo). Partindo sendiri merupakan kelanjutan dari Partai Nasional Indonesia (PNI) yang dibekukan oleh pemerintah kolonial Belanda. Sikap Partindo yang sangat kritis terhadap pemerintah kolonial Belanda membuat Gubernur Jenderal B.C. de Jonge mengambil tindakan tegas. Salah satunya dengan membuang pemimpin Partindo, yaitu Ir. Sukarno ke Ende. Menghadapi berbagai tekanan dari pemerintah kolonial tersebut maka pengurus Partindo memutuskan untuk membubarkan Partindo. Beberapa pengurus dan pengikut Partindo kemudian membentuk organisasi baru yang bernama Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo). Gani kemudian juga bergabung dengan organisasi

tersebut. Selama menjadi anggota Gerindo, ia juga aktif di Gabungan Politik Indonesia (GAPI). GAPI merupakan gabungan dari berbagai organisasi politik dan Gerindo menjadi salah satu anggotanya. Pada tahun 1941, Gani mencoba peruntungan sebagai aktor dengan berperan sebagai dr. Pardi pada film berjudul "Asmara Moerni".

Pada masa awal pendudukan Jepang, Gani terlibat dalam gerakan menentang *fasisme*. Akibatnya, ia ditangkap oleh Kempeitai dan ditahan selama satu tahun (September 1942 – Oktober 1943). Setelah dibebaskan ia menjadi kepala rumah sakit di Tanjung Raja. Pada masa akhir pendudukan Jepang, Gani dipilih menjadi anggota *Sumatera Chuo Sangi In*. Dalam organisasi bentukan Jepang ini, Gani bertindak sebagai juru bicara kaum nasionalis. Dalam pertemuan *Sumatera Chuo Sangi In* di Bukittinggi pada tanggal 26 Juni 1945 diusulkan kepada pemerintah pendudukan Jepang agar: pertama, membentuk *Sumatera Hokokai* sebagai pusat gerakan rakyat seluruh Sumatera. Kedua, menggabungkan *Gyugun* dan *Heiho* sebagai laskar rakyat sebagai dasar balatentara Indonesia. Dalam pertemuan tersebut Gani menginformasikan kepada anggota *Sumatera Chuo Sangi In* bahwa posisi Jepang sudah mulai terjepit dan meminta mereka bersiap-siap menghadapi kejatuhan *Dai Nippon*.



Setelah mendengar Sukarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, Gani segera mengumpulkan tokoh masyarakat Palembang untuk mengambil alih kekuasaan dari tangan Jepang. Ia bersama tokoh pejuang lainnya menemui *Cokang (residen)* Miyako Tosio dan memintanya untuk tidak menghalang-halangi kemerdekaan Indonesia. Gani kemudian mengibarkan bendera Merah Putih dengan diiringi lagu Indonesia Raya lalu dilanjutkan dengan pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia seperti yang dibacakan Sukarno-Hatta. Rangkaian kegiatan itu dilakukan di depan kantor *Cokang* Palembang.

Tidak lama setelah proklamasi kemerdekaan, Gani ditunjuk untuk menduduki jabatan sebagai Residen Sumatera Selatan, sedangkan untuk Gubernur Sumatera dijabat oleh Teuku Mohammad Hassan. Pada masa pemerintahan Kabinet Sutan Sjahrir III, Gani dipercaya sebagai Menteri Kemakmuran. Ia juga terlibat dalam Perundingan Linggarjati sebagai anggota delegasi. Pada bulan November 1947, Gani ditugaskan untuk menghadiri Konferensi PBB untuk Ketenagakerjaan dan Perdagangan di Havana, Kuba. Hal itu sebagai upaya untuk menembus blokade ekonomi Belanda. Meski sibuk dengan urusan pemerintahan jiwa politisi Gani tetap menggelora, ia mendirikan PNI Palembang. Bahkan pada tahun 1947 terpilih menjadi Ketua Umum PNI, namun karena masih sibuk membenahi Sumatera Selatan maka Gani diganti antar waktu dan hanya menjadi Ketua PNI Sumatera Selatan.

Ia juga terlibat secara aktif dalam pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR) di Palembang dan kemudian ditunjuk sebagai Koordinator BKR Sumatera Selatan.

Pada awal kemerdekaan Gani telah menunjukkan inisiatif yang besar dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Sumatera Selatan. Pada masa pemerintahan Kabinet Amir Sjarifuddin, Gani dipercaya sebagai Wakil Menteri Pertahanan dan Keamanan untuk Sumatera Selatan. Selain itu, ia juga dipercaya sebagai Gubernur Militer Sumatera Bagian Selatan (Desember 1948 – Februari 1950) yang meliputi wilayah Karesidenan Palembang, Jambi, Bengkulu, dan Lampung. Sebagai Gubernur Militer, Gani memimpin perang gerilya bersama pemimpin TNI lainnya di Sumatera Selatan. Ia juga mengkoordinir kegiatan penyelundupan hasil bumi ke Singapura dalam rangka mencari dana dan senjata untuk perjuangan TNI di Sumatera Selatan. Oleh karena itu ia memperoleh julukan "*the great smuggler*". Pasca pengakuan kedaulatan, Gani dan pasukannya turun gunung dan kembali ke kota Palembang. Sebagai penghormatan atas jasanya memimpin perang gerilya, masyarakat Sumatera Selatan memberi penghargaan berupa bintang emas 24 karat dan gelar Pemimpin Gerilya Agung.

Pada masa demokrasi liberal pengabdian Gani di bidang pemerintahan terus berlangsung. Ia dipercaya sebagai Menteri Perhubungan pada Kabinet Ali Sastroamidjojo I (November 1954 – Agustus 1955). Hasil perolehan suara Pemilu 1955 mengantarkannya sebagai wakil dari PNI di lembaga Konstituante (1955 – 1959). Setelah Konstituante dibubarkan, Gani terpilih menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dari tahun 1960 – 1966.

Sebagai keturunan Minangkabau, jiwa dagang tidak pernah hilang dari diri Gani. Pada bulan Juli 1950, Gani mendirikan sebuah peternakan

modern di daerah Curup, Bengkulu yang diberi nama Bukit Barisan *Ranch*. Proyek peternakan yang mencakup lahan seluas 110 hektar ini sayangnya harus gulung tikar akibat pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). Pada bulan Januari 1953, Gani mendirikan perusahaan penerbangan yang diberi nama *Pioneer Aviation Corporation* dengan logo banteng bersayap. Pemilihan binatang banteng sebagai logo mencirikan orientasi politiknya sebagai kader PNI. Perusahaan tersebut memiliki modal awal satu pesawat DHC-2 Beaver yang dibeli bekas dari Singapura. Sayangnya menjalankan usaha di bidang penerbangan di masa itu sangat sulit, akibatnya perusahaan terpaksa gulung tikar dan pesawatnya dijual ke TNI-AD. Pesawat tersebut menjadi pesawat pertama yang dimiliki oleh Penerbangan Angkatan Darat (Penerbad). Pada bulan November 1954, Gani mendirikan pabrik ban yang diberi nama *NV Indonesia Rubber Industries*. Pabrik ini merupakan bagian dari Rencana Lima Tahun Pembangunan Indonesia. Pada tahun 1959, pabrik ban tersebut diambilalih oleh negara dan diberi nama Pabrik Ban Palembang.

Adenan Kapau Gani yang memiliki pangkat mayor jenderal tituler ini tutup usia di Palembang pada tanggal 23 Desember 1968. Jenazahnya kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Ksatria, Bukit Siguntang, Palembang. Namanya kemudian diabadikan sebagai Rumah Sakit dr. A.K. Gani di bawah Kesdam II/Sriwijaya di Palembang. Pada tanggal 9 November 2007, dr. A.K. Gani dianugerahi gelar Pahlawan Nasional oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Guna mengenang jasa dan kepahlawanan dr. A.K. Gani oleh keluarga didirikanlah Museum dr. A.K. Gani yang berada di Jl. Mangkunegara, Sako, Palembang.

ANWAR ASYRAF

DISASTER PLANNING & RESPONSE PADA LEMBAGA KEARSIPAN TERHADAP BENCANA KEBAKARAN

Bencana kebakaran bukan merupakan hal baru yang terjadi di sekitar kita. Sebagai contoh, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik DKI Jakarta, tercatat jumlah kebakaran di provinsi DKI Jakarta setiap tahun meningkat¹ dengan kerugian dan dampak yang bermacam-macam. Dampak bencana kebakaran di Indonesia sering kali besar karena masyarakat Indonesia pada kenyataannya kurang memahami dengan baik terkait mitigasi bencana², walaupun mereka mengetahui bahwa Indonesia adalah negara rawan bencana. Pernyataan tersebut didukung oleh narrative review³ yang diterbitkan di NLM Library of England yang menyatakan bahwa ketidakpahaman ini diakibatkan oleh tidak adanya edukasi mengenai mitigasi dan manajemen bencana di Indonesia. Oleh karena itu, perlu adanya edukasi terkait mitigasi dan manajemen bencana, terutama bencana kebakaran di lembaga kearsipan karena dampaknya akan dapat merusak seluruh arsip dan koleksi di dalamnya. Selain itu, seorang arsiparis yang bekerja wajib mengetahui kedua hal tersebut, karena bencana sejatinya akan terjadi kapanpun dan di manapun, hanya saja dampaknya bisa dikurangi. Sebagai kesimpulan, suatu

lembaga kearsipan hendaknya menerapkan *disaster planning* and response untuk mencapai tujuan tersebut.

Disaster planning and response atau aksi tanggap bencana adalah suatu pengetahuan yang berkaitan dengan mitigasi, respon dan pemulihan bencana. Pengetahuan ini harus dimiliki oleh setiap arsiparis, dengan harapan mereka mengetahui apa yang mereka harus lakukan sebelum, sesaat dan sesudah bencana. Sebagai contoh, sebelum terjadi bencana kebakaran, seorang arsiparis hendaknya dapat menginventarisasi seluruh koleksi yang dimiliki dengan membuat daftar dan inventaris arsip. Keduanya akan membantu mereka untuk dapat mengetahui secara detail koleksi apa saja yang mereka simpan beserta media arsipnya. Hal ini dilakukan agar arsiparis dapat memetakan seluruh arsip yang disimpan dan hasilnya akan memudahkan proses perlindungan dan penyelamatan arsip ketika bencana kebakaran terjadi. Selain itu, seorang arsiparis juga harus dapat menyusun rencana evakuasi. Rencana evakuasi merupakan dokumen yang memuat penjelasan kondisi di daerah, strategi dan prosedur evakuasi, peta-peta evakuasi, serta memberikan rekomendasi-rekomendasi untuk tindakan-tindakan yang perlu dilakukan lebih lanjut untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana. Rencana evakuasi ini nantinya dapat dibuat oleh *response team* atau sekumpulan arsiparis atau pegawai yang akan bertanggung-jawab sebelum, sesaat dan sesudah bencana terjadi. *Response team* biasanya terdiri dari kepala lembaga kearsipan, arsiparis dan satuan keamanan yang sebaiknya diketuai oleh orang yang memiliki fisik dan jiwa yang kuat, sehingga dapat melakukan proses penyelamatan dengan tepat dan cepat. Sebelum terjadi bencana kebakaran, ruangan tempat menyimpan arsip hendaknya dilengkapi oleh komponen tanggap bencana kebakaran, seperti *fire extinguisher* yang disesuaikan dengan jenis koleksi yang disimpan, *smoke detector*, *water sprinkler*, *oxygen reduction system* atau sistem pengendali kadar oksigen di dalam ruangan untuk mematikan api yang muncul dan *fire alarm*.

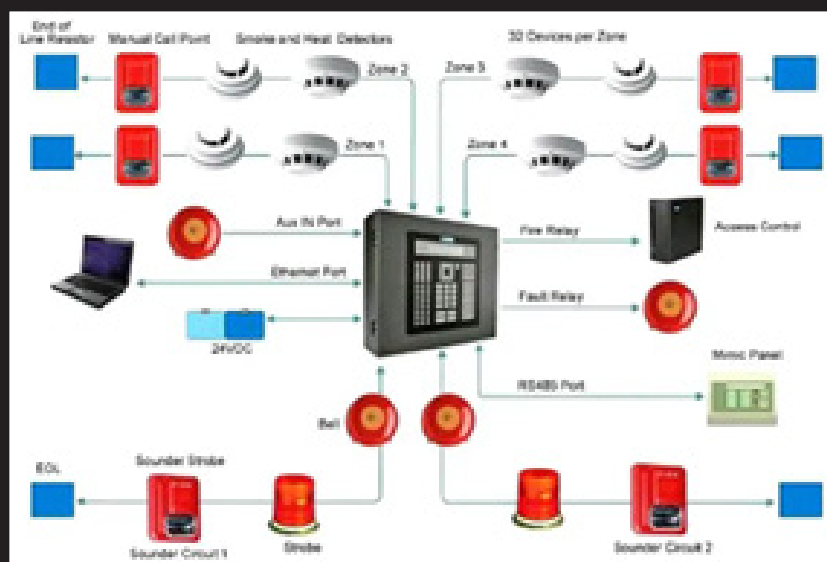
Semua kegiatan di atas hanya bisa diterapkan jika seluruh arsiparis dan pihak yang bekerja di suatu lembaga kearsipan memiliki kesadaran kebencanaan kolektif yang baik. Sering kali, kesadaran ini muncul setelah bencana kebakaran terjadi dan telah merusak keseluruhan dari arsip dan koleksi. Hal ini sepatutnya tidak harus terjadi dengan melakukan *risk assessment* dari gedung tempat menyimpan arsip. *Risk assessment* ini dilakukan dengan melihat resiko apa saja yang akan terjadi, seperti resiko dari struktur bangunan, resiko dari arsip atau koleksi yang disimpan, resiko dari luar bangunan dan resiko dari manusia. Resiko ini hendaknya dapat dipetakan dengan baik, sehingga seluruh persiapan yang dilakukan dapat mengacu pada resikonya dan akan tepat guna dalam rangka menghindari kerusakan arsip di masa depan.

Disaster planning and response juga dapat diterapkan pada saat bencana kebakaran terjadi karena di dalam proses penyelamatan arsip dari bencana tersebut diperlukan *quick response* atau aksi cepat tanggap, dengan tujuan agar dampak bencana kebakaran pada arsip dapat dikurangi dan keselamatan arsiparis yang mengelola arsip dapat terjaga. Dengan perencanaan yang matang, sebuah lembaga kearsipan dapat mengetahui rencana penyelamatan dan beroperasi sesudah bencana terjadi. Penerapannya juga akan berdampak positif pada langkah penyelamatan dengan mengetahui skala prioritas

arsip yang diselamatkan, sehingga proses penyelamatannya akan cepat dan terorganisir. Di dalam kerangka *Disaster planning and response* diatur juga mengenai proses penyelamatan yang benar, yakni dengan metode amati, catat dan rencanakan. Pada saat bencana kebakaran terjadi misalnya, seluruh *response team* pertama-tama dapat mengamati dan mengidentifikasi dampak kerusakan pada arsip dan koleksi yang disimpan sembari mencatat arsip dan koleksi mana yang rusak dengan mengacu pada daftar arsip untuk mengetahui nilai arsip dan koleksi dan skala prioritas penyelamatan yang dilihat dari jenis kerusakannya. Di proses ini, mereka juga dapat mengambil foto dan membuat laporan kerusakan untuk nantinya dapat digunakan dalam menyusun rencana penyelamatan.

Rencana penyelamatan ini

mencakup lokasi penyelamatan arsip dan koleksi terdampak, metode penyelamatan, urutan penyelamatan berdasarkan tingkat kerusakan atau skala prioritas, dan pembagian kerja. Selama proses ini tidak boleh dilakukan pemindahan dan penyelamatan arsip terlebih dahulu untuk mencegah kerusakan arsip dari kesalahan proses penyelamatan, contohnya ketika kita mengambil arsip dan terdampak, kita sebelumnya harus mengetahui dimana arsip itu akan diletakkan dan harus diperhatikan juga cara mengambil arsip yang benar, yaitu dengan menggunakan kedua tangan. Selain itu, Alat Pelindung Diri (APD) wajib digunakan untuk melindungi arsiparis yang ikut dalam proses penyelamatan. Tanpa APD yang lengkap, keselamatan arsiparis dapat terancam dan akan menghambat proses penyelamatan.



Gambar 1. Fire alarm system
Sumber: <https://instrumentationtools.com/fire-alarm-system/>

¹ Tabel jumlah peristiwa kebakaran menurut benda yang terbakar dan kota administrasi di provinsi DKI Jakarta tahun 2018 – 2021, sumber: <https://jakarta.bps.go.id/indicator/27/627/1/jumlah-peristiwa-kebakaran-menurut-benda-yang-terbakar-dan-kota-administrasi-di-provinsi-dki-jakarta.html>

² Undip Institutional Repository, sumber: http://eprints.undip.ac.id/48018/1/Bab_1.pdf

³ Disaster Preparedness and Mitigation in Indonesia: A Narrative Review, Ayuningtyas et al, <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8643537/>



Setelah rencana penyelamatan ini disusun dengan matang, seluruh arsiparis dapat turun langsung dalam proses penyelamatan dan sebaiknya proses ini dapat direkam dengan baik untuk penyusunan kerangka perlindungan arsip di masa depan dan dokumentasi. Penting juga untuk diketahui bahwa suatu lembaga kearsipan dapat terus beroperasi pada saat kebakaran terjadi dengan melakukan kerja sama dengan lembaga terkait, contohnya dinas pemadam kebakaran setempat, lembaga kearsipan lain, media masa dan pihak lainnya untuk mendapatkan bantuan dan supervisi, sehingga seluruh proses penyelamatannya dapat dilakukan dengan baik. Lembaga kearsipan juga hendaknya masih bisa memberikan layanan kearsipan ke pada masyarakat dengan membangun lokasi kerja dan layanan sementara selama proses penyelamatan dilakukan.

Terakhir, *disaster planning and response* juga dapat diterapkan sesudah bencana terjadi, yakni pada saat proses pemulihan. Proses pemulihan adalah sekumpulan kegiatan yang dilakukan untuk menstabilkan kondisi lembaga kearsipan pasca bencana. Tujuannya adalah lembaga kearsipan terdampak dapat mengembalikan keadaan menjadi normal Kembali dan dapat terus beroperasi seperti sebelumnya. Di dalam proses pemulihan ini, suatu lembaga kearsipan yang memiliki pengetahuan *disaster planning and response* yang matang akan mengetahui bagaimana cara membangun kembali gedung dan fasilitas yang terdampak dengan melakukan kerjasama lanjutan untuk pengumpulan dana. Dokumentasi yang dilakukan pada saat terjadi

Sumber

Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta (2021). Jumlah Peristiwa Kebakaran menurut Benda yang Terbakar dan Kota Administrasi di Provinsi DKI Jakarta 2018 – 2021. sumber: <https://jakarta.bps.go.id/indicator/27/627/1/jumlah-peristiwa-kebakaran-menurut-benda-yang-terbakar-dan-kota-administrasi-di-provinsi-dki-jakarta.html>

Organizational Resilience. 5 Phases of Emergency Management. Sumber: <https://www.unr.edu/organizational-resilience/phases>

Ayuningtyas et al. (2021). *Disaster Preparedness and Mitigation in Indonesia: A Narrative Review*. Sumber: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8643537/>

Forde & Rhys-Lewis. (2013). *Preserving Archives*. Facet Publishing.

Balloffet & Hille. (2005). *Preservation and Conservation for Libraries and Archives*. American Library Association, Chicago.

Kesadaran masyarakat Indonesia terhadap bencana masih rendah. (Jurnal Undip, 2015) sumber: http://eprints.undip.ac.id/48018/1/Bab_1.pdf

bencana akan dapat dijadikan acuan dalam proses pembangunan gedung yang dilengkapi dengan fasilitas dan alat pelindung. Selain itu, dapat juga disusun rencana evakuasi dan penyelamatan arsip yang baru berdasarkan temuan yang terjadi pada proses penyelamatan untuk melengkapi dan memperkaya isi rencana. Seluruh pengalaman dan rencana nantinya akan dapat digunakan untuk sosialisasi terhadap lembaga kearsipan lainnya, agar pengetahuan kolektif tentang mitigasi bencana kebakaran dapat terbentuk dan tindakan pencegahannya dapat dilakukan sedini mungkin. Pengetahuan kolektif ini akan membangun kesadaran arsiparis guna mencegah bencana ini di masa mendatang.

MANAJEMEN KEARSIPAN NASA:

TRILIANA KURNIASARI

SEJARAH & PRAKTIKNYA

NASA (The National Aeronautics and Space Administration) atau Badan Penerbangan dan Antariksa dikenal sebagai lembaga independen Amerika Serikat (AS) yang bertanggung jawab atas program luar angkasa sipil, serta penelitian aeronautika dan luar angkasa.

Sejak didirikan tahun 1958, NASA diketahui telah beberapa kali berkontribusi dalam persaingan global dan mampu mendorong perkembangan industri luar angkasa yang ada di AS. Siapa yang tidak kenal dengan keberhasilan misi luar angkasa pertama, Apollo 11, yang mendarat di bulan pada Juli 1969? Atau yang terbaru, misi luar angkasa Ekspedisi 71 yang telah berlangsung sejak 5 April 2024 dan berakhir pada September 2024. Dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan, NASA berhasil menyediakan data-data penting seputar perubahan iklim hingga observasi bumi melalui satelit dan stasiun luar angkasa.

Dalam perjalanannya, NASA juga mengembangkan manajemen kearsipan yang berfungsi untuk melestarikan dan menyediakan material-material tentang sejarah, organisasi dan aktivitas NASA secara lebih luas. Banyak arsip penting yang sifatnya umum tersimpan di Kantor Pusat Arsip NASA yang terletak di Gedung Mary W. Jackson, Washington, D.C. termasuk di

antaranya dokumen tertulis, gambar diam dan bergerak, serta rekaman suara. Koleksi arsip tersebut diatur dalam sebuah koleksi dan seri dari berbagai sumber dan topik terkait NASA termasuk administrasi, anggaran, personal, sarana prasarana, mitra kerja federal dan internasional, naskah sumber, seperti naskah subjek atau biografi.

Sementara koleksi arsip yang sifatnya lebih spesifik tersimpan di dua lokasi yang berbeda, yakni Pusat Penelitian Ames dan Laboratorium Tenaga Penggerak Mesin Jet. Pada Pusat Penelitian Ames yang terletak di Silicon Valley, California, tersimpan dokumen perjalanan berdirinya Ames tahun 1939 hingga sekarang. Ames memiliki sejarah yang lekat dengan NACA (The National Advisory Committee for Aeronautics) yang berdiri pada 1915 karena perannya sebagai laboratorium penerbangan dan menjadi pusat penelitian tertua kedua setelah Pusat Penelitian Langley. Koleksi arsip yang tersimpan di sini bisa dijadikan sebagai sumber bukti dalam berbagai jenis format, terkait dengan manajemen NASA,

kompetensi, kebudayaan, aktivitas, pencapaian, asal-usul, evolusi, fasilitas, hingga informasi tentang personil.

Lokasi terakhir, Laboratorium Tenaga Penggerak Mesin Jet di La Cañada Flintridge, California diketahui telah mengumpulkan dan melestarikan arsip yang tercipta mulai dari misi roket dan kerja misil sekitar tahun 1930-an dan berlanjut hingga misi tanpa awak NASA ke planet lain. Arsip tentang desain instrumen, pembangunan dan pengelolaan pesawat luar angkasa, misi observasi bumi, sistem jaringan luar angkasa, dan peran laboratorium dalam misi ke bulan, semuanya tersimpan di sini.

Semua jenis arsip yang tersimpan di ketiga lokasi ini diciptakan dan dikumpulkan oleh individu, atau melalui pelaksanaan proyek dan pengadaan kantor. Bentuknya bisa berupa arsip kertas, audio visual, mikrografis, dan media elektronik yang kemudian diolah sebagai sumber informasi. Informasi sebagai salah satu bentuk arsip, adalah sumber penting yang berguna untuk memastikan keberhasilan

program-program luar angkasa dan memelihara sejarahnya. Arsip-arsip tersebut bisa diakses secara online melalui finding aids, guides dan koleksi yang selalu diperbarui setiap saat.

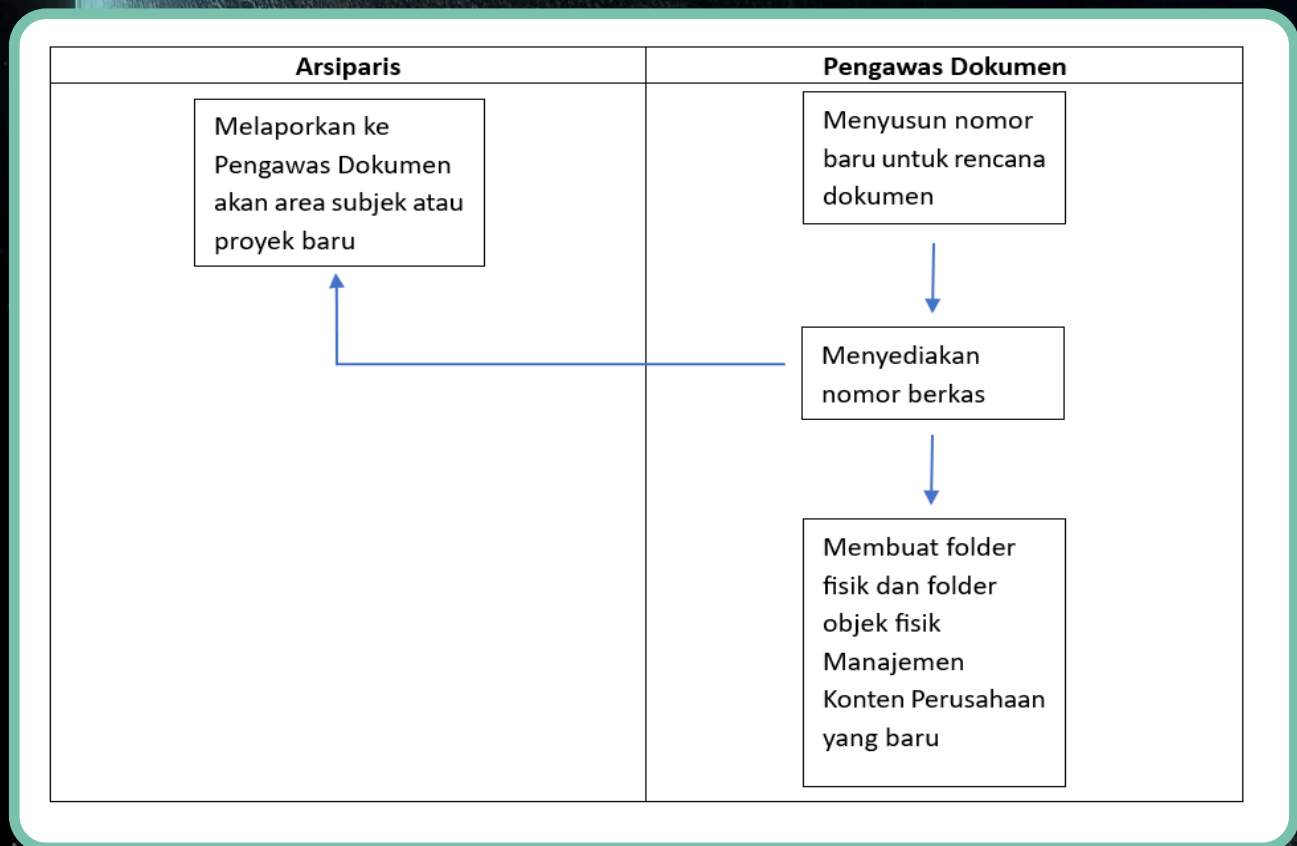
Adapun manajemen kearsipan NASA didirikan dengan beberapa tujuan, yakni pertama untuk memudahkan pengelolaan arsip dinamis dan inaktif yang tersedia kapan pun bagi para pekerja. Tujuan kedua adalah untuk memelihara arsip-arsip penting bagi para teknisi di masa depan dan untuk sejarah bangsa. Ketiga, manajemen kearsipan NASA juga melakukan tindakan penting lainnya berupa pemusnahan arsip yang tidak dianggap penting. Beberapa sumber arsip yang tersedia di kantor pusat NASA berasal dari

Lembaga Arsip Nasional AS hingga Perpustakaan Kongres AS. Selain itu, sumber lainnya berasal dari Pusat Arsip Federal sebagai fasilitas penyimpanan yang dikelola oleh Arsip Nasional dan Administrasi Rekaman (NARA) yang menyajikan arsip-arsip inaktif dan semi-aktif milik Pemerintah Federal.

Secara teknis, Manajemen Kearsipan NASA menjalankan sebuah Prosedur Sistem Level dalam Persyaratan Program Manajemen Arsip untuk membangun dan menjaga keutuhan prosedur yang tersimpan, serta menggambarkan bagaimana cara mengidentifikasi, menyimpan, menjaga, menarik, mempertahankan dan mendisposisi arsip secara aman. Prosedur Sistem Level tersebut diaplikasikan pada arsip dan

turunannya berupa Arsip Standar Mutu yang digunakan dalam program keselamatan NASA. Dalam prosedur ini ada yang namanya Catatan Berkas dan Rencana Berkas, di mana keduanya digunakan selayaknya pedoman mutu standar pelayanan arsip. Catatan Berkas merupakan daftar fisik arsip yang dikelola oleh arsiparis untuk membantu mengidentifikasi, menyusun, menyimpan, dan mengambil kembali arsip. Catatan ini juga mengurutkan arsip (baik arsip fisik dan elektronik) yang telah dimusnahkan (dihapus, dihancurkan, disalin, dan habis masa retensinya). Sedangkan Rencana Berkas adalah daftar kategori arsip yang berdasarkan Skema Pemberkasan Agensi diberikan nomor dengan masing-masing

Diagram Proses Pemberkasan Proyek Baru NASA



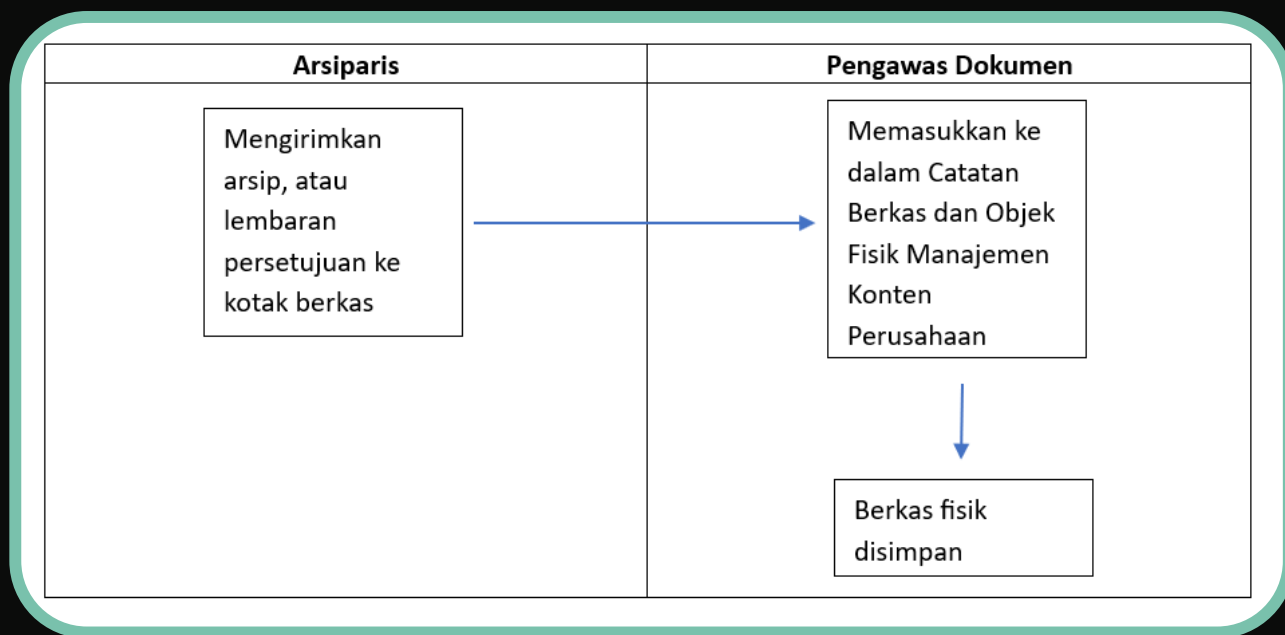
periode retensinya. Rencana berkas ini digunakan oleh petugas arsip untuk menudukung penomoran, pemberkasan, pemilahan, dan mempertahankan arsip.

Lebih lanjut, diagram berikut ini menunjukkan proses yang menggambarkan dokumen serta tanggung jawab dan tindakan yang biasa dilakukan oleh para arsiparis di dalam NASA. Dalam diagram tersebut, terlihat bahwa untuk mempersiapkan penyimpanan arsip, arsiparis harus melaporkan pada Pengawas Dokumen akan adanya proyek atau subjek baru. Selanjutnya, Pengawas Dokumen menyusun nomor berkas berdasarkan Rencana Berkas dan Persyaratan Prosedural NASA.

Untuk aspek penyimpanan arsip, arsiparis NASA bertanggung jawab memastikan kualitas arsip yang disimpan di Kantor Pusat NASA, Pusat Penelitian Amer, dan Laboratorium Tenaga Penggerak Mesin Jet. Seperti halnya praktik penyimpanan arsip yang dilakukan di negara lain, ada beberapa kemiripan praktik yang dijalankan dalam manajemen kearsipan NASA, contohnya dalam penomoran berkas. Arsiparis wajib memberikan nomor berkas dan mengisi Formulir 1009 tentang Abaikan dan Setujui Permintaan, dan/atau Formulir 1007 tentang Lembaran Persetujuan. Arsiparis menyediakan satu kotak pemberkasan yang diletakkan di

Gedung 1 Kantor Administrasi NASA dan satu lagi di Gedung 2 (lantai 2) Pos Jaga Keamanan. Untuk mengakses penyimpanan arsip, arsiparis harus melihat kembali ke dalam Rencana Berkas dan Catatan Berkas agar mendapatkan nomor dan nama berkas arsip fisik. Catatan Berkas juga memiliki nama berkas atas arsip fisik yang dimusnahkan bersamaan dengan tanggal pemusnahan arsip. Untuk mengakses arsip elektronik, arsiparis dapat melihat rencana berkas untuk mendapatkan lokasi arsip elektronik. Catatan Berkas harus menyajikan nama berkas arsip yang sudah dimusnahkan termasuk tanggal pemusnahannya.

Diagram Proses Penyimpanan Arsip NASA



Selanjutnya untuk perlindungan arsip, Manajemen Kearsipan NASA mempersiapkan proses perlindungan arsip baik untuk arsip fisik dan arsip elektronik. Melalui Pengawas Dokumen akan dipastikan bahwa

arsip fisik yang ada pada sistem pemberkasan Gedung 1 disimpan sesuai dengan suhu dan kelembaban yang terkontrol sehingga arsip tidak mudah rusak. Semua elemen pencipta arsip didorong untuk memasukkan

arsip-arsipnya demi keamanan, terutama saat kegiatan sudah selesai. Sedangkan untuk arsip elektronik, Pemilik Sistem Informasi wajib memastikan keamanan, ketersediaan dan keautentikan arsip elektronik.

Sistem cadangan penuh akan dilakukan setiap minggu dan sistem ini akan ditambah bertahap setiap malam. Cadangan ini diuji secara periodik untuk memastikan mereka tetap berfungsi dan keamanan data terjaga.

Praktik lain yang juga dilakukan oleh Manajemen Kearsipan NASA ialah proses retensi arsip, di mana arsip wajib dikelola sesuai dengan syarat retensinya sesuai dengan yang disebutkan dalam seksi Arsip sesuai Prosedur Sistem Level. Pemberian periodisasi retensi ini diberikan oleh Pengawas Dokumen berdasarkan Rencana Berkas dengan memastikan syarat retensi masing-masing arsip secara berkala. Jika arsip telah memenuhi masa aktif kegunaannya namun belum memenuhi waktu retensi, maka Pengawas Dekomen wajib menghubungi Manajer Pusat Arsip untuk menentukan opsi penyimpanan yang tersedia dan biaya yang harus dikeluarkan hingga tiba waktunya untuk pemusnahan.

Keseluruhan praktik pengelolaan arsip yang dilakukan oleh Manajemen Kearsipan NASA terangkum dalam konsep kerangka kerja siklus hidup arsip yang sudah diterapkan sejak awal pendiriannya. Konsep ini mampu menjaga proses kelembagaan dengan memastikan pengelolaan arsip dan aset informasi berjalan dengan baik. Penggunaan berbagai praktik pengelolaan arsip untuk berbagai fase yang berbeda dalam siklus hidup arsip yang juga berguna untuk mengelola syarat prosedural NASA, yang disusun untuk mengarahkan para pekerja NASA dalam membangun manajemen kearsipan yang efektif baik di level Kantor Pusat dan Cabang. Proses ini harus tetap dapat diimplementasikan secara fleksibel sehingga dapat mendukung kinerja program masing-masing kantor.

FOTO: FREEPIK.COM

Sitty Annisaa

Semangat Memajukan Penyelenggaraan Kearsipan di Provinsi Sumatera Selatan

Dikenal sebagai Bumi Sriwijaya, Provinsi Sumatera Selatan merupakan wilayah dengan kaya akan sejarah yang sangat penting untuk diketahui serta dipelajari oleh berbagai kalangan masyarakat. Pada sekitar abad ke-7 hingga abad ke-12 Masehi, wilayah yang berada di Selatan Pulau Sumatera ini merupakan pusat Kerajaan Sriwijaya yang terkenal sebagai kerajaan maritim terbesar dan terkuat di Nusantara. Tidak hanya situs yang dapat dikunjungi langsung oleh masyarakat, tapi arsip sebagai rekaman peristiwa sejarah juga penting untuk diketahui dan dipelajari oleh masyarakat agar memperkuat memori kolektif bangsa Indonesia.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan dan Museum Pahlawan Nasional Mayjen TNI (Purn) dr. A.K.Gani telah berupaya mengusulkan khazanah arsip dr. A.K.

Gani sebagai memori kolektif bangsa. Kemudian upaya ini membuahkan hasil karena Khazanah Arsip dr. A.K. Gani “Pioneer Aviation Corp. N.V.” Perintis Penerbangan Swasta di Indonesia (1951-1957) telah ditetapkan sebagai memori kolektif bangsa oleh Dewan Pakar Memori Kolektif Bangsa. Penghargaan ini diserahkan pada momentum Puncak Peringatan Hari Kearsipan ke-53 di Samarinda, Kalimantan Timur yang diselenggarakan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia.

Penyelenggaraan kearsipan di Provinsi Sumatera Selatan tidak sebatas menyelamatkan memori kolektif bangsa. Namun, menjamin ketersediaan arsip, perlindungan kepentingan negara, hingga pelayanan publik juga menjadi perhatian utama dalam pembangunan bidang kearsipan di Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini juga sesuai

dengan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki visi “Terwujudnya Sumatera Selatan Sejahtera, Unggul, dan Terdepan.” Dalam hal ini Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan, serta mendinamiskan sistem kearsipan. Dinas Kearsipan juga membangun bidang kearsipan dengan tujuan peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang kearsipan dengan melakukan penetapan kebijakan, pembinaan kearsipan, serta pengelolaan arsip sesuai dengan kewenangan daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

Sebagai pembina dan penyelenggara bidang kearsipan di Provinsi Sumatera Selatan, Dinas

Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan telah menentukan isu-isu strategis yang dilakukan agar penyelenggaraan kearsipan dapat berjalan dengan baik. Isu-isu ini juga menjadi tantangan dalam mewujudkan peningkatan kapasitas manajemen pemerintahan yang sesuai dengan misi Provinsi Sumatera Selatan. Adapun isu strategis yang dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

- Jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan dan memenuhi proses bisnis aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) meningkat;
- Keaktifan dan pemenuhan ketersediaan khazanah arsip yang dapat diakses oleh publik melalui Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN);
- Meningkatnya tingkat kepatuhan perangkat daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam penyelenggaraan kearsipan;
- Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber daya pengelolaan kearsipan guna mewujudkan sistem tata kearsipan; serta
- Isu regulasi atau kebijakan.

Guna mewujudkan hal tersebut, lembaga kearsipan daerah (LKD) yang mandiri ini mengeluarkan inovasi sebagai langkah nyata agar bidang kearsipan tidak hanya bisa dimanfaatkan bagi perangkat daerah atau pemangku kepentingan, namun juga dapat bermanfaat bagi masyarakat umum. Mengacu pada pelayanan publik, Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan melakukan inovasi:

- Podcast kearsipan. Melalui kanal Youtube ARSIPKOE Official, Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan hadir untuk menyampaikan informasi, opini, serta tanya jawab seputar kearsipan dengan narasumber dari berbagai kalangan, mulai dari insan kearsipan, sejarawan, budayawan, hingga masyarakat umum.
- Revitalisasi Mobil Layanan Sadar Arsip dan Pameran Kearsipan. Diseminasi arsip-arsip yang ada di Provinsi Sumatera Selatan secara langsung kepada masyarakat di lokasi strategis, sehingga menjangkau masyarakat luas.
- Sistem Informasi Kunjungan Kearsipan atau Si Datang. Demi menciptakan layanan publik yang baik dan berkualitas, Dinas Kearsipan memastikan masyarakat mudah untuk merencanakan dan berkunjung untuk mengakses arsip dan/atau kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan kearsipan.
- Penghargaan bagi Kabupaten/ Kota dan OPD dalam pengelolaan arsip sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bahkan, perangkat daerah dengan nilai rendah juga diumumkan, sebagai upaya motivasi agar pengelolaan arsip meningkat lebih baik lagi.
- *Counterpart* dan *helpdesk* penyelenggaraan kearsipan.
- Akuisisi Arsip dengan cara Kunjungan dan Elaborasi melalui Rencana yang Terealisasi (AKU KEREN). Kegiatan ini telah mendapat atensi dari masyarakat dengan diserahkannya beberapa arsip perseorangan

dari pelaku sejarah, serta tertariknya masyarakat secara daring yang dilihat melalui interaksi media sosial terkait inovasi yang dapat menambah khazanah arsip Provinsi Sumatera Selatan ini. Per Juli 2024, jumlah arsip statis yang dimiliki Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 23.000 berkas, sedangkan yang telah dibuatkan daftar arsip ada 12.012 berkas.

Pembinaan Kearsipan

Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan menjadi satu-satunya LKD yang berdiri sendiri. Menjadi dinas dengan beban tugas yang besar pula, Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan telah melengkapi struktur organisasi yang tercantum pada Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan. Dengan jumlah sumber daya manusia (SDM) mencapai 51 orang, termasuk Arsiparis Ahli Utama berjumlah 2 orang, Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan berupaya untuk terus berbenah, salah satunya dengan melaksanakan pembinaan kearsipan, baik bagi OPD maupun masyarakat umum.

Dengan menempatkan para arsiparis sebagai *counterpart* pembinaan kearsipan, pembinaan yang dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan berupa pemberian bimbingan teknis kepada OPD dan pelayanan konsultasi kearsipan.

Dinas Kearsipan juga melaksanakan sosialisasi ataupun publikasi mengenai pentingnya pengelolaan arsip yang baik dan benar. Hal ini juga demi terwujudnya tertib arsip di Provinsi Sumatera Selatan.

Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan juga memberikan kesempatan bagi peserta magang, baik dari organisasi pendidikan maupun nonpendidikan untuk dapat praktik kerja pengelolaan arsip sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dari sektor pendidikan, praktik kerja (*on the job training*) tidak hanya berlaku bagi siswa, namun juga terbuka bagi pegawai Tata Usaha, guru, serta penguji pada kegiatan Uji Kompetensi Keahlian di Sekolah Menengah Kejuruan. Oleh karena itu, tindak lanjut pembinaan dan sosialisasi di sektor pendidikan adalah terwujudnya kerja sama dalam bentuk nota kesepahaman (*Memorandum of Understanding*).

Dengan dilaksanakannya pembinaan kearsipan, diharapkan masyarakat dapat memahami pentingnya arsip, sehingga dapat menyelamatkan arsip yang sangat berguna bagi kehidupan perseorangan, organisasi, masyarakat, bangsa, dan negara. Melalui pembinaan kearsipan, setiap orang dapat menjadi kader arsip atau relawan cinta arsip yang dapat menyebarkan pemahaman pentingnya manfaat pengelolaan arsip tersebut kepada masyarakat luas.

Mengenalkan Sejarah Provinsi Sumatera Selatan

Dalam perjalanannya dalam mengemban tugas dan fungsi sebagai pembina dan penyelenggara kearsipan di Provinsi Sumatera Selatan. Kepala Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan, Tarbiyah Yahya menyampaikan bahwa dalam





FOTO: DOK. HUMAS ANRI



FOTO: DOK. HUMAS ANRI

melaksanakan penyelenggaraan kearsipan tidak terlepas dari kendala atau hambatan. Dalam rangka penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik misalnya, pada penggunaan aplikasi SRIKANDI sering terjadi gangguan karena jaringan yang kurang baik. Selain itu, kurangnya perhatian terhadap arsip masih dirasakan oleh Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan. Masih banyak masyarakat yang belum sadar pentingnya untuk mencadangkan (*back up*) data atau dokumen pribadi ke dalam format digital. Adapun dari sisi sumber daya pengelola kearsipan, kompetensi SDM kearsipan masih belum terpenuhi, khususnya bagi arsiparis dan pengelola arsip yang alih jabatan yang belum mendapatkan bimbingan teknis kearsipan.

Meskipun demikian, Tarbiyah Yahya tidak berkecil hati dan terus semangat dalam memajukan kearsipan di Provinsi Sumatera Selatan. Hambatan yang terjadi menjadi tantangan yang harus dihadapi demi pentingnya arsip, tertib arsip, hingga memori kolektif Provinsi Sumatera Selatan sampai kepada seluruh masyarakat.

Sebagai salah satu provinsi yang kaya akan sejarah, mengenalkan sejarah melalui arsip kepada masyarakat adalah usaha yang tidak mungkin ditinggalkan oleh Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan. Mulai dari kanal media sosial hingga pameran kearsipan, diseminasi terus dilakukan. Melalui Bidang Layanan dan Pemanfaatan Arsip, Dinas Kearsipan Sumatera Selatan melaksanakan pameran kearsipan yang menyuguhkan arsip-arsip bersejarah yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Kegiatan pameran juga dilaksanakan pada momentum atau acara besar yang ada di Provinsi Sumatera Selatan dan tidak menutup kemungkinan pameran juga akan digelar di lokasi lainnya.

Sebagai langkah mengenalkan sejarah serta memajukan penyelenggaraan kearsipan, Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan memiliki program unggulan yang terus dilaksanakan hingga saat ini. Program unggulan yang dimaksud, di antaranya 1) Pendampingan ke Museum Dr. A. K. Gani dalam rangka program Memori Kolektif Bangsa; 2) Program penyelamatan Arsip Kedatuan Sriwijaya yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari LKD, akademisi, pakar sejarah, budayawan, pelaku sejarah, hingga masyarakat; 3) Dinas Kearsipan sebagai Laboratorium Belajar Masyarakat; 4) Program Arsip Goes to Campus/School guna meningkatkan kesadaran pentingnya arsip sejak dini.

Melalui upaya-upaya yang dilakukan, Tarbiyah Yahya berharap Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan melalui Bidang Layanan dan Pemanfaatan Arsip dapat dimanfaatkan untuk pembangunan berkelanjutan di setiap OPD, sehingga dapat meningkatkan pengelolaan arsip yang cepat, tepat, dan akurat, sesuai dengan konsep "*Sustainable Archiving for the Best Future* (Kearsipan yang Berkelanjutan untuk Masa Depan yang Terbaik)". Dengan pengelolaan arsip yang cepat, tepat, dan akurat akan mudah untuk menyajikan informasi yang lengkap, cepat, dan benar.

Penyelenggaraan kearsipan di Provinsi Sumatera Selatan juga diharapkan semakin baik dengan meningkatkan hasil pengawasan kearsipan, sehingga ketersediaan arsip yang autentik, utuh dan terpercaya dapat terjamin. Tidak hanya sebagai memori kolektif, namun ketersediaan arsip tersebut juga akan digunakan sebagai bahan atau sumber perencanaan dan pengambilan keputusan.

PERKEMBANGAN PEMULIHAN APLIKASI SRIKANDI : **BACKUP DATA TERSELAMATKAN PER 13 JUNI 2024**

Sejak terjadinya gangguan penggunaan Aplikasi sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) terhitung 20 Juni 2024 pukul 04:15 WIB, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) menyampaikan permohonan maaf kepada pengguna aplikasi SRIKANDI di lingkungan instansi pemerintah pusat dan daerah, atas ketidaknyamanan dan terhambatnya surat-menyurat serta kegiatan kearsipan lainnya di Aplikasi SRIKANDI.

Menyikapi gangguan tersebut, ANRI telah melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan. Hasilnya teridentifikasi bahwa berdasarkan temuan Tim Pusat Data Nasional sementara (PDNS) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), backup data yang terekam dari Aplikasi SRIKANDI tertanggal 13 Juni 2024, tetapi kemungkinan besar arsip yang tercipta pada aplikasi setelah tanggal tersebut tidak dapat diakses. Menyikapi hal ini, ANRI sedang dan terus bekerja keras bersama pemangku kepentingan untuk memastikan pemulihan layanan SRIKANDI dengan tetap mengutamakan keamanan arsip dan integritas sistem.

Merujuk pada keterangan resmi Kementerian Kominfo tentang dampak dan pemulihan PDNS, pada 30 Juni 2024 ANRI sudah mendapatkan sumber daya dari PDNS1. Selanjutnya Tim Teknis pengelola Aplikasi SRIKANDI melakukan proses pemulihan sistem yang cukup kompleks, sehingga diperkirakan akan memerlukan waktu antara 7 hingga 10 hari kalender, terhitung sejak tanggal 1 Juli 2024. Selama proses pemulihan ini, pengguna layanan SRIKANDI disarankan untuk:

1. Memantau pembaruan melalui situs resmi www.anri.go.id dan akun media sosial resmi ANRI untuk informasi terkini mengenai status pemulihan.

2. Meningkatkan kewaspadaan terhadap upaya penipuan atau *phishing* yang mungkin terjadi selama periode ini, dengan memastikan setiap informasi yang diterima bersifat resmi yang dikeluarkan ANRI.

3. Menggunakan alternatif, dengan cara:

- menggunakan aplikasi persuratan/pengelolaan arsip dinamis masing-masing instansi pemerintah yang telah dibangun sebelum adanya aplikasi SRIKANDI, selama layanan SRIKANDI belum bisa beroperasi;

- menggunakan layanan Tanda Tangan Elektronik (TTE) melalui fasilitas seperti panther dan untuk distribusi naskah menggunakan surat elektronik kedinasan;

- melakukan proses penciptaan (pembuatan naskah keluar dan penerimaan naskah masuk) secara manual dengan tetap memperhatikan keutuhan dan keautentikan arsip, serta registrasi/pencatatan arsip secara tertib. Terhadap arsip yang diciptakan tersebut dilaksanakan alih media/digitisasi sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku. Adapun pengiriman



ILUSTRASI

naskah dinas dapat dilakukan melalui surat elektronik (email) resmi instansi pemerintah pusat dan daerah melakukan proses penciptaan (pembuatan naskah keluar dan penerimaan naskah masuk) secara manual dengan tetap memperhatikan keutuhan dan keautentikan arsip, serta registrasi/pencatatan arsip secara tertib. Terhadap arsip yang diciptakan tersebut dilaksanakan alih media/digitisasi sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku. Adapun pengiriman naskah dinas dapat dilakukan melalui surat elektronik (*email*) resmi instansi pemerintah pusat dan daerah.

4. Setelah Aplikasi SRIKANDI

beroperasi kembali, data/arsip yang ada pada aplikasi persuratan/pengelolaan arsip dinamis masing-masing instansi pemerintah dan data/arsip yang sudah dialihmediakan/digitisasi harus diunggah pada fitur pemberkasan ke dalam aplikasi SRIKANDI.

ANRI menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada instansi pemerintah pusat dan daerah yang telah bersikap responsif serta mengambil langkah cepat dalam proses pemulihan, termasuk tetap menjalankan administrasi persuratan dan kearsipan dengan tertib walaupun layanan SRIKANDI mengalami gangguan. ANRI dan

pemangku kepentingan terkait akan terus berupaya melakukan proses pemulihan, sehingga layanan SRIKANDI dapat kembali berjalan normal. ANRI juga mengapresiasi atas kesabaran dan pengertian seluruh pengguna di instansi pemerintah pusat dan daerah selama masa pemulihan ini. ANRI terus berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik, dengan terus berupaya mengurangi dampak gangguan ini bagi seluruh pengguna. Jika dibutuhkan informasi lebih lanjut atau para pengguna membutuhkan bantuan atas berbagai pertanyaan, disilakan untuk menghubungi layanan pelanggan melalui helpdesk SRIKANDI <https://layanan.arsip.go.id>. ■

ILUSTRASI: FREEPIK.COM



Oleh: Rayi Darmagara

**PERKUAT SUMBER DAYA
MANUSIA KEARSIPAN**

**ANRI MENETAPKAN
PERATURAN TENTANG
PELATIHAN KEARSIPAN
DAN SURAT EDARAN UJI
KOMPETENSI**

Kualitas sumber daya manusia merupakan kunci keberhasilan masa depan bangsa. SDM yang unggul dan berdaya saing akan mengantarkan Indonesia sejajar dan disegani bangsa lain (B.J Habibie Presiden Ke-3 Republik Indonesia). Tentu kalimat tersebut merupakan kalimat yang sangat relevan untuk memberikan pemahaman bahwa sumber daya manusia merupakan pilar penting dalam kesuksesan sebuah entitas dan program termasuk pelaksanaan penyelenggaraan kearsipan.

Sumber Daya Manusia Kearsipan merupakan unsur penting pendukung terciptanya penyelenggaraan kearsipan. Sumber daya manusia kearsipan itu sendiri terdiri atas pejabat struktural di bidang kearsipan, arsiparis dan fungsional umum di bidang kearsipan. Sebagai syarat pelaksana penyelenggara kearsipan, Sumber Daya Manusia Kearsipan memerlukan pengembangan guna memiliki kompetensi dan profesionalitas di bidang kearsipan.

Dalam ilmu manajemen kita mengenal “*man*” (manusia) yang merupakan unsur yang krusial terutama dalam memajukan organisasi. Setiap organisasi pasti memerlukan sumber daya manusia yang unggul agar target tercapai. Manajemen dalam bidang manusia mencakup semua hal yang bisa mendatangkan kemajuan usaha. Berdasarkan *Encyclopedia Britannica*, manusia dibutuhkan untuk melakukan pengoperasian sehingga memiliki peran yang penting dalam organisasi. Dalam hal ini, kompetensi SDM memiliki peran yang sangat menentukan dalam upaya mengubah dan meningkatkan kinerja organisasi.

Pentingnya kompetensi sumber

daya manusia kearsipan juga diperkuat dengan pendapat Handayani (2018) bahwa untuk memiliki sumber daya manusia yang cakap dalam bidang kearsipan maka dibutuhkan latar belakang yang memadai dan kompetensi untuk mendukung di bidang kearsipan. Tidak hanya itu, upaya peningkatan kompetensi juga dilakukan agar sumber daya manusia dapat melakukan tugas dengan baik.

Salah satu bentuk pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia Kearsipan adalah melalui pendidikan dan pelatihan kearsipan yang berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil telah terdapat pembagian pengembangan kompetensi dalam bentuk pendidikan dan/ atau pelatihan. Pengembangan kompetensi dalam bentuk pendidikan sebagaimana dimaksud dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian PNS melalui pendidikan formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaksanakan dengan pemberian tugas belajar. Sedangkan Pengembangan kompetensi dalam bentuk pelatihan dilakukan melalui jalur pelatihan klasikal dan nonklasikal. Pengembangan kompetensi dalam bentuk pelatihan klasikal sebagaimana dilakukan melalui proses pembelajaran tatap muka di dalam kelas, paling kurang melalui pelatihan, seminar, kursus, dan penataran. Pengembangan kompetensi dalam bentuk pelatihan nonklasikal dilakukan paling kurang melalui *e-learning*, bimbingan di tempat kerja, pelatihan jarak jauh, magang, dan pertukaran antara PNS

dengan pegawai swasta.

Atas dasar pada kebijakan dalam bidang Manajemen Pegawai Negeri Sipil tersebut, bentuk kebijakan dibidang pengembangan kompetensi oleh instansi pembina jabatan fungsional disebut sebagai pelatihan. Jika merujuk dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pendidikan dan pelatihan kearsipan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan semangat pengabdian untuk dapat melaksanakan tugas jabatan di bidang kearsipan, menciptakan sumber daya manusia kearsipan yang memenuhi persyaratan kompetensi di bidang kearsipan; dan menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas di bidang kearsipan.

1. Pengaturan tentang Pelatihan Kearsipan

Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan memberikan amanat delegasi teradap ketentuan lebih lanjut mengenai jenjang, kurikulum, metode, dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional arsiparis dan pendidikan dan pelatihan teknis kearsipan diatur dengan Peraturan Kepala ANRI. Pengaturan mengenai pendidikan dan pelatihan sendiri sebenarnya sudah lebih dahulu diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan sebagai bentuk tanggung jawab ANRI sebagai penyelenggara kearsipan

nasional, Untuk mempertinggi mutu penyelenggaraan kearsipan nasional tersebut, penyelenggara kearsipan nasional melakukan penelitian dan pengembangan serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kearsipan.

Sebelumnya pelaksanaan teknis terhadap pendidikan dan pelatihan diatur dalam Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1244) yang mencabut Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 12A Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Arsiparis dan Peraturan Kepala ANRI Nomor 6A tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Penjenjangan Arsiparis Tingkat Terampil ke Arsiparis Tingkat Ahli. Pada ketentuan tersebut lebih mengedepankan metode pembelajaran yang sifatnya tatap muka langsung baik pembelajaran di dalam kelas ataupun pembelajaran di luar kelas. Kemudian kebutuhan jenis pendidikan dan pelatihan serta kurikulum menjadi bagian lampiran peraturan ini memberikan kecurangan luasaan dalam melakukan perubahan kurikulum yang sifatnya dinamis.

Sejak era tahun 2020 dimana covid-19 menjadi pandemi dalam segala aspek kehidupan, terjadi pergeseran kegiatan pelatihan yang sebelumnya tatap muka langsung menjadi dalam jaringan. Menindaklanjuti permasalahan tersebut, Lembaga Administrasi Negara (LAN) menerbitkan kebijakan dalam bentuk Surat

Edaran (SE) Nomor 10/k.1/hkm.02.3/2020 tentang Panduan Teknis Penyelenggaraan Pelatihan dalam Masa Pandemi *Coronavirus Disease* (covid-19) tanggal 23 Maret 2020 yang merupakan penguatan dari Surat Edaran yang telah terbit sebelumnya No. 7/K.1/HKM.02.3/2020 tentang Kewaspadaan dan Pencegahan Penularan Infeksi Corona Virus dalam Penyelenggaraan Pelatihan, tanggal 14 Maret 2020. Untuk mengimplementasikan Surat Edaran tersebut, maka sejak tanggal 01 Juni 2022, berdasarkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2022 diperkenalkan kurikulum baru dalam pelatihan yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara yaitu melalui moda Klasikal, Blended dan distance learning.

Selain itu, kehadiran Masyarakat 5.0 di tengah pandemi yang kini memasuki era adaptasi kebiasaan baru membawa sebuah tantangan baru bagi Aparatur Sipil Negara, diantaranya yaitu penerapan lingkungan kerja berbasis digital, pengelolaan big data serta pengembangan profesionalitas secara mandiri. Menghadapi adaptasi kebiasaan baru dan *society* 5.0 dimana pelatihan dapat dilaksanakan secara *blended*. Baik luar jaringan maupun melalui pembelajaran jarak jauh (*distance learning*). Menurut Suseno (Peran Baru Widyaiswara di Era Pembelajaran Berbasis Digital) dalam jurnal Good Governance Volume 19 No. 1, Maret 2023, terdapat perubahan paradigma dari *training* menjadi *learning* turut merubah pendekatan yang digunakan dalam pelatihan. Apabila

sebelumnya pendekatan pelatihan yang digunakan yaitu *andragogy* maka pada *society* 5.0 di masa adaptasi kebiasaan baru yang menjadi trend yaitu pendekatan *Heutagogy*. Esensi *heutagogy* adalah bahwa dalam beberapa situasi pelatihan, fokusnya harus pada apa yang peserta pelatihan ingin pelajari dan bagaimana cara belajarnya, bukan pada apa yang akan diajarkan.

Sehingga muncul media pembelajaran yang lebih variatif yang diperlukan dalam mendukung proses pembelajaran seperti *telegram*, *google classRoom*, *podcast*, *e-book*, *e-journal*, *zoom meeting*, *zoom webinar*, kanal *youtube*, *hypermedia* dan sebagainya. Metode pembelajaran pun perlu lebih banyak pengayaan seperti seperti *coaching*, *mentoring*, *on the job training*, *community of practice*.

Kebijakan tersebut membuat arah baru bagi penyelenggara pelatihan pada masing-masing instansi Pembina, termasuk ANRI sebagai pembina jabatan fungsional arsiparis yang akhirnya menerbitkan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Kearsipan yang diundangkan pada tanggal 28 Mei 2024 dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 278. Dalam peraturan ANRI ini yang dimaksud dengan Pelatihan Kearsipan adalah proses terencana untuk memodifikasi pengetahuan, keterampilan dan sikap berkenaan dengan arsip melalui kegiatan belajar mengajar secara klasikal maupun non-klasikal. Peraturan ANRI ini merupakan pedoman bagi

pencipta arsip, lembaga kearsipan, unit kearsipan, dan lembaga penyelenggara pelatihan kearsipan penyelenggaraan pelatihan kearsipan yang dilaksanakan dalam rangka pengembangan kompetensi.

Secara umum peraturan ANRI ini mengatur tentang pelatihan fungsional arsiparis, pelatihan teknis kearsipan, pelatihan pimpinan organisasi kearsipan, fasilitator pelatihan kearsipan, prasarana dan sarana, surat keterangan pelatihan kearsipan, pemantauan dan evaluasi, serta pembiayaan. Ketentuan ini memberikan efektivitas untuk pelatihan dapat dilaksanakan oleh ANRI dan/atau lembaga pelatihan yang terakreditasi. Bagi lembaga penyelenggara pelatihan kearsipan yang belum terakreditasi dapat menyelenggarakan pelatihan kearsipan melalui kerja sama dengan ANRI berdasarkan standar dan penjaminan mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kemudian standar dan penjaminan mutu pelatihan kearsipan tersebut ditetapkan dengan Keputusan Kepala ANRI.

Jenis pelatihan fungsional arsiparis, pelatihan teknis kearsipan, pelatihan pimpinan organisasi kearsipan telah mengakomodir cara pelatihan dengan adaptasi kebiasaan baru dan *society 5.0* yaitu melalui cara klasikal, nonklasikal, dan terpadu. Begitu pula peserta pelatihan telah sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 bahwa Sumber daya manusia kearsipan terdiri atas pejabat struktural di bidang kearsipan, arsiparis dan fungsional umum di bidang kearsipan. Terhadap

pengaturan kurikulum yang sifatnya dinamis telah dibentuk dalam pendelegasian dengan ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala ANRI.

Terdapat pula pengaturan tentang persyaratan bagi peserta pelatihan, fasilitator pelatihan kearsipan terdiri atas tenaga pengajar, penceramah, dan narasumber. Bagi setiap peserta pelatihan kearsipan dapat diberikan surat keterangan pelatihan kearsipan yang terdiri atas Surat Tanda Tamat Pelatihan yang selanjutnya disingkat STTP yang merupakan dokumen tertulis yang menyatakan bahwa peserta telah dinyatakan lulus pelatihan fungsional arsiparis. Sertifikat apabila peserta telah mengikuti dan menyelesaikan keseluruhan program pelatihan teknis dan pelatihan pimpinan organisasi kearsipan dengan baik. Surat keterangan telah mengikuti pelatihan apabila peserta telah mengikuti secara keseluruhan program pelatihan, namun tidak memenuhi syarat kelulusan. Atau surat keterangan gagal pelatihan apabila peserta tidak memenuhi syarat minimal program pelatihan. Bagi peserta pelatihan kearsipan yang memperoleh peringkat terbaik pada pelatihan kearsipan dapat diberikan piagam penghargaan.

2. Surat Edaran Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Uji Kompetensi/Sertifikasi dan Penilaian Kinerja Jabatan Fungsional Arsiparis.

Menindaklanjuti lahirnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, ANRI

sebagai instansi pembina jabatan fungsional arsiparis, perlu merespon dengan memperbaharui pengaturan tentang jabatan fungsional arsiparis dengan melakukan perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 60 Permenpan RB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional bahwa pada saat Peraturan Menteri ini mulai diundangkan maka semua ketentuan dalam Peraturan tentang Jabatan Fungsional yang telah ditetapkan dan semua peraturan pelaksanaannya, wajib disesuaikan dengan seluruh ketentuan dalam Peraturan Menteri ini paling lama 5 (lima) tahun.

Guna memberikan kepastian hukum pelaksanaan sertifikasi/uji kompetensi dan pengembangan karier jabatan fungsional arsiparis sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan peraturan pelaksanaan yang baru tentang Jabatan Fungsional Arsiparis, ANRI menetapkan kebijakan dalam Surat Edaran Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Uji Kompetensi/Sertifikasi dan Penilaian Kinerja Jabatan Fungsional Arsiparis.

Isi edaran terbagi atas 2 (dua) hal yaitu yang pertama, pelaksanaan sertifikasi/uji kompetensi jabatan fungsional arsiparis dilakukan sebagai berikut:

1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) ke dalam Jabatan Fungsional Arsiparis yang dilaksanakan melalui mekanisme perpindahan dari dan/atau promosi dari jabatan lain wajib mengikuti dan lulus uji kompetensi/sertifikasi;

2) Dalam rangka pengembangan karier, PNS yang telah diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Arsiparis yang berlatar belakang pendidikan selain bidang kearsipan dan akan melaksanakan kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi, sepanjang belum pernah lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Arsiparis wajib mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Arsiparis setelah itu mengikuti dan lulus uji kompetensi/sertifikasi Jabatan Fungsional Arsiparis;

3) Ketentuan bagi Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) ke dalam Jabatan Fungsional Arsiparis yang dilaksanakan melalui penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional akibat penyederhanaan birokrasi:

a) kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi wajib mengikuti dan lulus uji kompetensi/sertifikasi Jabatan Fungsional Arsiparis;

b) kenaikan jenjang jabatan berikutnya bagi Jabatan Fungsional Arsiparis yang berlatar belakang pendidikan selain bidang kearsipan, sepanjang belum pernah lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Arsiparis wajib mengikuti dan lulus uji kompetensi/sertifikasi Jabatan Fungsional Arsiparis setelah mengikuti dan lulus pendidikan

dan pelatihan kearsipan yang dapat diselenggarakan oleh masing-masing instansi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4) Bagi Pejabat Fungsional Arsiparis yang berlatar belakang pendidikan selain bidang kearsipan dan akan beralih jenjang jabatan dari kategori keterampilan ke kategori keahlian wajib mengikuti dan lulus uji kompetensi/sertifikasi setelah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan penjurangan Jabatan Fungsional Arsiparis.

Yang kedua, terkait dengan pelaksanaan penilaian kinerja dan penetapan angka kredit jabatan fungsional arsiparis dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Penilaian Kinerja dan Penetapan Angka Kredit (PAK) Pejabat Fungsional Arsiparis pada seluruh jenjang jabatan dilakukan oleh Pejabat Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Arsiparis (atasan langsung Pejabat Fungsional Arsiparis di instansi masing-masing sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara) setelah diberlakukan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat, dan Jenjang Jabatan Fungsional;

2) Dalam rangka pemenuhan ekspektasi kinerja sebagaimana

diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja ASN, bidang tugas dan ruang lingkup kegiatan Jabatan Fungsional Arsiparis mengacu pada uraian kerja dan Tugas Jabatan Fungsional Arsiparis;

3) Pendokumentasian kinerja Pejabat Fungsional Arsiparis mengacu pada Standar Kualitas Hasil Kerja Pejabat Fungsional Arsiparis;

4) Untuk penghitungan konversi Angka Kredit Jabatan Fungsional Arsiparis mengacu pada Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat, dan Jenjang Jabatan Fungsional.

Akhirnya, dua kebijakan baik berupa Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Kearsipan yang diundangkan pada tanggal 28 Mei 2024 dan Surat Edaran Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Uji Kompetensi/Sertifikasi dan Penilaian Kinerja Jabatan Fungsional Arsiparis yang ditetapkan pada tanggal 14 Maret 2024 merupakan upaya dan langkah progresif ANRI dalam mewujudkan salah satu asas penyelenggaraan kearsipan yang tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan yang kemudian diuraikan dalam penjelasan bahwa asas “keprofesionalan” adalah penyelenggaraan kearsipan harus dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang profesional yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan. ■

KISAH KEBUN KARET

Oleh: Farhah Faridah



Kupandangi foto dalam pigura ukuran 2R sebelum kupejamkan mata. Foto wisuda saat aku telah berhasil menyelesaikan kuliahku pada program Diploma IV kearsipan digital di salah satu perguruan tinggi kota provinsi ternama. Aku berkebaya modern lengkap dengan pakaian wisuda diapit oleh ayah dan bunda. Amanda Andriana Putri, S. Ter. Ars., nama lengkapku. Aku telah mengikuti prosesi wisuda saat itu sebagai sarjana kearsipan terapan. Tak lama setelah wisuda aku diterima bekerja sebagai pengelola arsip sebuah instansi di Cibinong, Bogor setelah melalui seleksi administrasi dan wawancara. Tiga bulan sudah aku berada di Cibinong, merantau dari Kota Garut. Aku dinyatakan telah lolos masa percobaan dan bisa terus bekerja sebagai tenaga kontrak. Kubulatkan tekadku menambah wawasan dan pengalaman kearsipan secara langsung di instansi ini. Suatu saat aku ingin menjadi arsiparis pada perusahaan ataupun instansi pemerintah.

"Manda! Kita ke pameran arsip, yuks!" Bu Linda, arsiparis muda, teman kantor sekaligus pembimbingku mengajak. "Ini coba lihat instagramnya! Ada infonya," katanya.

"Izin keluar kantor untuk itu?" tanyaku.

"Kita sampaikan dan izin atasan kita. Rabu kita ditugaskan ke Pusdiklat ANRI, Bogor untuk koordinasi teknis pelaksanaan Diklat Arsip Vital kerja sama dengan instansi kita," Bu Linda berhenti sejenak. "Nah, pulangnye kita mampir. Menarik, lho, ini judulnya."

Aku membuka instagram dan mencari akun penyelenggara berdasarkan informasi dari Bu Linda. "Transformasi Perkebunan Karet ke Pusat Akademik." Aku membaca judul pameran arsip. "Menarik untuk mengetahui sejarah kawasan kebun karet di Bogor yang akhirnya menjadi sebuah universitas," kataku. "Boleh kalau begitu kita kunjungi pameran arsip. Mudah-mudahan dapat izin atasan. Belajar sejarah selalu menarik dari sisi kearsipan," kataku mengiyakan ajakan Bu Linda.

Bu Linda tersenyum senang. "Siip. Nanti kusampaikan ke Pak Rizal untuk izinnya. Sesama penyuka sejarah kita, ya." Bu Linda pamit padaku untuk menemui Pak Rizal.

Tiga bulan terasa cepat berlalu. Aku telah memiliki pengalaman sebagai tim untuk mengolah arsip maupun secara mandiri saat mendeskripsi atau membuat laporan kegiatan. Pengalaman itu akan bertambah dengan akan mengikuti Diklat Arsip Vital yang diselenggarakan instansiku bekerja sama dengan Pusdiklat ANRI, Bogor. Juga siap menjelajah sebuah cerita bersejarah sajian arsip pada pameran arsip yang akan kukunjungi

bersama Bu Linda.

Alhamdulillah pada hari Rabu itu kegiatan pertama berjalan lancar. Diklat Program Arsip Vital akan dilaksanakan di instansiku sesuai waktu yang ditawarkan. Kami melanjutkan perjalanan menuju tempat pameran. Tidak banyak pengunjung di hari itu. Pameran dilaksanakan pada selasar museum. Panasnya udara siang itu terasa sejuk saat kami masuk selasar museum ber AC tempat pameran diselenggarakan. Satu orang pemandu menyampaikan informasi secara kronologis transformasi perkebunan karet wilayah Darmaga yang tersohor di Buitenzorg pada masa kolonial menjadi pusat akademik dengan sejarah dibangunnya gedung-gedung yang akhirnya menjadi sebuah universitas ternama. Sangat menarik dengan sajian arsip tekstual, arsip foto, kartografi, dan arsip digital yang dapat diakses pada platform kearsipan berbasis web. Aku sangat tertarik dengan arsip foto yang dipamerkan. Selain arsip foto peresmian gedung dan foto gedung-gedung yang telah diresmikan, terdapat juga foto-foto kebun karet dan pemilik perkebunan karet pada masa kolonial. Ada tarikan begitu kuat padaku untuk melihat ulang foto yang telah tua. Ada 3 foto dengan 2 foto masih terpelihara. Namun ada 1 foto yang sudah sedikit terbelah menarik perhatianku.

"Menarik, kan?" tanya Bu Linda. "Saya belum sempat makan nasi box yang disediakan Pusdiklat tadi. Baru terasa lapar sekarang. Saya makan dulu ya di beranda luar museum. Tadi kulihat ada tempat duduk di beranda depan. Kebetulan mobil parkir dekat situ, gampang ambil nasi boxnya."

Aku tersenyum. "Baik, silahkan Bu Linda. Saya sudah makan. Saya

mau lihat foto-foto perkebunan karet dan pemilik perkebunan karet pada masa kolonial. Tadi, saat pemandu menjelaskan baru sepintas. Kualitas fotonya masih terjaga baik meskipun umurnya telah tua. Hanya ada satu yang sedikit rusak. Setelah selesai saya ke beranda depan," kataku dan kami berpisah menuju tempat tujuan masing-masing.

Pada foto perkebunan karet yang sedikit rusak kulihat pemandangan begitu sejuk. Meskipun hanya foto hitam putih seolah-olah aku merasakan sejuaknya tempat itu. Berbeda dengan saat ini di mana aku sedang berada. Perjalanan dari gerbang masuk ke tempat pameran melewati hijaunya pohon, tetapi tidak sebanyak pada foto itu. Rasanya masih ada pohon karet yang ditinggalkan saat menuju sini. Sekali lagi kupandang foto kebun karet, sekonyong-konyong aku melihat ada sosok pria Belanda pada salah satu pohon karet. Tidak terlalu jelas karena foto sedikit terbelah. Kudekatkan mataku pada foto agar lebih jelas. Kontan saja aku menyentuh foto itu. Tiba-tiba aku telah berada pada sebuah tempat yang pernah kulihat. Aku telah berada di kebun karet seperti foto pada masa itu. Pada tahun 1830-an seperti yang kubaca dalam deskripsi arsip foto. Aku berada dekat sebatang pohon karet. Seorang pria Belanda sedang berbicara dengan pekerja melihatku, menghampiriku. Rasanya aku ingin berlari, takut sekali melihat lingkungan dan suasana yang berbeda.

"Selamat pagi. Sedang apa dan ada keperluan apa Nona di sini?" tanyanya tajam menyelidik. Aksan Belandanya sangat kental.

Tubuhku menggigil. Di ruang pameran tadi siang hari. Tiba-tiba aku

berada di kebun karet pagi hari. “Maaf Tuan, saya tersesat. Saya Amanda,” kataku terbata-bata ketakutan.

Dia melihatku dari atas ke bawah. Mungkin dia merasa heran dengan pakaianku. Pakaian dia adalah pakaian orang Belanda masa kolonial seperti yang kulihat pada arsip foto. Rambutnya ikal tersisir rapih, kemeja *cream* dengan celana senada. Dia memperhatikan *sneakers* putih yang kupakai, kemeja biru muda, celana *cream*, dan tas ranselku. “Saya sangat ingin melihat kebun karet yang sejuk. Tiba-tiba saya berada di sini,” kataku mencoba menjelaskan.

“Oh, baik. Saya Jacob antar Nona berkeliling kebun karet. Kita jalan ke arah sungai dengan suara gemericiknya, dan danau yang tenang.” Dia mengantarku menuju sungai lalu ke danau berjalan kaki. Sejuk. Berbeda jauh yang kurasakan sebelumnya. Panas, karena bumi sedang mengalami *global warming* pada masa aku berada sebelum terjebak di sini.

“Indah,” kataku. “Selanjutnya ke mana?” tanyaku dan berpikir bagaimana caranya aku harus kembali ke masaku. Aku telah merasakan apa yang ingin kurasakan. Berada dalam perkebunan karet seperti foto yang kulihat pada pameran. Tapi aku sungguh sangat takut jika aku tidak kembali dan terjebak selamanya di kebun karet bersama pria Belanda yang tak kukenal bernama Jacob.

“Menuju rumah peninggalan orang tuaku. Tak jauh dari sini,” katanya. Aku mengikutinya. “Itu *landhuis*. Kita duduk di sini, sejuk.” Ia menunjuk pada sebuah batu datar.

“Tahun berapa ini?” tanyaku.

“1836,” jawabnya.

“Awalnya aku tertarik pada foto pameran arsip yang menggambarkan kebun karet pada tahun 1835. Tiba-tiba aku berada di sini,” kataku. Dia terdiam dan menatapku. “Kamu mau pisang?” tawarku mengambil pisang yang belum sempat kumakan saat makan nasi box.

“Terima kasih.” Dia mengambil pisang yang kutawarkan dan memakannya hingga habis. “Sebentar saya ke dalam. Saya akan segera kembali,” katanya meninggalkanku.

Aku melihat sekeliling. Rasanya aku kenal bangunan rumah ini. Ya. Itu adalah museum tempat pameran pada waktu yang berbeda. Aku harus berpikir bagaimana caranya kembali. *Buitenzorg* sangat sejuk tahun 1836.

“Nona, saya bawakan foto kebun karet tahun 1835.” Dia serahkan foto padaku. Mataku terbelalak. Foto itu persis yang kulihat saat pameran arsip. Masih utuh. Tidak rusak.

“Saya pernah melihatnya sebelum ke sini.” Kuamati foto lekat-lekat dan kusentuh untuk meyakinkan. Kepalaku pusing dan kupejamkan mata. Saat mataku terbuka aku merasakan telah kembali. Aku duduk pada batu datar samping museum. Aku bersyukur telah kembali menembus ruang dan waktu.

“Manda! Saya cari ke mana-mana. Ke tempat foto tidak ada. Aku pikir ke toilet. Ternyata ada di sini, di batu datar peninggalan yang tak pernah diubah-ubah,” kata Bu Linda.

“Bagaimana Bu Linda tahu?” tanyaku.

“Pegawai museum menjelaskan kepada saya bahwa beberapa tidak diubah dan masih kondisi asli. Salah satunya batu datar ini,” katanya. “Hey!

Manda duduk santai di sini sambil makan pisang. Jangan lupa buang kulit pisangnya!”

Aku melihat kulit pisang. Pisang yang kuberikan pada Jacob. “Bu Linda, sudah waktunya kita pulang!” pintaku sekaligus membuang kulit pisang pada tempat sampah.

“Siap. Terserah yang nyetir. Oh, iya, waktu mencarimu, kulihat pegawai museum membawa satu foto untuk diamankan. Meskipun sudah ada tulisan “tidak boleh disentuh” tetap ada yang menyentuh sehingga jatuh dan terbelah,” tutur Bu Linda.

Aku menarik nafas. Mungkin karena aku melanggar aturan tidak boleh menyentuh telah membawaku menembus ruang dan waktu. Mobil berjalan perlahan. Sebelum gerbang kulihat masih ada sedikit kawasan dengan pohon karetnya. Sekilas aku melihat sosok Jacob ketika mobil melewati pohon-pohon karet. “Bu Linda, sudah saatnya kita memulai mengolah arsip foto instansi kita yang menumpuk belum terolah. Pasti ada suatu cerita arsip foto bernilai sejarah,” kataku memecah kesunyian.

“Siap. Nanti kita rencanakan dan bentuk tim. Siapa tahu kita juga bisa bikin pameran arsip dengan kisah menarik yang berbeda.” Bu Linda diam sejenak. “Manda! Sejak kehadiranmu kami selalu semangat. Kamu masih muda dan penuh ide kreatif. Kamu bukan arsiparis tapi sudah paham kearsipan. Sesuai juga latar belakang sekolahmu,” katanya.

“Ilmu kearsipan *kan* bisa dari jalur formal maupun informal seperti diklat. Banyak jalan menuju Roma,” kataku. Bu Linda mengacungkan kedua jempolnya di hadapanku, memberi semangat padaku. ■



FOTO: DOK. ANRI

Plt. Kepala ANRI, Imam Gunarto (kanan) menerima secara simbolis arsip statis perorangan Anggota DPR RI, Rieke Diah Pitaloka (kiri) disaksikan Dirjen HKI Kemenkumham, Min Usihen (tengah). (08/01/24).

ANRI TERIMA ARSIP STATIS 20 SURAT PENCATATAN CIPTAAN 20 KEKAYAAN INTELEKTUAL RIEKE DIAH PITALOKA

Jakarta (08/01) - Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) menerima arsip statis perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sekaligus Duta Arsip Indonesia, Rieke Diah Pitaloka. Arsip diterima secara simbolis oleh Pelaksana Tugas Kepala ANRI, Imam Gunarto di Ruang Serbaguna Noerhadi Magetsari, Gedung C lantai 2, ANRI. Arsip statis yang diserahkan Rieke merupakan 20 surat pencatatan 20 kekayaan intelektual Rieke Diah Pitaloka yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (Kemenkumham). Selain surat, juga diserahkan temuan-temuan penelitian yang telah diakui Hak Kekayaan Intelektual-nya oleh negara.

Menurut Imam, ANRI sebagai lembaga kearsipan nasional tidak

hanya mengelola arsip statis yang berasal dari kementerian/ lembaga, perusahaan, organisasi kemasyarakatan atau organisasi politik, tetapi juga dari perseorangan yang memiliki nilai guna sekunder berskala nasional.

"Sekarang sudah ada total 132 arsip perseorangan yang dikelola ANRI. Ibu Rieke ini yang ke-133. Kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ibu Rieke yang telah berkenan menyerahkan arsip hasil karya intelektualnya kepada negara melalui ANRI. Mudah-mudahan dapat diikuti oleh arsip pribadi lain milik Ibu Rieke yang juga memiliki nilai guna kelak untuk generasi penerus bangsa," ucap Imam.

Pada kesempatan ini turut hadir pula Direktur Jenderal Hak Kekayaan

Intelektual Kemenkumham, Min Usihen, Penasihat ANRI Bidang Pertahanan dan kemaritiman, Connie Rahakundini Bakrie, Ketua Dewan Pakar Memori Kolektif Bangsa, Mukhlis PaEni. Sebagai informasi, berikut adalah 20 surat pencatatan ciptaan 20 kekayaan intelektual yang diserahkan Rieke kepada ANRI:

1. Kekuasaan Negara di Era Digital;
2. Rekonstruksi Genesis Data Birokrat dan Data Warga;
3. Norma Yuridis Pendataan Perdesaan Top Down: Reproduksi Pseudo Data;
4. Norma Sosiologis Pendataan;
5. Aktor, Arena, serta Meta Kapital Data Birokrat Versus Data Warga;
6. Arena Birokrasi pada Pendataan Perdesaan Top Down;
7. Arena Warga pada Pendataan;
8. Kekerasan Simbolik Versus Afirmasi Simbolik;
9. Alur Pseudo Public Policy;
10. Alur Kebijakan Publik yang Presisi;
11. The Vicious Circle Kebijakan Rekolonialisasi;
12. The Truth Circle Kebijakan Afirmatif;
13. Sistemik Kebijakan Berbasis Data Presisi;
14. Norma Yuridis Pendataan Perdesaan Presisi;
15. Kebijakan Pemetaan, Pencegahan dan Penanganan Stunting Berbasis Data Presisi;
16. Sistem Pemerintahan Nagari Berbasis Data Presisi;
17. Sistem Pemerintahan Desa Berbasis Data Presisi;
18. Sistem Pemerintahan Daerah Kabupaten Berbasis Data Presisi;
19. Sistem Pemerintahan Daerah Kota Berbasis Data Presisi;
20. Sistem Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Data Presisi. **(tk)**



Plt. Kepala ANRI, Imam Gunarto menyampaikan kepada Menteri Parekraf, Sandiaga Uno tentang perkembangan persiapan Konferensi SEAPAVAA sekaligus meminta secara langsung kepada Menteri Parekraf untuk dapat membuka acara tersebut yang akan dilaksanakan di kota Solo. (22/01/24).

PLT. KEPALA ANRI AUDIENSI DENGAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

Jakarta (22/01) - Plt Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Imam Gunarto, beserta jajaran yang terdiri dari Sekretaris Utama, Direktur Preservasi, Direktur Pengolahan, Direktur Layanan dan Pemanfaatan dan para pendamping melakukan audiensi dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf), Sandiaga Uno, terkait acara Konferensi SEAPAVAA ke-28 yang rencananya akan berkolaborasi dengan Kemenparekraf dalam pelaksanaannya.

Tim ANRI diterima di ruang rapat gedung Sapta Pesona lantai 16 oleh Menteri Parekraf beserta jajaran. Dalam kesempatan ini, Plt. Kepala ANRI memberikan laporan kepada Menteri Parekraf, Sandiaga Uno perihal acara Konferensi SEAPAVAA dan juga persiapan yang sudah panitia dari ANRI lakukan sekaligus meminta secara langsung kepada Menteri Parekraf untuk bisa membuka acara tersebut yang rencananya akan dilaksanakan di kota Solo.

Menanggapi hal tersebut, Sandiaga Uno mendukung penuh

acara konferensi tersebut juga merasa tersanjung karena diberikan kesempatan dan ruang khusus pada acara dengan taraf Internasional. Beliau juga mendukung penuh pelaksanaan acara tersebut di Kota Solo karena kota tersebut baru saja dinobatkan sebagai kota kreatif UNESCO. Selain itu, tempat-tempat tujuan wisata yang terdapat di rundown juga sangat menarik apalagi acara farewell dinner yang akan digelar di Candi Prambanan akan sangat epik. **(yos/nul)**



Penandatanganan kesepakatan bersama dilakukan oleh Sekretaris Utama ANRI Rini Agustiani dan Dirjen HPI L. Amrih Jinangkung di Ruang Rapat Kandip Lantai 2 Kementerian Luar Negeri. (25/01/24).

DUKUNG PENGELOLAAN ARSIP TERJAGA, ANRI DAN DITJEN HPI TANDA TANGANI PERJANJIAN KERJA SAMA PENGELOLAAN ARSIP PERJANJIAN INTERNASIONAL

Jakarta (25/01) - Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional (Dirjen HPI), sepakat menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Kearsipan. penandatanganan tersebut dilakukan secara langsung oleh Sekretaris Utama ANRI Rini Agustiani dan Dirjen HPI L. Amrih Jinangkung di Ruang Rapat Kandip Lantai 2 Kementerian Luar Negeri.

Dalam sambutannya, Sekretaris Utama ANRI menyampaikan apresiasi kepada Dirjen HPI atas kerja sama yang telah disepakati dalam

rangka ikut membangun kearsipan nasional. Lebih lanjut Rini Agustiani menyampaikan bahwa arsip-arsip tentang perjanjian internasional yang dikelola oleh Dirjen HPI termasuk dalam arsip terjaga. Arsip-arsip tersebut harus kita Kelola dengan baik, dilakukan pelaporan daftar arsip terjaga dan penyerahan Salinan otentik arsip terjaga ke ANRI. Beliau juga menyampaikan bahwa ANRI siap membantu pengelolaan arsip yang dikelola oleh Dirjen HPI.

Sementara itu, Dirjen HPI L. Amrih Jinangkung menyampaikan bahwa kerja sama ini bertujuan untuk

meningkatkan kualitas pengelolaan arsip terutama arsip perjanjian internasional. Lebih lanjut L. Amrih Jibangkung menyampaikan bahwa Ditjen HPI masih sangat membutuhkan binaan dan dukungan dari ANRI dalam hal pengelolaan arsip yang mencakup perumusan kebijakan, bimbingan dan konsultasi, pemeliharaan, pengelolaan dan penyelamatan arsip khususnya arsip perjanjian internasional. Kerja sama ini diharapkan akan juga meningkatkan kolaborasi khususnya tentang pengelolaan arsip perjanjian internasional maupun pengelolaan arsip di Kementerian Luar Negeri. **(ke)**



Penelusuran arsip BPM di National Archives of the Netherlands (NAN) diawali dengan pertemuan Delegasi Indonesia dengan Director NAN. Pada pertemuan tersebut membahas implementasi kerja sama ANRI dan NAN khususnya pada ruang lingkup peningkatan akses terhadap arsip kolonial yang terdapat di kedua lembaga. (26/01/24).

ANRI DAN PERTAMINA LAKSANAKAN PENELUSURAN ARSIP SEJARAH PERTAMBANGAN INDONESIA DI BELANDA

Amsterdam (26/01) - Delegasi Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) beserta PT Pertamina (Persero) dan PT PGN Mas yang dipimpin oleh Deputi Bidang Konservasi Arsip ANRI, Kandar melaksanakan kegiatan penelusuran arsip Bataafsche Petroleum Maatschappij (BPM) di National Archives of the Netherlands (NAN) dan Perpustakaan Universitas Leiden (UBL). Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi dari Memorandum of Understanding (MoU) antara ANRI dengan kedua lembaga tersebut yang ditandatangani sebelumnya pada tahun 2022.

Penelusuran arsip BPM di National Archives of the Netherlands (NAN) diawali dengan pertemuan Delegasi Indonesia dengan Director NAN, Afelonne Doek didampingi Arjan Agema, Johan van Langen, Alex Enzlin, dan Lidwien Jansen. Pada pertemuan tersebut, Afelonne

menyampaikan dukungan penuh terhadap penelusuran arsip BPM yang ada di khazanah NAN sebagai implementasi kerja sama ANRI dan NAN khususnya pada ruang lingkup peningkatan akses terhadap arsip kolonial yang terdapat di kedua lembaga. NAN telah mempersiapkan khazanah yang akan dibaca, menyiapkan ruang khusus bagi penelusur ANRI dan Pertamina, serta menyediakan scanner dan bantuan scan on demand untuk mendukung kegiatan ini.

Dari penelusuran arsip di NAN, Tim ANRI dan Pertamina menemukan beberapa arsip diantaranya arsip tentang penambangan minyak di Muara Enim dan Moesi Ilir 1903 – 1914, staablad konsesi lahan BPM 1941, laporan Nederlands-Indische Aardolie Maatschappij (NIAM) 1940-1941, dokumen tentang personalia NIAM 1942 – 1945, foto – foto

pertambangan minyak Directorate van The Royal Dutch Petroleum Company 1923, arsip modernisasi kilang minyak BPM di Bandaran 1947 – 1950, dan beberapa arsip lain.

Penelusuran juga dilakukan di Perpustakaan Universitas Leiden (UBL) diterima oleh Head of Special Collections UBL, Marieke van Meer yang mendampingi pengurusan akses serta menunjukkan mekanisme akses koleksi khusus yang dimiliki UBL. Pihak UBL juga menyediakan bantuan scanning untuk arsip hasil penelusuran yang akan dialihmediakan oleh Tim ANRI dan Pertamina. Dari penelusuran arsip di UBL, Tim ANRI dan Pertamina kebanyakan menemukan arsip peta diantaranya peta produksi kilang minyak Balikpapan tahun 1924, peta produksi kilang minyak Tarakan, peta topografi dan tanah di Palembang serta berbagai arsip penting lainnya. **(agp)**



Arsip statis yang diserahkan Kemendag kepada ANRI diantaranya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) dan arsip foto. (07/02/24).

FORUM KEARSIPAN KEMENDAG: ANRI KEMBALI TERIMA ARSIP STATIS PERMENDAG

Jakarta (07/02) - Pelaksana (Plt) Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Imam Gunarto memberikan sambutan dalam acara Forum Kearsipan Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang diadakan di Ruang Rapat Auditorium, Gedung Utama Kemendag, Jakarta (7/2). Acara turut dihadiri oleh Plt. Sekretaris Jenderal Kemendag, Suhanto dan Kepala Biro Umum dan Layanan Pengadaan Kemendag, Yan Triono.

Dalam sambutannya, Imam Gunarto menyampaikan bahwa mulai tahun 2023, ANRI fokus untuk membantu persiapan 70 kementerian/ lembaga yang akan pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN). "Project besarnya adalah membantu kementerian/

lembaga dengan arsip 500 meter linier dan arsip bersejarah yang biasanya hanya 5% dari keseluruhan arsip itu untuk bisa diserahkan ke ANRI. Kemudian arsip yang berguna untuk administrasi nanti akan didigitalisasi, di-upload ke SRIKANDI sehingga bisa diakses di IKN," terangnya.

Sementara itu, Plt. Sekretaris Jenderal Kemendag, Suhanto dalam sambutannya menyampaikan bahwa peranan arsip sangat penting dan bila tidak ditata oleh ANRI maka anak cucu kita tidak akan mengetahui sejarah Republik Indonesia. "Kita sendiri bekerja selalu diaudit setiap tahun sehingga peranan arsip sangat penting. Meskipun sudah digitalisasi, kita tetap menggunakan arsip kertas jadi penataan arsip yang tidak baik

akan menyulitkan kita. Nilai indeks kita 86.9 di kategori Memuaskan, tapi target kita di angka Sangat Memuaskan karena akan dinilai Kemenpan RB terkait reformasi birokrasi," jelasnya.

Pada kesempatan tersebut, diserahkan arsip statis berupa Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) dan arsip foto dari Kemendag secara simbolis kepada ANRI. Arsip statis tersebut diharapkan menjadi salah satu upaya ANRI memajukan kebudayaan melalui program Memori Kolektif Bangsa (MKB) dan dapat menambah khasanah arsip tentang kebijakan Menteri Perdagangan di masa lalu untuk dijadikan pelajaran bagi generasi mendatang. (tr)



Diskusi Online Pusdipres (DOP) seri kelima bertajuk “Wawancara Sejarah Lisan sebagai Sumber Sejarah dan Film Dokumenter”. (22/02/24).

DOP SERI 5: WAWANCARA SEJARAH LISAN SEBAGAI SUMBER SEJARAH DAN FILM DOKUMENTER

Jakarta (22/02) - Pusat Studi Arsip Statis Kepresidenan (Pusdipres) menyelenggarakan Diskusi Online Pusdipres (DOP) seri kelima bertajuk “Wawancara Sejarah Lisan sebagai Sumber Sejarah dan Film Dokumenter”. Turut hadir dalam acara ini para narasumber yakni Putra Presiden Sukarno, Guruh Soekarnoputra, FX T Baskara dan Ari Trismano.

Pada kesempatan ini, Pelaksana Tugas Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Imam Gunarto menyampaikan konsiderasi dari Pusdipres sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat terkait dengan arsip kepresidenan. Menurutnya, Presiden Sukarno, merupakan salah satu presiden di Indonesia yang arsipnya dapat menjadi sumber dan penelitian yang berkelanjutan. Sementara itu, Kepala Pusdipres, Mira Puspita Rini mengungkapkan bahwa diseminasi arsip kepresidenan merupakan refleksi dari pembelajaran kepemimpinan. Saat ini Pusdipres telah banyak berkolaborasi untuk melengkapi arsip kepresidenan ini, di antaranya dengan Yayasan Bung

Karno, Museum Purna Bhakti, The Habibie Center, Pojok Gusdur, dan Dinas Pariwisata Jakarta Barat.

Adapun Guruh Sukarno Putra yang turut hadir dalam acara ini turut mengisahkan bahwa beliau lahir di salah satu ruang Istana Merdeka pada 13 Januari 1953 dengan bantuan Dokter Soeharto yang pada tahun lalu diberi gelar sebagai pahlawan nasional. Sebagai anak Presiden, Guruh merasakan tidak memiliki privilege karena didikan dari orang tuanya, Presiden Sukarno dan Ibu Fatmawati; yang membedakan hanya keprotokoleran. Lebih lanjut disampaikan bahwa Istana negara yang pada saat itu didiami, dipersepsikan oleh Guruh adalah bukan miliknya, oleh karena itu harus dijaga dengan baik. Guruh juga berkisah mengenai sekilas pengasuhan masa kecilnya bersama Presiden Sukarno dan pengasuhnya.

Selanjutnya pada diskusi DOP, FX T Baskara menyampaikan matero tentang Proyek Sejarah Lisan (PSL). Pemaparannya menjelaskan bahwa PSL terdiri dari tiga tahapan, terdiri atas:

1. Pra-wawancara; tahap pertama yaitu pertimbangan awal perlu digagas mengenai dimensi baru yang akan ditawarkan dari PSL dan impact yang dirasakan. Referensi juga merupakan hal krusial dalam menunjang tahapan ini. Tahapan rencana hasil akhir dan sasaran PSL perlu diperjelas. Adapun format produk akhir terdiri atas berbagai macam format berupa film dokumenter, publikasi buku dan lain-lain.
2. Wawancara; sebelum melakukan wawancara sejarah lisan, dilaksanakan riset riwayat, fokus dari peristiwa. Selanjutnya adalah membuat daftar pertanyaan yang sifatnya terbuka (sambil berkoordinasi dengan narasumber), menentukan lokasi dan waktu wawancara, mengonfirmasi ejaan nama narasumber (contoh: ejaan Sukarno atau Soeharto), memperkenalkan diri, dan meminta narasumber melakukan penandatanganan dokumen wawancara sejarah lisan.
3. Pasca-wawancara; format hasil PSL disesuaikan dengan target sasaran.

Pemateri kedua adalah Ari Trismano yang merupakan produser watchdoc. Program-program yang dihasilkan merupakan kolaborasi antara WSL dengan visualisasi arsip. Ari juga menekankan bahwa konsep dengan konten yang singkat kini sangat menarik minat gen z. Contoh program “bab yang hilang” yang kini sudah masuk season 3. Ia juga menyampaikan bahwa dalam menyusun program film dokumenter terdapat tiga tahapan, yaitu pra -riset, pra-interview, riset dok/ visual, storyline), produksi, dan pasca produksi (transkrip, skrip, voiceover, infografis, editing, preview, final project, distribusi). Selanjutnya diskusi ini ditutup dengan tanya jawab dari empat penanya baik secara daring dan luring. **(ot)**



Audiensi bertujuan untuk melakukan pembahasan terkait sikap dan langkah-langkah strategis Indonesia dalam mendukung dan menyelamatkan warisan dokumenter dan warisan budaya di Gaza, Palestina. (18/03/24).

ANRI AUDIENSI DENGAN KEMENDIKBUDRISTEK TERKAIT DAMPAK INVASI ISRAEL TERHADAP DOKUMENTER DAN WARISAN BUDAYA DI GAZA, PALESTINA

Jakarta (18/03) - Berdasarkan hasil laporan pendahuluan pustakawan dan arsiparis Palestina tentang pengrusakan yang dilakukan Israel terhadap arsip, perpustakaan, dan museum di Gaza, Palestina pada Oktober 2023 s.d. Januari 2024, diketahui bahwa sedikitnya terdapat 2 (dua) lembaga kearsipan, 11 lembaga perpustakaan, 9 (sembilan) museum, dan banyak korban jiwa dari bidang kebudayaan yang terdampak besar akibat peperangan yang sedang terjadi hingga saat ini. Menindaklanjuti hal tersebut, Pelaksana Tugas Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Imam Gunarto dan Deputi Bidang Konservasi Arsip, Kandar melakukan audiensi dengan Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

(Kemendikbudristek), Hilmar Farid.

Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pembahasan terkait sikap dan langkah-langkah strategis Indonesia dalam mendukung dan menyelamatkan warisan dokumenter dan warisan budaya di Gaza, Palestina. Audiensi ini juga merupakan tindak lanjut dari hasil rapat interkementerian pada tanggal 29 Februari 2024.

Dalam audiensi ini dibahas beberapa strategi penyelamatan dari aspek politik luar negeri, yaitu upaya penyusunan komunikasi bersama (*Joint Communique*) dengan Lembaga Pelestari Warisan Dokumenter dan Warisan Budaya di Indonesia beserta Negara-Negara Berpenduduk Mayoritas Muslim atau Anggota Organisasi Kerja Sama Islam

(OKI). Selain itu, Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbudristek juga akan mengupayakan agar mendapat dukungan dari Islamic World Educational, Scientific, and Cultural (ICESCO).

Dengan terjalannya komunikasi bersama tersebut, maka akan dilakukan membuka jalan untuk upaya penyelamatan warisan dokumenter dan warisan budaya melalui kegiatan preservasi arsip, bahan pustaka dan artefak di Gaza, Palestina. Dengan adanya upaya penyelamatan warisan dokumenter dan warisan budaya ini, diharapkan dapat membantu Palestina untuk menjaga identitas kolektif bangsa, sejarah keberadaan negara, sekaligus pencegahan pelanggaran terhadap kedaulatan rakyat Palestina. **(ap)**



Melalui wawancara, ANRI ingin menggali pandangan Sukmawati Sukarnoputri mengenai nilai-nilai kehidupan dari Presiden Sukarno, sosok Sukarno sebagai presiden, hingga kehidupan sosial politik Presiden Sukarno. Melalui kegiatan wawancara sejarah lisan ini diharapkan informasi yang diperoleh dapat dijadikan sumber penelitian. (22/04/24).

ANRI WAWANCARA SEJARAH LISAN DENGAN SUKMAWATI SUKARNOPUTRI

Jakarta (22/04) - Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) melakukan wawancara sejarah lisan dengan salah satu putri Presiden Sukarno, yakni Sukmawati Soekarnoputri di Ruang Wawancara Sejarah Lisan, Gedung C, ANRI. Sebelumnya, kedatangan Sukmawati diterima Pelaksana Tugas Kepala ANRI, Imam Gunarto dan Kepala Pusat Studi Arsip Statis Kepresidenan, Mira Puspita Rini di Ruang Kerja Kepala ANRI.

Pada kesempatan ini, wawancara dilakukan oleh sejarawan Indonesia, Baskara T Wardaya. Melalui wawancara ini, ANRI ingin menggali pandangan Sukmawati Sukarnoputri mengenai nilai-nilai kehidupan dari Presiden Sukarno, sosok Sukarno sebagai presiden, hingga kehidupan sosial politik Presiden Sukarno. Melalui kegiatan wawancara sejarah lisan ini diharapkan informasi yang diperoleh dapat dijadikan sumber penelitian.

Kegiatan wawancara sejarah lisan dilakukan dalam rangka penyelamatan arsip statis kepresidenan melalui Program Wawancara Sejarah Lisan Keluarga dan Orang Terdekat Presiden Sukarno. Pada 2024, ditargetkan lima tokoh yang akan diwawancarai, yaitu putra-putri dari Presiden Sukarno. Sebelumnya, pada awal 2024 ANRI telah melakukan wawancara sejarah lisan dengan Guntur Soekarnoputra di kediamannya. (sa)



FOTO: DOK. ANRI

Deputi Bidang Pengembangan Sistem Kearsipan (IPSK) Andi Kasman saat menyampaikan materi pada Rakor Temu Jaringan Nasional SIKN. (24/04/24).

PERKUAT PENYELENGGARAAN KEARSIPAN, ANRI GELAR RAPAT KOORDINASI TEMU JARINGAN NASIONAL SIKN DAN JIKN

Bali (24/04) - Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) Temu Jaringan Nasional Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) dengan tema “Penguatan Penyelenggaraan Kearsipan dalam rangka Meningkatkan Layanan Akses Informasi Kearsipan yang Autentik dan Berkelanjutan melalui SIKN dan JIKN”. Acara Rakor diselenggarakan di Harris Hotel and Residences, Bali.

“Tujuan penyelenggaraan Rakor Temu Jaringan Nasional adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik efektif dan efisien, melalui penyediaan informasi kearsipan secara online,” ungkap Deputi Bidang Pengembangan Sistem Kearsipan (IPSK), Andi Kasman dalam laporannya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala ANRI, Imam Gunarto menyampaikan bahwa rakor kali ini menjadi sangat penting karena meneguhkan komitmen semua para pemangku kepentingan akan urgensi JIKN yang semakin strategis pada saat ini.

Selain itu, melalui rakor ini dapat memastikan arsip yang telah dikelola dapat digunakan dan dimanfaatkan seluas-luasnya untuk masyarakat, bangsa dan negara.

Imam juga mengimbau kepada pusat dan simpul jaringan untuk berperan aktif dalam membangun portal JIKN. “Pusat dan simpul jaringan harus bekerja lebih aktif dan dinamis membangun portal ini sebagai corong informasi yang paling terpercaya, lengkap, autentik dan menjadi rujukan utama masyarakat. Sehingga mampu menjadi tembok penghalang menyebarnya hoaks dan berita bohong,” tambahnya.

Sementara itu, Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Bali, I Dewa Putu Sunartha yang mewakili Sambutan Penjabat Gubernur Bali sangat mengapresiasi acara Rakor Temu Jaringan Nasional SIKN dan JIKN, dan berterima kasih telah memberikan kepercayaan kepada Provinsi Bali sebagai tempat penyelenggaraan rakor.

Rakor Temu Jaringan Nasional kali ini diselenggarakan selama tiga hari, mulai dari 24 s.d. 26 April 2024. Adapun tema yang dibahas adalah “Peningkatan Layanan Akses Informasi Arsip Covid-19 Kementerian Kesehatan RI melalui Penguatan JIKN” yang disampaikan oleh Arsiparis Ahli Utama Kementerian Kesehatan RI, Desak Made Wismarini dan *sharing session* penyelenggaraan SIKN dan JIKN di Kabupaten Badung yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung, Ni Wayan Kristiani. *Sharing session* ini meliputi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung sebagai 5 (lima) besar Simpul Jaringan Terbaik Nasional Tahun 2023 di Yogyakarta, serta studi tiru ke Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung.

Rakor ini dihadiri oleh 300 Simpul Jaringan, meliputi anggota Simpul Jaringan dari Kementerian dan Lembaga Negara, Lembaga Kearsipan Provinsi, Lembaga Kearsipan Kabupaten dan Kota, Lembaga Kearsipan Perguruan Tinggi, serta BUMN yang telah menjadi anggota Simpul Jaringan.

Pada kesempatan ini, dilaksanakan juga penyusunan “Deklarasi Denpasar 2024” dan Penyerahan Sertifikat Simpul Jaringan Pilot Project 2024 oleh Deputi IPSK kepada peserta Simpul Jaringan *Pilot Project* Tahun 2024. **(is)**



FOTO: DOK. ANRI

Plt. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia, Imam Gunarto menerima sertifikat penetapan warisan dokumenter Indonesia dalam Register Regional MOWCAP 2023-2024. (07/05/24).

MOWCAP TETAPKAN TIGA WARISAN DOKUMENTER INDONESIA DALAM REGISTER REGIONAL MOWCAP 2023 – 2024

Ulan Bator (07/05) - Memory of the World Regional Committee for Asia and the Pacific (MoWCAP) menetapkan tiga warisan dokumenter Indonesia dalam register regional MoWCAP 2023 – 2024. Ketiga

warisan dokumenter tersebut adalah arsip Indarung I Semen Padang sebagai Pabrik Semen Pertama di Asia Tenggara yang diajukan PT Semen Padang, arsip tentang Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia

tahun 1887-1986 yang diajukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur serta Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI), dan Manuskrip Tambo Tuanku Imam Bonjol yang diusulkan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Penetapan ketiga warisan dokumenter tersebut merupakan hasil rekomendasi dari Register Subcommittee (RSC) MoWCAP yang diketuai Helen Jarvis dan hasil voting oleh delegasi negara-negara MoWCAP yang hadir di Mongolia. Penetapan ini mengukuhkan kembali bahwa Indonesia mampu melestarikan dan meningkatkan akses terhadap warisan dokumenter yang memiliki signifikansi regional di Asia dan Pasifik. **(agp)**



FOTO: DOK. ANRI

Delegasi Indonesia terdiri dari nominator warisan dokumenter yang sedang diajukan pada register MoWCAP di antaranya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas), Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) dan Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI), serta PT. Semen Padang. (07/05/24).

DELEGASI KOMITE NASIONAL MOW INDONESIA HADIRI 10TH MOWCAP GENERAL MEETING DI MONGOLIA

Ulan Bator (07/05) - Delegasi Komite Nasional *Memory of the World* (MoW) Indonesia yang dipimpin Ketua Komite Nasional MoW Indonesia sekaligus Pelaksana Tugas Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia

(ANRI), Imam Gunarto menghadiri 10th Memory of the World Regional Committee for Asia and the Pacific (MoWCAP) General Meeting di Best Western Premiere Tuushin, Ulan Bataar, Mongolia. Kegiatan ini dihadiri

perwakilan dari negara-negara anggota MoWCAP di kawasan Asia dan Pasifik.

Selain dari ANRI, delegasi Indonesia juga terdiri dari nominator warisan dokumenter yang sedang diajukan pada register MoWCAP di antaranya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas), Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) dan Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI), serta PT. Semen Padang.

Pertemuan ini dibuka Menteri Kebudayaan Mongolia, Ms. Nomin Chibat selaku tuan rumah dan dipimpin oleh Chairman MoWCAP, Mr. Kim Kwi Bae dari Korea Selatan. Dalam kesempatan ini, Imam Gunarto menyampaikan Country Report Komite Nasional MoW Indonesia. Dalam laporan tersebut, beliau memaparkan tentang struktur organisasi, aktivitas, pencapaian, dan rencana kegiatan Komite Nasional MoW Indonesia kurun waktu 2022 – 2024. **(agp)**



Plt. Kepala ANRI selaku Ketua Komite Nasional *Memory of the World* (MoW) Indonesia, Imam Gunarto, terpilih sebagai Vice Chair *Memory of the World Regional Committee for Asia and the Pacific* (MoWCAP) periode 2024 – 2028. (07/05/24).

PLT. KEPALA ANRI JADI VICE CHAIR MOWCAP 2024 - 2028

Ulan Bator (07/05) - Pelaksana Tugas Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) selaku Ketua Komite Nasional *Memory of the World* (MoW) Indonesia, Imam Gunarto, terpilih sebagai *Vice Chair Memory of the World Regional Committee for Asia and the Pacific* (MoWCAP) periode 2024 – 2028. Pada pemilihan ini, Imam Gunarto (Indonesia), Vu Thi Minh Huong (Vietnam) dan Mitsuru

Haga (Jepang) merupakan kandidat dengan jumlah suara terbanyak pada Pemilihan Bureau Member MoWCAP kali ini.

Imam Gunarto yang telah memiliki pengalaman di bidang kearsipan dan warisan dokumenter menyampaikan bahwa program MoW harus menjadi prioritas anggota MoWCAP. Selain itu beliau menyampaikan bahwa

Bureau Member MoWCAP harus memberikan peran yang penting dalam mendorong pelestarian dan akses terhadap warisan dokumenter di regional Asia dan Pasifik. Beliau juga menyampaikan pengusulan awal Indonesia sebagai tuan rumah 11th *General Meeting* MoWCAP di Indonesia yang rencananya akan dilaksanakan di Bali. (agp)

FOTO: DOK ANRI



Indonesia berhasil terpilih menjadi MoWCAP Bureau Member untuk tahun 2024-2028, bersama dengan Jepang dan Vietnam yang telah menjadi anggota sebelumnya. (08/05/24).

10TH MEMORY OF THE WORLD REGIONAL COMMITTEE FOR ASIA AND THE PACIFIC GENERAL MEETING

Ulan Bator (08/05) - Pelaksana Tugas Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Imam Gunarto, didampingi Deputy Bidang Konservasi, Kandar, hadir dalam acara 10th Memory of The World Regional Committee for Asia and The Pacific (MoWCAP) *General Meeting* yang diselenggarakan pada 6 s.d 8 Mei 2024 di Ulaanbaatar, Mongolia. Dalam kesempatan tersebut, turut hadir Ketua MoWCAP, Kim Kwibae, beserta Wakil Ketua MoWCAP Prof. Mitsuru Haga (Jepang), Dianne Miacaskill (Selandia Baru) dan Vu Thi Minh Huong (Vietnam). General meeting dipimpin oleh Sekretaris Jenderal MoWCAP, Linh Anh Moreau dan jalannya presentasi serta diskusi dipandu Dianne Macaskill selaku Wakil Ketua MoWCAP.

Negara peserta yang hadir menyampaikan presentasinya dalam

rangka mendaftarkan arsip bersejarah sebagai warisan dokumenter untuk MoWCAP. Indonesia melalui ANRI berhasil mendaftarkan tiga dokumen sebagai MoWCAP, di antaranya:

1. Arsip tentang Indarung I Semen Padang sebagai pabrik semen pertama di Asia Tenggara,
2. Arsip tentang Indonesian Sugar Research Institute (ISRI) tahun 1887-1986, dan
3. Manuskrip tentang Tuanku Imam Bonjol.

Imam Gunarto menyampaikan bahwa program Memory of the World (MoW) menjadi sebuah prioritas bagi semua negara untuk menjaga kedamaian dunia melalui rekaman manusia yang hidup di dalamnya. Strategi, riset, penyimpanan registrasi, preservasi dan akses adalah proses kunci yang harus diimplementasikan

secara efektif dan terintegrasi. “Kami mendorong semua negara anggota harus mempunyai komite nasional yang bisa mengimplementasikan programnya secara efektif. Kami juga menekankan bahwa general meeting MoWCAP bisa menjadi forum untuk menguatkan relasi dan jaringan di antara para negara anggotanya, untuk meningkatkan preservasi dan akses atas memori dokumenter di wilayah ini,” terangnya.

Pada kesempatan tersebut, Indonesia berhasil terpilih menjadi MoWCAP *Bureau Member* untuk tahun 2024-2028, bersama dengan Jepang dan Vietnam yang telah menjadi anggota sebelumnya. MoWCAP Bureau ini bertanggung jawab dalam merencanakan, mengimplementasikan dan mengawasi jalannya program sesuai dengan hasil yang disepakati *General Meeting* MoWCAP. (tr)



Deputi Bidang Konservasi Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Kandar menerima arsip statis Kementerian Sosial RI (Kemensos RI) yang diserahkan Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini di Gedung Aneka Bhakti Kemensos, Jakarta. (15/05/24).

MENTERI SOSIAL TRI RISMAHARINI SERAHKAN ARSIP STATIS KEMENSOS RI KE ANRI

Jakarta (15/05) - Deputi Bidang Konservasi Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Kandar menerima arsip statis Kementerian Sosial RI (Kemensos RI) yang diserahkan Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini di Gedung Aneka Bhakti Kemensos, Jakarta. Penyerahan arsip statis Kemensos ke ANRI ini merupakan penyerahan arsip ke-tujuh kalinya.

Serah terima arsip Kemensos RI dilaksanakan pada kegiatan Pencanaan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA) di lingkungan Kementerian Sosial RI. Mensos Risma mengatakan Kemensos RI dan ANRI sudah bersinergi dengan baik dalam pengelolaan arsip dan mengingatkan kepada jajarannya untuk bersungguh-sungguh dalam pengelolaan arsip di lingkungan Kementeaian Sosial RI.

Mensos Risma juga mengapresiasi kerja keras arsiparis dalam

pengelolaan arsip, “jangan pernah meremehkan sebuah arsip,” kata Mensos Risma, beliau menerangkan bahwa dengan adanya arsip sudah banyak membantu menyelamatkan aset Pemerintah Kota Surabaya yang diakui pihak lain pada saat dirinya masih menjadi Wali Kota Surabaya.

Pelaksanaan pencanaan GNSTA di lingkungan Kementerian Sosial RI ini mendapatkan apresiasi dari Plt. Kepala ANRI yang sambutannya disampaikan oleh Kandar. “Hal ini menggambarkan keseriusan Kemensos dalam menangani kearsipan dan membuat kami optimis bahwa kearsipan di lingkungan Kemensos akan semakin tertib, semakin maju karena kesadaran seluruh pejabat dan pegawai semakin meningkat,” ungkap Kandar.

Arsip statis yang diserahkan terdiri atas arsip proses pengajuan pemberian gelar Pahlawan Nasional dan perintis kemerdekaan, Peraturan

Menteri Sosial, video dokumenter dan video kunjungan kerja Mensos dan sejenisnya sebanyak 520 sampul, 42 jilid, 562 lembar kertas dalam 47 boks (9,4 ML) dan 25 keping DVD.

Arsip statis yang diserahkan pada hari ini merupakan memori yang sangat penting bagi kita dan generasi mendatang karena menggambarkan sejarah bangsa. Dengan diserahkannya arsip statis Kementerian Sosial RI ke ANRI maka dua hikmah sekaligus yang diperoleh, yakni; Kemensos RI telah meninggalkan jejak memori yang sangat berharga bagi negara dan bangsa Indonesia, khususnya bagi generasi mendatang. Kemensos RI juga telah melaksanakan kewajiban sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 tentang Kearsipan bahwa lembaga negara wajib menyerahkan arsip statis ke ANRI. **(nul)**



Rombongan Ibu Sinta Nuriyah Wahid yang terdiri atas Ngatawi Al-Zastrow, Priyo Sambodo, Eny, tim arsitek, dan Pasukan Pengaman Presiden (Paspampres) diterima oleh Plt. Kepala Arsip Nasional RI, Sekretaris Utama Deputi Bidang Konservasi Arsip, dan Kepala Pusdipres. (23/05/24).

SINTA NURIYAH WAHID KUNJUNGI DAN STUDI BANDING KE PAMERAN TETAP PRESIDEN PERTAMA IR. SUKARNO

Jakarta (23/05) - Pada Kamis, 23 Mei 2024 merupakan salah satu momen yang membanggakan bagi Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), khususnya Pusat Studi Arsip Statis Kepresidenan (Pusdipres) karena menerima kunjungan dari Istri Presiden Keempat RI Abdurrahman Wahid, Ibu Sinta Nuriyah Wahid. Agenda dari kunjungan ini adalah koordinasi dan studi banding dalam rangka Pembangunan Diorama Presiden Keempat RI. Rombongan Ibu Sinta Nuriyah Wahid yang terdiri atas Ngatawi Al-Zastrow, Priyo Sambodo, Eny, tim arsitek, dan Pasukan Pengaman Presiden (Paspampres) diterima oleh Plt. Kepala Arsip Nasional RI, Sekretaris Utama Deputi

Bidang Konservasi Arsip, dan Kepala Pusdipres.

Agenda pertama dari kunjungan yakni visitasi ke Pameran Tetap Presiden Pertama Ir. Sukarno. Kunjungan ini dipandu oleh Ketua Tim Akuisisi dan Pengolahan Pusdipres, Widhi Setyo Putro. Ibu Sinta Nuriyah Wahid terlihat serius dan antusias dalam mendengarkan pemaparan dari pemandu. Kunjungan ini memiliki nilai sejarah tersendiri bagi pendamping pemanduan karena Ibu Sinta Nuriyah Wahid sesekali melemparkan gurauan dalam sesi pemanduan. Durasi pemanduan berlangsung selama dua jam dengan materi pameran yang terdiri atas aku Indonesia, jalan politik, patron budaya, dan kesejahteraan

serta kebijakan perekonomian. Pada akhir kunjungan, tim pemandu mengabadikan momen bersejarah Bersama Ibu Sinta Nuriyah Wahid.

Agenda berikutnya melakukan studi banding di Gedung cagar budaya yang dilaksanakan oleh Ngatawi Al-Zastrow dan tim arsitek. Pada sesi ini dipandu oleh Octavia, Ari S dan Arizal S yang didampingi oleh Kepala Pusdipres. Tim arsitek melakukan observasi yang terdapat di Gedung yang telah memperoleh penghargaan dari UNESCO. Diharapkan dengan kunjungan ini, dapat meningkatkan sinergitas dalam diseminasi arsip kepresidenan dari Presiden Abdurrahman Wahid. **(ot)**



Plt. Kepala ANRI, Imam Gunarto (kiri) dan Sekretaris Utama ANRI, Rini Agustiani (kanan) membuka Rapat Koordinasi Evaluasi Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2024 dengan penabuhan gendang secara bersama-sama. (28/05/24).

PLT. KEPALA DAN SESTAMA ANRI MEMBUKA RAPAT KOORDINASI EVALUASI HASIL PENGAWASAN KEARSIPAN TAHUN 2024

Samarinda (28/05) - Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala dan Sekretaris Utama Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Imam Gunarto beserta Rini Agustiani hadir pada Rapat Koordinasi Evaluasi Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2024 dalam rangka Peringatan Hari Kearsipan ke-53 Tahun 2024 di Hotel Mercure, Samarinda, Kalimantan Timur.

Didahului dengan penyampaian Laporan Kegiatan oleh Sekretaris Utama ANRI yang dalam laporan kegiatannya menyampaikan bahwa tema yang diangkat dalam rangka Peringatan Hari Kearsipan ke-53 Tahun 2024 ialah *Sustainable Archiving for the Best Future* (Kearsipan yang Berkelanjutan untuk Masa Depan yang Terbaik).

Rini Agustiani mengungkapkan terkait penyelenggaraan akreditasi dan pengawasan kearsipan bahwa berdasarkan program kerja tahun 2024, Pusat Akreditasi Kearsipan telah melaksanakan akreditasi terhadap 17 lembaga, yaitu 8 Unit Kearsipan, 1 Lembaga Kearsipan PTN, 4 Lembaga Pendidikan dan Pelatihan kearsipan, serta 4 Lembaga Penyelenggara Jasa Kearsipan.

"Sumber pendanaan dari APBN ANRI dan PNBP. Pendanaan dengan APBN

ANRI berdasarkan Peraturan Kepala ANRI Nomor 11 Tahun 2020, diprioritaskan sebagai apresiasi terhadap Kementerian/Lembaga yang memperoleh nilai hasil pengawasan terbaik dengan kategori Sangat Memuaskan pada tahun 2023. Pada pelaksanaan akreditasi kearsipan terdapat 8 lembaga telah ditetapkan, 4 lembaga yg memperoleh nilai istimewa dengan kualifikasi AA, yaitu Kementerian Kesehatan RI, Kemeterian Perindustrian RI, Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Jakarta 3, serta Lembaga Kearsipan Perguruan Tinggi UGM," paparnya.

Sekretaris Utama ANRI juga menyampaikan bahwa isu yang akan dibahas dalam rapat koordinasi ini ialah terkait percepatan pencapaian kualitas penyelenggaraan kearsipan melalui program pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kearsipan yang menjadi tanggung jawab Kementerian Dalam Negeri, ANRI, dan tanggung jawab setiap Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, PTN, dan BUMN.

"Penekanan pada pengarusutamaan program pembinaan kearsipan nasional yang meliputi Tertib Arsip, Transformasi Digital, Memori Kolektif Bangsa melalui sinergitas program pembinaan dan pengawasan kearsipan," tambahnya.

Penyampaian Laporan Kegiatan dilanjutkan dengan pemberian sambutan oleh Plt. Kepala ANRI. Dalam sambutannya, Imam Gunarto menyampaikan bahwa kita semua harus menjamin program dan kegiatan kearsipan harus dijalankan secara terintegrasi, mulai dari perencanaan sampai pengawasan. Pengawasan sangat penting untuk evaluasi yang nantinya berguna untuk melihat kekurangan dan kemudian untuk memperbaiki berikutnya.

"Tidak ada lagi kegiatan kearsipan yang tidak terencana," ungkap Imam Gunarto. "Oleh karena itu, pertemuan kita kali ini di Kaltim, Samarinda juga akan membahas bagaimana perencanaan kita di lima tahun ke depan di tahun 2025-2029," tambahnya.

Berdasarkan paparan Plt. Kepala ANRI, data pengawasan tahun 2023 menunjukkan masih adanya beberapa kinerja kearsipan nasional dari lembaga pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota yang belum mencapai target dengan baik. Sementara itu, target kearsipan untuk tahun 2025-2029 tentunya akan bergeser dan lebih diarahkan kepada *Big Archive*, yaitu ke arah pembangunan yang terkait dengan Big Data Kearsipan sebagai pusat khasanah dan pembelajaran bangsa secara digital.

"Sehingga peran arsip sebagai Memori Kolektif Bangsa semakin meningkat untuk mengokohkan rasa kebangsaan, juga layanan kearsipan kepada masyarakat semakin meningkat dan massive," paparnya.

Plt. Kepala ANRI menerangkan bahwa terkait digitalisasi, seperti hadirnya platform aplikasi terbaru dalam bentuk teknologi pemerintahan (Government Technology/GovTech) Indonesia bernama INA Digital yang sebelumnya telah diresmikan oleh Presiden RI, meskipun kearsipan belum menjadi salah satu layanan prioritas dalam INA digital, kearsipan telah melakukan proses digitalisasi terlebih dahulu, yaitu baik melalui SRIKANDI, SIKN-JIKN, dan digitalisasi arsip-arsip lama. (rra)



FOTO: DOK. ANRI

Plt. Kepala ANRI membuka Pameran One Stop Service dan Pameran Arsip “Pindah dari Jakarta ke Nusantara”. (28/05/24).

PAMERAN ONE STOP SERVICE DAN PAMERAN ARSIP “PINDAH DARI JAKARTA KE NUSANTARA”

Samarinda (28/05) - Sebagai bagian dari puncak peringatan Hari Kearsipan ke-53 yang digelar di Samarinda, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) menyelenggarakan pameran One Stop Service yang diikuti unit kerja di lingkungan ANRI dan pameran arsip Pindah dari Jakarta ke Nusantara. Sebanyak 16 unit kerja eselon II serta Balai Arsip Statis dan Tsunami mengikuti pameran yang dilaksanakan di Lobby Crystal Hotel Mercure, Samarinda pada 28 s.d 29 Mei 2024. Pameran ini diresmikan Pelaksana Tugas Kepala ANRI, Imam Gunarto didampingi Deputi Bidang Konservasi Arsip, Kandar.

Pada laporannya, Kandar menyampaikan bahwa informasi yang

disajikan oleh setiap unit kerja di lingkungan ANRI, diharapkan dapat menjadi ajang berbagi pengetahuan bagi peserta yang hadir di sini. Karena setiap unit kerja memiliki tugas dan fungsi khusus yang bisa dibagikan kepada pengunjung.

Adapun pameran Arsip Pindah dari Jakarta ke Nusantara mengandung alur cerita bagaimana ibu kota mulai zaman Hindia Belanda, kota yang pernah menjadi ibu kota negara, wacana pemindahan ibu kota negara, hingga perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara. Arsip yang dipamerkan terdiri atas 37 arsip, dengan rincian arsip tekstual sebanyak 18 arsip, arsip foto sebanyak 12 arsip,

arsip kartografi sebanyak 6 arsip, dan arsip video 1 arsip. Pameran arsip ini terdiri dari beberapa segmen cerita yang melingkupi:

Pindah Masa Hindia Belanda

Batavia adalah kota utama sejak masa VOC hingga ditetapkan sebagai ibu kota Hindia Belanda masa kolonial. Pada abad ke-20 Masehi semua infrastruktur ibu kota telah cukup mapan dibangun di Batavia yang kemudian dikenal sebagai Jakarta pada masa pendudukan Jepang.

Bandung, Kota yang Hampir menjadi Ibu Kota

Pada masa Gubernur Jenderal P. Graaf van Limburg Stirum (1916-1921)

karena keadaan Kota Batavia sebagai Ibu Kota Hindia Belanda dianggap sudah tidak layak untuk ditinggali, muncul gagasan memindahkan ibu kota negara ke Bandung. Rencana itu tidak sempat diwujudkan karena perang dunia segera tiba di wilayah Hindia Belanda.

Jakarta: Ibu Kota Proklamasi, Yogyakarta: Ibu Kota Revolusi

Saat Proklamasi Kemerdekaan, Ibu Kota RI berada di Jakarta. Pada 4 Januari 1946, Ibu Kota RI diputuskan untuk pindah ke Yogyakarta, karena kondisi Ibu Kota Jakarta semakin tidak aman. Presiden, wakil Presiden, dan seluruh jajaran menteri turut pindah. Hanya Perdana Menteri Sutan Sjahrir yang masih menetap di Jakarta guna memudahkan hubungan dengan dunia internasional.

Bukittinggi Ibu Kota Pemerintahan Darurat RI

Pada 19 Desember 1948 Presiden dan Wakil Presiden RI Sukarno-Hatta memberikan mandat kepada Mr Sjafruddin Prawiranegara, Menteri Kemakmuran RI untuk membentuk Pemerintah Republik Darurat di Sumatera. Bukittinggi menjadi pilihan ibu kota bagi pemerintahan darurat yang nantinya terus berpindah karena agresi militer Belanda.

Kembali ke Yogyakarta

Setelah agresi militer Belanda ke-2 berakhir, pada 6 Juli 1949 Sukarno-Hatta kembali ke Yogyakarta dari pengasingan mereka. Menyusul kemudian pada 10 Juli 1949 Mr Sjafruddin Prawiranegara pimpinan Pemerintah Darurat RI di Sumatera juga tiba di Yogyakarta. Dengan demikian Yogyakarta pulih kembali sebagai ibu kota negara RI.

Jakarta Ibu Kota Negara RI

Bertepatan dengan pengakuan kedaulatan RI dari Belanda pada 27 Desember 1949, Ibu Kota Negara RI kembali ke Jakarta. Meski untuk beberapa saat status pemerintahan RI masih bagian dari Republik Indonesia Serikat (RIS) yang kemudian melebur menjadi NKRI pada 15 Agustus 1950.

Dari Palangkaraya hingga ke Jonggol: Rencana Pindah Ibu Kota yang Tak Terlaksana

Pada 17 Juli 1957 Presiden Sukarno berkunjung ke Palangkaraya dalam rangka meresmikan Provinsi Kalimantan Tengah. Setelah kunjungan itu mulai santer terdengar kabar rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Palangkaraya. Jakarta dirasa tidak lagi layak sebagai sebuah ibu kota negara. Sedangkan Palangkaraya dianggap cukup ideal menjadi ibu kota negara yang baru karena dibangun dengan konsep yang lebih terencana.

Rencana pemindahan ibu kota negara ke Palangkaraya akhirnya tidak terlaksana. Pada 1964, Presiden Sukarno justru mengesahkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1964 tentang Pernyataan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Raya Tetap Sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia dengan Nama Jakarta.

Rencana Pindah Ibu Pernah Terjadi pada Akhir Masa Pemerintahan Presiden Soeharto

Kondisi Jakarta sebagai ibu kota negara dianggap tidak lagi ideal, karena itu Presiden Soeharto membutuhkan sebuah kota sebagai sebuah ibu kota negara yang baru namun tetap tidak menghilangkan peran Jakarta sebagai pusat ekonomi nasional.

Pada 1997, lahir Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1997 tentang Koordinasi Pengembangan Kawasan

Jonggol sebagai Kota Mandiri. Jonggol pun kemudian diwacanakan sebagai kota mandiri yang diorientasikan menjadi ibu kota baru.

Rencana pemindahan ibu kota ke Jonggol tidak benar-benar terlaksana. Terjadinya krisis moneter dunia pada 1997 tidak memungkinkan bagi Pemerintah Republik Indonesia untuk mengakomodasi segala keperluan pembiayaan pemindahan ibu kota.

Pindah Ibu Kota pada Masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo

Sebagai tindak lanjut pemerintah dalam memindahkan ibu kota diterbitkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Undang-undang itu menjelaskan bahwa Ibu Kota Negara bernama Nusantara. Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara disebut dengan Otorita Ibu Kota Nusantara.

Dalam rentang periode 2020-2024 pemerintah melakukan pembangunan sejumlah infrastruktur utama pendukung, seperti Istana Kepresidenan, Gedung DPR/MPR serta perumahan utama. Selain itu juga dibangun infrastruktur dasar utama seperti instalasi air dan listrik yang dapat menunjang sekitar 500.000 penduduk tahap awal IKN. Rencananya pada 2024 Presiden RI telah pindah ke IKN dan dapat merayakan HUT RI ke-79 di IKN.

Setelah 2024 IKN masuk pada tahapan berikutnya yaitu pembangunan dan pengembangan kawasan IKN sebagai area inti yang tangguh (2025-2035). Selanjutnya IKN masuk dalam tahap perluasan pembangunan dan percepatan pembangunan Kalimantan Timur (2035-2045). Setelah 2045, diharapkan IKN telah kokoh berdiri sebagai sebuah ibu kota negara bekelas dunia. **(tk)**



Acara diisi dengan penyampaian materi dari tiga pembicara, yakni Direktur Agama, Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas, Didik Darmanto; President Director/CEO, PT Energi Primer Terbarukan (PRIME), Nugroho Ananto; Guru Besar Departemen Sejarah Universitas Indonesia, Prof. Dr. Susanto Zuhdi. (28/05/24).

ANRI GELAR RAKORNAS SINKRONISASI DAN HARMONISASI LAYANAN ARSIP STATIS ANTARLEMBAGA KEARSIPAN DAN MEMORI KOLEKTIF BANGSA TAHUN 2024 DI SAMARINDA

Samarinda (28/05) - Dalam rangka menjalin kerja sama dan koordinasi yang baik antarlembaga kearsipan tingkat provinsi, kabupaten/kota, serta unit kearsipan di tingkat universitas terutama dalam kaitannya dengan pelayanan arsip statis dan memori kolektif bangsa, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Sinkronisasi dan Harmonisasi Layanan Arsip Statis Antar Lembaga Kearsipan yang bertempat di Hotel Mercure Samarinda pada 28 Mei 2024. Pada tahun ini, kegiatan Rakornas diadakan bersamaan dengan puncak perayaan Hari Kearsipan Nasional ke-53 yang diadakan di Samarinda, Kalimantan Timur. Kegiatan ini dihadiri oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kedepntian Konservasi Arsip dan 96 orang peserta yang berasal dari lembaga kearsipan daerah dan lembaga kearsipan perguruan tinggi, serta komunitas terutama yang berkedudukan di wilayah Indonesia Bagian Tengah.

Dalam sambutan sekaligus pembukaan acara, Deputi Bidang Konservasi

Arsip, Kandar menyampaikan tentang pentingnya menyelamatkan, melindungi dan memanfaatkan arsip statis. Arsip statis tidak hanya bernilai sejarah tetapi bagaimana kita dapat memanfaatkan arsip statis yang kita bangun sebagai memori kolektif bangsa. *"No archive no history, no history no future,"* ujarnya.

Setelah kegiatan dibuka, acara dilanjutkan dengan penyampaian materi dari ketiga pembicara, yakni Direktur Agama, Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas, Didik Darmanto; President Director/CEO, PT Energi Primer Terbarukan (PRIME), Nugroho Ananto; Guru Besar Departemen Sejarah Universitas Indonesia, Prof. Dr. Susanto Zuhdi. Acara dipandu oleh Ketua Tim Layanan Arsip Statis, Intan Lidwina.

Adapun hasil Rekomendasi Rakornas Memori Kolektif Bangsa, antara lain :

1. Bahwa penyelenggaraan Memori Kolektif Bangsa perlu terpadu dan tersinergi antarlembaga kearsipan, maka diperlukan regulasi dari ANRI;

2. Perlunya menyusun Naskah Akademik Arah Kebijakan ANRI sebagai lembaga layanan informasi yang nantinya dapat meningkatkan anggaran dan memaksimalkan pelayanan penggandaan arsip tidak berbayar kepada masyarakat;
3. Tarif layanan arsip berorientasi kepada layanan publik;
4. Perlu inovasi dalam memberikan layanan arsip statis, prinsip Layanan menguntungkan adalah Layanan tak berbayar atau dengan kata lain ANRI diuntungkan dengan hal lain, seperti munculnya banyak tulisan yang bersumber dari arsip yang semakin mengenalkan ANRI kepada masyarakat;
5. Dalam aspek perencanaan program dan anggaran layanan publik diharapkan menjadi *trigger* program memori kolektif bangsa;
6. Dalam melakukan transformasi kearsipan perlu dilakukan tiga hal, yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan arsip, pengembangan sarana dan prasarana kearsipan termasuk infrastruktur digital, pengembangan program dan kegiatan yang mendorong dan meningkatkan keterlibatan masyarakat.

Diharapkan dengan diselenggarakannya Rakornas ini penyelenggaraan kearsipan nasional, khususnya layanan dan pemanfaatan arsip statis yang akan bermuara kepada masyarakat dapat memberikan akses arsip statis yang seluas-luasnya untuk masyarakat, menjadi prioritas nasional sebagai salah satu upaya yang mensejahterakan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan utama yang diharapkan adalah peningkatan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang akuntabel, autentik dan terpercaya. **(na)**



Institusi yang dilakukan pengawasan kearsipan tingkat daerah tahun 2023 yang dilaksanakan oleh ANRI sebanyak 34 Pemerintah Provinsi dan yang dilakukan oleh Provinsi terhadap Kabupaten/Kota sebanyak 443 Kab/kota. (29/05/24).

ANRI SERAHKAN PENGHARGAAN HASIL PENGAWASAN KEARSIPAN DI RAKORNAS KEARSIPAN TAHUN 2024

Samarinda (29/05) - Menjadi salah satu rangkaian acara Peringatan Hari Kearsipan ke-53 di Samarinda, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) menyerahkan penghargaan Hasil Pengawasan Kearsipan untuk nilai sangat memuaskan (di luar tiga terbaik) yang diserahkan oleh para pimpinan ANRI, serta untuk Terbaik Nasional yang diserahkan oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala ANRI, Imam Gunarto dan Perwakilan dari

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Jufri Rahman, selaku staf Ahli.

Sebagai informasi, jumlah institusi yang dilakukan pengawasan kearsipan tingkat pusat tahun 2023 ialah sebanyak 86 Kementerian/Lembaga dan 10 Perguruan Tinggi Negeri dengan perincian 34 Kementerian, 22 Lembaga Pemerintah Non-Kementerian dan 30 Lembaga

Tinggi Negara/Lembaga Setingkat Kementerian, Lembaga Non Struktural dan Lembaga Penyiaran Publik.

Sementara itu, jumlah institusi yang dilakukan pengawasan kearsipan tingkat daerah tahun 2023 yang dilaksanakan oleh ANRI sebanyak 34 Pemerintah Provinsi dan yang dilakukan oleh Provinsi terhadap Kabupaten/Kota sebanyak 443 Kab/kota. **(rra)**



Penetapan arsip sebagai MKB melalui beberapa tahapan, pengajuan arsip sebagai MKB ditutup pada 31 Januari 2024. Selanjutnya dilaksanakan verifikasi berkas oleh sekretariat pada 1-16 Februari 2024, presentasi para nominator pada 22-23 Februari 2024 di Jakarta, verifikasi lapangan pada 29 Februari – 2 Maret 2024, dan sidang pleno oleh para Dewan Pakar pada 2-3 Mei 2024. (29/05/24).

ANRI SERAHKAN PENGHARGAAN ATAS TUJUH ARSIP YANG DITETAPKAN SEBAGAI MKB

Samarinda (29/05) - Pelaksana Tugas Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Imam Gunarto didampingi oleh Anggota Dewan Pakar Memori Kolektif Bangsa (MKB), Adrianus L.G. Waworuntu menyerahkan penghargaan MKB kepada 17 objek penganugerahan untuk 7 (tujuh) arsip yang telah ditetapkan sebagai MKB tahun 2024. Penghargaan diberikan pada kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Kearsipan Tahun 2024 yang berlangsung di Hotel Mercure Samarinda, Kalimantan Timur.

Imam Gunarto menyampaikan kearsipan memiliki peran penting dalam menjaga kontinuitas jalannya pemerintahan maupun kenegaraan. “Sumber-sumber masa lalu kita, baik berupa arsip, naskah, artefak dan lain-lain kadang-kadang belum cukup untuk merangkai mozaik sejarah masa lalu secara lengkap. Belum cukup membangun memori kolektif bangsa secara utuh. Tugas kita di kearsipanlah yang menjadi ujung tombak dalam menjaga kontinuitas jalannya pemerintahan maupun kenegaraan,” ungkapnya.

Adrianus L.G. Waworuntu saat membacakan menyampaikan, dari 12

arsip yang dinilai oleh Dewan Pakar MKB, terdapat tujuh arsip yang layak mendapatkan penghargaan. Adapun tujuh arsip yang ditetapkan sebagai MKB adalah sebagai berikut:

1. Arsip Jaringan Dagang Batik Lasem Awal Abad 20 (1900-1942), diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang dan Museum Nyah Lasem;
2. Arsip Tragedi Kemanusiaan Bom Bali 1 Tahun 2002-2021, diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten Badung, Kepolisian Daerah Bali, Kejaksaan Negeri Denpasar, Pengadilan Negeri Denpasar, dan H. Agus Bambang Priyanto;
3. Khazanah Arsip dr. A.K. Gani “Pioneer Aviation Corp. N.V.” Perintis Penerbangan Swasta di Indonesia (1951-1957), diusulkan oleh Museum Pahlawan Nasional Mayjen TNI (Purn) dr. A.K.Gani dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
4. Arsip Transmigrasi di Jawa Tengah tahun 1950-1999, diusulkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
5. Arsip Herbarium

Temulawak:Pengetahuan Lokal dan Teknologi Tumbuhan Obat Indonesia, diusulkan oleh RSUP Dr. Sardjito, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;

6. Arsip Pembangunan Tugu Pahlawan (1951-1997), diusulkan oleh Pemerintah Kota Surabaya;
7. Arsip Revitalisasi Situs Kota Lama Semarang Tahun 1983-2022, diusulkan oleh Pemerintah Kota Semarang.

Pada kesempatan ini, Bupati Rembang, H. Abdul Hafidz mengucapkan terima kasih kepada ANRI yang telah menetapkan Arsip Jaringan Dagang Batik Lasem Awal Abad 20 (1900-1942) sebagai MKB.

Sebagai informasi, penetapan arsip sebagai MKB melalui beberapa tahapan. Pengajuan arsip sebagai MKB ditutup pada 31 Januari 2024. Selanjutnya, dilaksanakan verifikasi berkas oleh sekretariat pada 1-16 Februari 2024, presentasi para nominator pada 22-23 Februari 2024 di Jakarta, verifikasi lapangan pada 29 Februari – 2 Maret 2024, dan sidang pleno oleh para Dewan Pakar pada 2-3 Mei 2024. **(sa)**

FOTO: DOK. ANRI

SRI MULYANI INDRAWATI

Menteri Keuangan Republik Indonesia

ATAS KOMITMEN DAN KESUNGGUHAN UPAYA DALAM PENINGKATAN KINERJA
KEARSIPAN KEMENTERIAN KEUANGAN SERTA PELINDUNGAN
ARSIP ASET DAN KEUANGAN NEGARA

Penghargaan diberikan kepada tokoh yang memiliki kontribusi dan komitmen yang tinggi terhadap penyelenggaraan kearsipan. (29/05/24).

PENGHARGAAN TOKOH KEPEMIMPINAN BIDANG KEARSIPAN

Samarinda (29/05) - Pelaksana Tugas Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia, Imam Gunarto memberikan penghargaan kepada tokoh kepemimpinan di bidang kearsipan. Pemberian penghargaan tersebut diberikan pada Puncak Peringatan Hari Kearsipan ke-53 di Samarinda, 29 Mei 2024.

Penghargaan ini diberikan kepada tokoh yang memiliki kontribusi dan komitmen yang tinggi terhadap penyelenggaraan kearsipan. Penghargaan diberikan berdasarkan Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 200 Tahun 2024 tentang Penghargaan Tokoh Kepemimpinan Bidang Kearsipan. Adapun tokoh-tokoh yang mendapatkan penghargaan Tokoh Kepemimpinan Bidang Kearsipan yakni :

1) Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati atas komitmen dan

kesungguhan upaya dalam peningkatan kinerja kearsipan Kementerian Keuangan serta perlindungan arsip aset dan keuangan negara. Penerima penghargaan diwakili oleh Mochamad Agus Rofiudin Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi.

2) Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian atas komitmen dan kesungguhan upaya dalam peningkatan kinerja kearsipan Kementerian Dalam Negeri dan pembinaan kearsipan pemerintah daerah secara nasional. Sertifikat penghargaan diberikan kepada Dr. Sugeng Hariyono, M.Pd. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri.

3) Jaksa Agung, Prof. Dr. ST. Burhanuddin atas komitmen

dan kesungguhan upaya dalam peningkatan kinerja kearsipan Kejaksaan Republik Indonesia dan kepeloporan dalam pengelolaan arsip penegakan hukum. Sertifikat penghargaan diterima oleh Dr. Bambang Sugeng Rukmono Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan.

4) Menteri Ketenagakerjaan Dr. Hj. Ida Fauziyah, M.Si. atas komitmen dan kesungguhan upaya dalam peningkatan kinerja kearsipan Kementerian Ketenagakerjaan dan peningkatan kinerja kearsipan perusahaan swasta di bidang ketenagakerjaan. Penghargaan diserahkan kepada Dian Kreshnadjati, S.E., M.M. Kepala Biro Umum Kementerian Ketenagakerjaan.

5) Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin atas komitmen dan kesungguhan upaya dalam peningkatan kinerja kearsipan Kementerian Kesehatan serta perlindungan dan penyelamatan arsip penanganan Covid-19. Sertifikat penghargaan diserahkan kepada Kunta Wibawa Dasa Nugraha Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan.

Selain itu, penghargaan tokoh kearsipan juga diberikan kepada Pj. Gubernur Kalimantan Timur, Dr. Drs. Akmal Malik, M.Si atas kontribusinya dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan kearsipan secara nasional. disamping itu, Pj. Gubernur Kalimantan Timur beserta jajaran telah berhasil dan sukses menjadi tuan rumah penyelenggaraan Puncak Peringatan Hari Kearsipan ke-53 di Samarinda. **(is/audi)**



Plt. Kepala ANRI, Imam Gunarto menyerahkan sertifikat registrasi Memory of the World Regional Committee for Asia and the Pacific (MoWCAP). (29/05/24).

PLT. KEPALA ANRI SERAHKAN SERTIFIKAT REGISTRASI WARISAN DOKUMENTER INDONESIA DALAM MOWCAP 2024

Samarinda (29/05) - Bertepatan dengan pelaksanaan puncak peringatan Hari Kearsipan ke-53 di Samarinda, Pelaksana Tugas Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Imam Gunarto menyerahkan sertifikat registrasi Memory of the World Regional Committee for Asia and the Pacific (MoWCAP) atas arsip Indarung I dan Pusat Penelitian Perkebunan Gula di Indonesia (P3GI), serta Tambo Tuanku Imam Bonjol. Sertifikat registrasi MoWCAP tersebut diterima langsung oleh Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Bobby Soemiarsono, Kepala

P3GI, Aris Lukito, Direktur Utama PT Semen Padang, Indrieffouny Indra, dan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat, Jumaidi.

Arsip Indarung I Semen Padang yang diajukan PT Semen Padang dan arsip tentang Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia tahun 1887-1986 yang diajukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur serta Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI) sebelumnya pada 23 Mei 2023 telah ditetapkan sebagai Memori Kolektif Bangsa oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) bertepatan

dengan momentum puncak peringatan Hari Kearsipan ke-52 di Banyuwangi.

Arsip Indarung I Semen Padang terdiri dari 20 lembar menggambarkan perencanaan pembangunan pabrik semen pada periode 1907-1910. Melalui arsip tersebut tergambar bahwa Indarung I menjadi pabrik semen pertama di Asia Tenggara. Adapun arsip tentang Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia tahun 1887-1986 benjadi bukti yang mencatat peran kegiatan penelitian ISRI terhadap industri gula dunia yang mencatat bukti sejarah perkembangan teknologi industri dan inovasi dari masa ke masa.

Sementara itu, manuskrip Tambo Tuanku Imam Bonjol yang diusulkan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang ditulis Imam Bonjol menceritakan gambaran pergerakan islam dan dinamika yang dihadapi masyarakat di Sumatera Barat pada masa Hindia Belanda. Manuskrip ini terdiri atas 342 halaman yang dihasilkan sekitar abad pertengahan ke-19.

Kedua arsip dan satu manuskrip tersebut berhasil teregistrasi menjadi warisan dokumenter kawasan regional Asia Pasifik yang ditetapkan pada 10th MoWCAP *General Meeting* di Best Western Premiere Tuushin, Ulan Bator, Mongolia. Sebagai informasi, 10th MoWCAP *General Meeting* berlangsung pada 6 s.d 8 Mei 2024 di Ulan Bator Mongolia ini dihadiri delegasi Komite MoW Indonesia dan nominator warisan dokumenter yang sedang diajukan pada register MoWCAP di antaranya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan P3GI, serta PT Semen Padang. **(tk)**



FOTO: DOK. ANRI

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Imam Gunarto dan Penjabat (Pj) Bupati Bantaeng, Andi Abubakar meletakkan batu pertama pembangunan Gedung Depot Arsip Kabupaten Bantaeng yang berlokasi di samping Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. (05/06/24).

PLT. KEPALA ANRI LETAKKAN BATU PERTAMA PEMBANGUNAN DEPOT ARSIP KABUPATEN BANTAENG

Bantaeng (05/06) - Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Imam Gunarto dan Penjabat (Pj) Bupati Bantaeng, Andi Abubakar meletakkan batu pertama pembangunan Gedung Depot Arsip Kabupaten Bantaeng yang berlokasi di samping Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Pada kegiatan ini turut hadir perwakilan Pj. Gubernur

Sulawesi Selatan, Plt. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan, H. Asriady Sulaiman.

Pada sambutannya, Imam Gunarto menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan pembangunan Depot Arsip di Kabupaten Bantaeng. Imam juga mengucapkan terima kasih kepada Pj. Bupati Bantaeng atas

pembangunan ini dan diharapkan Kabupaten Bantaeng bisa menjadi contoh atau cerminan bagi kabupaten lain.

Setelah dilaksanakan peletakan batu pertama pembangunan Depot Arsip, acara dilanjutkan dengan peninjauan pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Bantaeng. **(sa)**



Penandatanganan MoU merujuk pada Persetujuan Kerja Sama Kebudayaan antara Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda yang ditandatangani di Jakarta pada 7 Juli 1968. (11/06/24).

ANRI SEPAKATI MOU DENGAN NETHERLANDS INSTITUTE FOR SOUND AND VISION

Solo (11/06) - Pelaksana Tugas Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Imam Gunarto menandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan Director General Netherlands Institute for Sound and Vision (NISV), Mr. Eppo van Nispen tot Sevenaer. Kerja sama dengan NISV atau Lembaga Kearsipan Audiovisual Belanda ini menjadi upaya untuk memperkuat hubungan baik yang telah terjalin antara Indonesia dan Belanda, khususnya kerja sama lebih lanjut di

bidang arsip audiovisual.

Sebagai informasi, penandatanganan MoU ini merujuk pada Persetujuan Kerja Sama Kebudayaan antara Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda yang ditandatangani di Jakarta pada 7 Juli 1968. Adapun ruang lingkup kerja sama yang disepakati meliputi: pertukaran salinan inventaris digital dan metadata arsip dan koleksi audiovisual bersejarah untuk tujuan kesejarahan dan pendidikan; pameran

bersama dan publikasi arsip dan koleksi audiovisual di kedua negara; pertukaran pengetahuan tentang literasi media dan inklusi digital; penominasian bersama warisan dokumenter audiovisual dalam Register Internasional Memori Dunia; peningkatan kapasitas di bidang pengelolaan arsip dan koleksi audiovisual, dan kerja sama lainnya yang dimungkinkan serta memperoleh kesepakatan secara tertulis antara ANRI dan NISV. **(tk)**



Plt. Kepala ANRI memberikan sertifikat penghargaan kepada Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya (KGPAA) Mangkunegara X atas komitmennya dalam pelestarian arsip keraton sebagai warisan budaya bangsa. (11/06/24).

KGPAA MANGKUNEGARA X TERIMA PENGHARGAAN KEARSIPAN DARI ANRI

Solo (11/06) - Pada rangkaian pembukaan acara Konferensi Internasional ke-28 SEAPAVAA yang dilaksanakan di The Sunan Hotel Solo, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya (KGPAA) Mangkunegara X menerima penghargaan kearsipan atas komitmennya dalam pelestarian arsip keraton sebagai warisan budaya

bangsa yang diserahkan Pelaksana Tugas Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia, Imam Gunarto.

Selain menerima penghargaan kearsipan, KGPAA Mangkunegara X juga menerima kopi digital arsip tarian tradisional Gusti Nurul yang diserahkan langsung oleh Director

General Netherlands Institute for Sound and Vision, Mr. Eppo van Nispen tot Sevenaer. Menurut Kanjeng Gusti, dengan diperolehnya kopi digital tersebut dapat melengkapi arsip keraton yang selama ini dilestarikan, terutama arsip pada era KGPAA Mangkunegara VII. **(tk)**

ARTI, 9-14 JUNI 2024



Konferensi yang berlangsung dari tanggal 9 hingga 14 Juni 2024 ini terdiri dari beberapa kegiatan, yaitu Pertemuan Dewan Eksekutif, Lokakarya, Simposium, Sidang Umum, Kunjungan Kelembagaan dan Kunjungan Budaya. (11/06/24).

PLT. KEPALA ANRI: KONFERENSI KE-28 SEAPAVAA JADI KONFERENSI INTERNASIONAL PERTAMA KEARSIPAN DI SOLO

Solo (11/06) - Pelaksana Tugas Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Imam Gunarto menyampaikan bahwa menjadi kebanggaan bagi ANRI sebagai perwakilan pemerintah Republik Indonesia untuk menjadi tuan rumah Konferensi ke-28 SouthEast Asia – Pacific AudioVisual Archive Association (SEAPAVAA) yang dilaksanakan di The Sunan Hotel, Solo, Jawa Tengah pada 9-14 Juni 2024 dengan tema “*Navigating New Horizons in Audiovisual Archiving*”. Imam menjelaskan bahwa terpilihnya ANRI menjadi penyelenggara Konferensi ke-28 SEAPAVAA tidak terlepas dari hasil *General Assembly* ke-26 SEAPAVAA ke-26 2022 dan ke-27 pada 2023 di Pattaya, Thailand.

“Konferensi ini akan menjadi acara internasional pertama mengenai kearsipan yang diselenggarakan di Surakarta atau yang dikenal dengan sebutan Solo. Kota ini telah menjadi pusat kebudayaan dan kesenian, khususnya bagi masyarakat Jawa,” jelas Imam. Ditambahkan olehnya, Solo dipilih menjadi tuan rumah karena Solo juga memiliki budaya pengarsipan audiovisual yang kuat dengan hadirnya Lokananta sebagai salah satu studio musik tertua di Indonesia.

Sebagai informasi, konferensi yang berlangsung dari tanggal 9 hingga 14 Juni 2024 ini terdiri dari beberapa kegiatan, yaitu Pertemuan Dewan Eksekutif, Lokakarya, Simposium, Sidang Umum, Kunjungan

Kelembagaan dan Kunjungan Budaya. Konferensi dihadiri lebih dari seratus peserta dan delegasi internasional yang berasal dari 21 negara, antara lain Amerika Serikat, Barbados, Belanda, Prancis, Inggris, India, Cina, Republik Korea, Jepang, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Myanmar, Vietnam, Timor Leste, Australia, Selandia Baru, Samoa, Kepulauan Solomon, dan Kiribati. Selain peserta internasional, konferensi juga diikuti 150 peserta dari Indonesia yang sebagian besar merupakan arsiparis dari lembaga kearsipan daerah, unit kearsipan kementerian/lembaga, lembaga kearsipan perguruan tinggi, lembaga penyiaran televisi dan radio, serta komunitas kearsipan audiovisual nonpemerintah. (tk)



Pusat Studi Arsip Statis Kepresidenan (Pusdipres) Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) menerima kunjungan dua orang putri dari Wakil Presiden Pertama, Mohammad Hatta, yaitu Prof. Meutia Farida Swasono atau yang dikenal oleh masyarakat dengan Meutia Hatta dan Halida Nuriah Hatta atau yang dikenal dengan Halida Hatta. (19/06/24).

MEUTIA HATTA DAN HALIDA HATTA KUNJUNGI PAMERAN TETAP PRESIDEN PERTAMA IR. SUKARNO

Jakarta (19/06) - Pusat Studi Arsip Statis Kepresidenan (Pusdipres) Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) menerima kunjungan dua orang putri dari Wakil Presiden Pertama, Mohammad Hatta, yaitu Prof. Meutia Farida Swasono atau yang dikenal oleh masyarakat dengan Meutia Hatta dan Halida Nuriah Hatta atau yang dikenal dengan Halida Hatta. Kunjungan ini diterima oleh Kepala Pusdipres, Mira Puspita Rini, Kepala Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat, F. Kristiartono dan

arsiparis di lingkungan Pusdipres. Agenda kunjungan dilanjutkan dengan kunjungan di gedung cagar budaya yang dipandu arsiparis Nurarta S dan Octavia S. Kedua putri Wakil Presiden Pertama ini, Meutia dan Halida Hatta sangat antusias dengan lemari brankas dan peta-peta yang ada di gedung cagar budaya.

Kunjungan Pameran Tetap Presiden Pertama Ir. Sukarno adalah agenda kedua dari kunjungan ini. Pada sesi ini dipaparkan materi

pameran arsip berupa arsip tekstual, foto dan video, replika baju Presiden Sukarno, dan maket pembangunan semesta. Dari sesi ini pemandu juga memperoleh informasi yang berasal dari Meutia Hatta dan Halida Hatta. Pasca kunjungan, Pelaksana Kepala ANRI, Imam Gunarto menyerahkan foto yang berasal dari Kementerian Penerangan Seri Jakarta tahun 1955. Agenda kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi mengenai pengayaan materi Wakil Presiden Moh. Hatta di pameran arsip. (ot)

Mari Dukung Kami Wujudkan

”
**PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS
MENUJU WBK
YANG
BERSIH MELAYANI
DALAM**

 www.anri.go.id  [ArsipNasionalRI](https://www.facebook.com/ArsipNasionalRI)  [@arsipnasionalri](https://twitter.com/arsipnasionalri)  [arsipnasionalri](https://www.instagram.com/arsipnasionalri)  [Arsip Nasional RI](https://www.youtube.com/ArsipNasionalRI) “

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

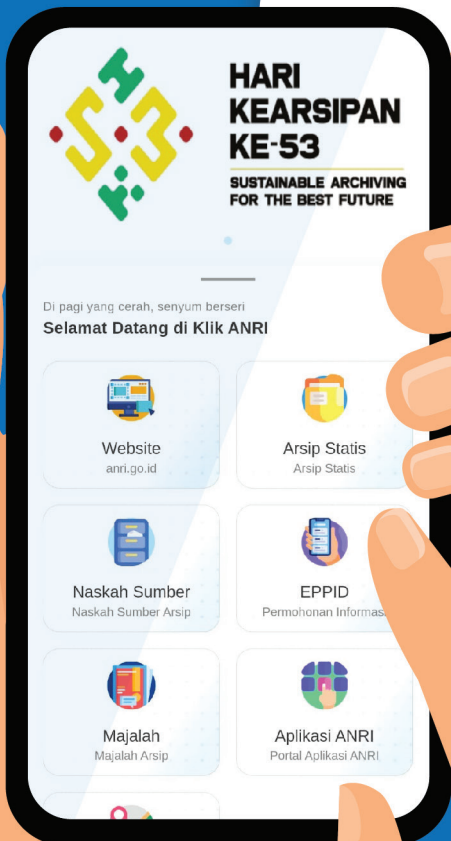


DOWNLOAD APLIKASI **klik anri**



FITUR :

- www.anri.go.id
- e-PPID ANRI
- Unduh Majalah ARSIP
- Jurnal Kearsipan
- Antrian Online
- Ruang Baca
- SRIKANDI
- Diorama Sejarah
- Perjalanan Bangsa
- JIKN
- Sejarah Nusantara
- JDIH ANRI



download sekarang di :

